

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pendidikan Kewarganegaraan

2.1.1. Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan sangat terkait erat dengan konsep kewarganegaraan. Sebelum membahas konsep Pendidikan Kewarganegaraan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai konsep kewarganegaraan. Konsep kewarganegaraan berkaitan dengan relasi antara negara dan warga mengenai hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang bersifat resiprokal. Menurut TH. Marshall dalam Banting (1999), kewarganegaraan adalah *Citizenship as the status granted to those who are full members of a community, and argued that citizenship had increasingly been invested with a formidable array of rights*. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Marshall, dipahami bahwa konsep kewarganegaraan berkaitan dengan status seseorang sebagai anggota penuh dalam suatu masyarakat dengan seperangkat hak yang melekat pada statusnya.

Marshall mengategorikan kewarganegaraan menjadi tiga aspek, yakni: 1). Kewarganegaraan sipil, berkaitan dengan kebebasan individu seperti hak setiap individu untuk hidup bebas, bebas berbicara, bebas beragama, hak atas kepemilikan serta hak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum; 2). Kewarganegaraan politik, berkaitan dengan hak berpartisipasi dalam bidang politik, seperti menjadi anggota lembaga politik, atau menjadi anggota dari lembaga pemilihan umum; 3). Kewarganegaraan sosial, berkaitan dengan semua hak untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi dan rasa aman, hak untuk hidup sesuai dengan standar yang berlaku di masyarakat, hak untuk menjaga dan membagi warisan sosial. Lembaga sosial yang memiliki peran penting untuk menjamin pemenuhan hak warga negara salah satunya adalah sekolah (Marshall, 1950). Kategorisasi kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Marshall berlangsung secara evolusioner. Pada abad ke delapan belas, kewarganegaraan dikaitkan dengan hak sipil, seperti hak memperoleh kebebasan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak beragama, hak atas kepemilikan properti, dan lainnya. Pada Abad ke Sembilan belas, pemaknaan

kewarganegaraan diperluas meliputi hak politik. Pada masa itu, warga negara tidak hanya memiliki hak sipil, juga hak politik yakni hak untuk berpartisipasi secara politik seperti menduduki posisi kekuasaan, atau menjadi pemilih dalam pemilihan umum. Pada abad kedua puluh, konsep kewarganegaraan dihubungkan dengan hak sosial yakni hak untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera sesuai dengan standar masyarakat (Marshall, 1950).

Periodisasi evolusioner tiga hak kewarganegaraan yang dikemukakan Marshall hanya berlaku untuk warga negara laki-laki. Berdasarkan sejarah, perempuan tidak memperoleh ketiga hak tersebut (Smith, 1999). Pandangan ini menegaskan pendapat yang dikemukakan oleh Beauvoir, bahwa secara historis relasi laki-laki dan perempuan tidak setara. Laki-laki memiliki posisi superior, dominan, memiliki otonomi dan gambaran positif tentang diri dan hidupnya. Sedangkan perempuan berada pada posisi inferior, cenderung tidak mandiri, dan memiliki gambaran negatif tentang dirinya. Menurut Beauvoir, perempuan disebut sebagai “*other*”, karena perempuan memiliki pengalaman hidup yang berbeda dengan laki-laki yang disebabkan posisi sosialnya yang subordinat (Beauvoir, 1949). Kedua pendapat ini ditegaskan oleh Kiwan yang menyatakan bahwa secara historis perempuan tidak dipandang sebagai bagian dari warga negara. Konsep dan praktik kewarganegaraan bersifat diskriminatif karena mengesampingkan kelompok-kelompok minoritas termasuk perempuan (Kiwan, 2016). Dari beberapa pendapat di atas, dipahami bahwa sepanjang sejarah peradaban manusia, hak perempuan dan eksistensi perempuan sebagai warga negara masih terus diperjuangkan untuk dapat menempati kedudukan yang setara dengan laki-laki.

Banks mengkritisi pendapat yang dikemukakan oleh Marshall. Menurutnya, pendapat yang dikemukakan oleh Marshall sudah kurang relevan di era globalisasi. Konsep warga negara dan pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan kelompok-kelompok marginal yang selama ini menjadi warga negara” kelas dua”, seperti kelompok minoritas atas dasar ras, kelas serta gender (Banks, 2008). Pendapat Banks ini menegaskan bahwa dalam konteks kehidupan global, kemajuan pesat yang dicapai diikuti dengan ketimpangan sosial, ekonomi, dan persoalan lainnya sehingga muncul kelompok minoritas yang menempati posisi subordinat dan *powerless*. Konsep kewarganegaraan perlu

menjangkau kelompok-kelompok tersebut agar tetap memperoleh haknya sebagai warga negara.

Pandangan senada dikemukakan oleh Young, dalam realitasnya, tidak semua pihak menikmati hak kewarganegaraan, terdapat kelompok-kelompok yang masih menjadi warga negara “kelas dua”, salah satunya yakni perempuan. Warga negara pada negara modern mencerminkan nilai-nilai universal serta norma yang bersumber dari pengalaman laki-laki dengan nilai maskulin. Gambaran mengenai posisi subordinat perempuan dalam konsep kewarganegaraan tampak pada pandangan Rousseau yang mengesampingkan perempuan sebagai warga negara yang mampu berperan di ranah publik. Menurut Rousseau, perempuan memiliki tugas utama di ranah privat yakni pengasuhan anak serta urusan rumah tangga (Young, 1989). Dapat dipahami bahwa meskipun secara legal, laki-laki dan perempuan setara, pada kenyataannya perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk berperan di ranah publik. Perspektif yang mensubordinasi peran perempuan ini terjadi karena nilai yang dibangun bersumber dari perspektif dan pengalaman laki-laki yang memiliki legitimasi untuk menafsirkan “dunia”.

Di era globalisasi, diperlukan pemaknaan kewarganegaraan yang multikultur, yakni yang mendorong penghargaan terhadap keberagaman yang merupakan realitas hidup bermasyarakat. Kewarganegaraan multikultural kritis merupakan sarana untuk mendorong transformasi institusional untuk mendukung demokrasi (Castro, 2010). Konsep kewarganegaraan multikultural kritis berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku warga negara yang terbuka terhadap beragam perbedaan, memiliki perspektif luas dalam merespon persoalan dalam konteks lokal, nasional dan global di semua aspek kehidupan seperti isu lingkungan, imigran, diskriminasi rasial maupun gender, serta persoalan global lainnya.

Terdapat empat tingkatan konsep kewarganegaraan, yakni: *Pertama*, *Legal citizenship* atau kewarganegaraan hukum, yaitu tingkat kewarganegaraan yang paling rendah, berkaitan dengan kewarganegaraan seseorang secara hukum dalam relasinya dengan negara beserta semua hak dan kewajiban yang dimiliki namun tidak ikut berpartisipasi dalam sistem politik. Tingkatan ini berkaitan dengan status kewarganegaraan seseorang secara hukum, tanpa ikut berpartisipasi dalam kegiatan

politik; *kedua*, *Minimum citizenship* atau kewarganegaraan minimal yakni warga negara yang diakui secara hukum dan berpartisipasi dalam kegiatan politik konvensional seperti ikut dalam kegiatan pemilihan umum pada tingkat lokal maupun nasional, dan aktif menyuarakan isu-isu penting yang ada di masyarakat; *ketiga*, *Active citizenship* atau kewarganegaraan aktif yaitu warga negara yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik konvensional seperti pemilu, demonstrasi atau melakukan pidato publik untuk menyuarakan berbagai isu konvensional maupun untuk mendorong perubahan. Kegiatan politik yang dilakukan warga negara pada tingkatan ini berupaya untuk menjaga dan mendukung sistem sosial politik yang ada; *keempat*, *Transformative Citizenship* atau kewarganegaraan transformatif yaitu warga negara yang aktif berpartisipasi untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejalan dengan nilai-nilai, prinsip moral serta cita-cita sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang (Banks, 2008). Berdasarkan pendapat Banks, dipahami bahwa kewarganegaraan transformatif merupakan kewarganegaraan yang diharapkan yakni setiap warga negara aktif berpartisipasi untuk mewujudkan kehidupan yang adil bagi semua pihak, tanpa ada kelompok masyarakat yang mengalami diskriminasi atau subordinasi atas dasar apapun, sebagaimana tujuan negara.

Memahami kewarganegaraan dapat menggunakan dua perspektif, yaitu: perspektif hak yang berdasar dari tradisi *liberal*, kewarganegaraan berkenaan dengan jaminan negara atas hak politik dan hak sipil bagi setiap warga negara. Negara menjamin kebebasan dan kesetaraan warga negara dalam batas tertentu. Pendekatan kewajiban berakar pada tradisi politik *Republican* yang memandang bahwa kewarganegaraan berkaitan dengan kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Lister, 2003). Berdasarkan dua perspektif tersebut, dipahami bahwa konsep kewarganegaraan yang menekankan pada hak warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dan berupaya memperoleh hak asasinya, merupakan implementasi dari tradisi liberal. Konsep kewarganegaraan yang menempatkan partisipasi dalam politik maupun kehidupan masyarakat sebagai suatu kewajiban yang melekat pada semua warga negara merupakan konsep kewarganegaraan yang bersumber dari tradisi Republikan. Beragam konsep kewarganegaraan yang telah di paparkan menegaskan bahwa

memaknai kewarganegaraan dapat menggunakan beragam perspektif dan sangat berkaitan dengan dinamika sosial politik pada konteks nasional maupun global.

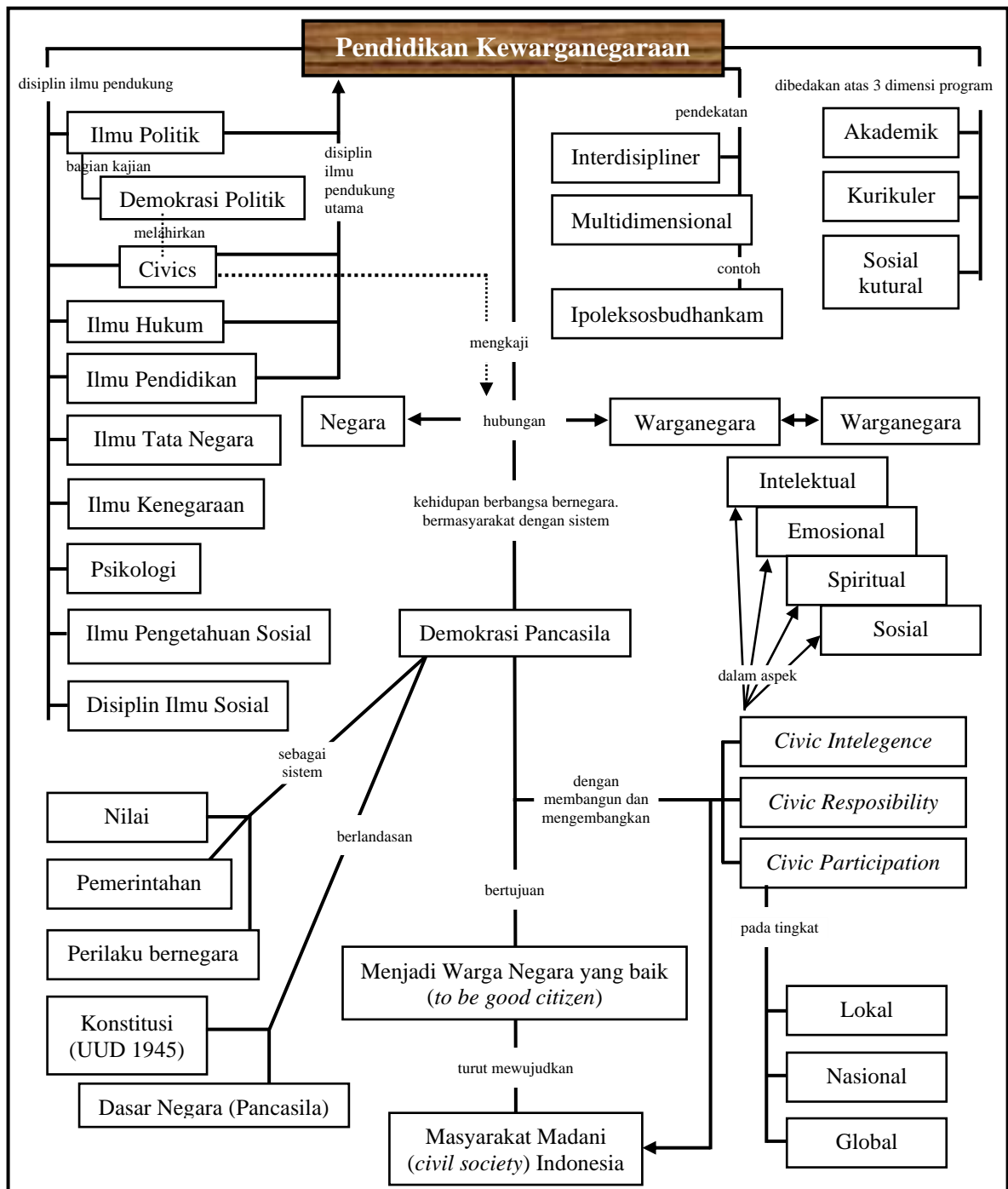
Setelah berbagai pedapat mengenai konsep kewarganegaraan dipaparkan, diperoleh gambaran berikut ini, *pertama*, kewarganegaraan merupakan suatu konsep yang dinamis, berubah sesuai dinamika perkembangan jaman dengan semua tuntutan dan persoalan yang berkaitan dengan warga negara dan negara; *kedua*, memaknai dan menterjemahkan konsep kewarganegaraan memerlukan perspektif perempuan sehingga konsep kewarganegaraan menyajikan keseimbangan perspektif laki-laki dan perempuan; *Ketiga*, kewarganegaraan transformatif merupakan kewarganegaraan yang dianggap ideal yakni warga negara yang aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial. Warga negara yang tidak tinggal diam atau pasif menghadapi persoalan ketidakadilan sosial yang ada dalam konteks lokal, nasional, maupun global.

Sebagai negara demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara perlu didukung dengan perilaku warga negara yang memahami hak dan kewajiban dalam relasinya dengan negara, antar warga negara maupun antara warga negara dan masyarakat. Pendidikan berperan membentuk warga negara yang berakhlak mulia, menjunjung nilai luhur bangsa, dan demokratis. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan diorientasikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara memiliki kesalehan personal, sosial, berilmu, kreatif, demokratis dan bertanggung jawab. Negara sangat berkepentingan dalam membentuk warga negara yang dapat memberikan kontribusi bagi negara dan umat manusia. Salah satu wahana yang strategis dalam mempersiapkan warga negara yang ideal yakni Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki beragam pengertian. Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan di sekolah bertujuan untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki siswa sehingga diharapkan dapat menjadi warga negara yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, serta demokratis (Winayaputra & Budimansyah, 2007). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang diarahkan untuk memperkuat demokrasi. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa diharapkan mampu menggunakan haknya dengan baik dan secara aktif berupaya untuk mewujudkan kehidupan yang setara dan adil (Osler, 2002). Relasi Pendidikan Kewarganegaraan dengan terwujudnya sistem demokrasi dapat dilihat pada peta konsep Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana digambarkan oleh Azis Wahab & Sapriya (2008), sebagai berikut:



Sumber: Wahab & Sapriya, 2008.

Gambar 2.1 Model Peta Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Model peta konsep Pendidikan Kewarganegaraan di atas menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengkaji relasi antara warga negara dan negara dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai sistem demokrasi Pancasila. Mata Pelajaran Pendidikan

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

Kewarganegaraan diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang baik yakni warga negara yang memiliki nilai, sikap hidup dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat menunjang terciptanya masyarakat madani yang menjadi penopang sistem demokrasi.

Pendidikan Kewarganegaraan yang kritis demokratis memerlukan keseimbangan antara otonomi individu dan kepedulian sosial yang ditunjukkan dengan berbagai karakteristik seperti berfikir kritis, dan kreatif menciptakan hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat (Veugeles, 2007). Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Banks, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan saat ini harus melakukan transformasi, yakni Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya melegitimasi pengetahuan yang menggambarkan dominasi kelompok masyarakat tertentu, Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam menentang berbagai bentuk diskriminasi dan ketidakadilan sosial yang dialami kelompok minoritas atas dasar kelas, ras, atau gender. Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan yang dihubungkan dengan empat elemen kewarganegaraan yakni kewarganegaraan sipil, politik, sosial, dan budaya (Banks, 2008). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi wahana yang memfasilitasi siswa menjadi warga negara yang kritis dan partisipatif untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan konsep, nilai-nilai, karakter, keterampilan, kecerdasan, pengetahuan dan pemahaman (Lawton, 2000). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang berupaya mentransmisi nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik yakni warga negara yang aktif berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Muleya, 2018). Pendidikan Kewarganegaraan berperan menjaga nilai yang dipandang penting oleh masyarakat melalui transmisi nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi siswa dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku.

Pendidikan Kewarganegaraan berorientasi pada transformasi sosial untuk mewujudkan keadilan sosial. Pendidikan kewarganegaraan berkaitan erat dengan emansipasi, yakni warga negara yang memiliki sikap toleran terhadap

keberagaman, kritis, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik. Pendidikan Kewarganegaraan perlu memberikan perhatian mengenai ras, gender, kelas sosial, untuk mendorong keadilan sosial. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik yakni warga negara yang memiliki sifat kasih sayang pada sesama, berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik dan aktivitas publik, memiliki kepedulian terhadap persoalan keadilan sosial, lingkungan, toleran, serta mampu berdialog dengan berbagai pihak yang berbeda (Schugurensky dan Mayers, 2003). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menjadi wahana yang mendorong peran aktif semua warga negara untuk mengatasi berbagai persoalan sehingga kehidupan ideal yang diharapkan masyarakat dapat terwujud.

Perkembangan globalisasi mendorong ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan relasi warga negara dengan negara, juga berkaitan dengan peran individu sebagai bagian dari masyarakat dunia. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membekali siswa dengan pengetahuan, nilai serta keterampilan untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bidang kehidupan baik pada tingkat lokal, nasional termasuk dalam merespon berbagai persoalan yang berskala global (UNESCO, 2014). Pendidikan Kewarganegaraan kritis yakni Pendidikan Kewarganegaraan yang membantu mempersiapkan siswa untuk memiliki keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan global (Castro, 2010).

Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan transformatif yang mendidik siswa memahami kompleksitas identitas yang mereka miliki dalam tataran lokal, nasional, dan global serta memahami keterkaitan antar berbagai identitas tersebut. Pendidikan Kewarganegaraan transformatif membantu siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menentang ketidaksetaraan yang terjadi di masyarakat, negara maupun dunia. Pendidikan Kewarganegaraan transformatif mengembangkan nilai, dan perspektif kosmopolitan serta perilaku untuk mewujudkan kehidupan yang adil, demokratis dalam masyarakat yang plural (Banks, 2008). Pendidikan Kewarganegaraan transformatif menunjang partisipasi siswa dalam beragam ranah kehidupan.

Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi memiliki cakupan yang luas meliputi isu dan persoalan dalam konteks negara, dan dunia yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap warga dunia. Pendidikan Kewarganegaraan saat ini memiliki cakupan yang lebih luas, yakni kewarganegaraan dan keterkaitannya dengan lingkungan (ekologi), kewarganegaraan atas dasar gender, maupun mengenai kewarganegaraan ekonomi (Chong, 2015). Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan upaya mempersiapkan warga negara yang aktif secara politik, peduli terhadap lingkungan, aktif dalam bidang ekonomi, serta warga negara yang memiliki pemahaman akan kesetaraan gender.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dinamika sesuai dengan perkembangan jaman. Di masa lalu, Pendidikan Kewarganegaraan hanya berkaitan dengan pengetahuan, sikap dan perilaku warga negara dalam relasinya dengan negara. Globalisasi telah memperluas ruang lingkup Pendidikan Kewarganegaraan yakni relasi warga negara dengan negara dan sebagai warga dunia sehingga Pendidikan Kewarganegaraan dituntut untuk mampu menghasilkan warga negara yang partisipatif diberbagai bidang kehidupan secara lokal, nasional, maupun global.

2.1.2. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Penyelenggaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan spesifik yang hendak dicapai. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di era globalisasi yakni mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang aktif berpartisipasi menghadapi berbagai tantangan serta persoalan yang terjadi di lingkungan sosial terdekat, maupun pada tingkatan global untuk mewujudkan kehidupan yang adil, damai, toleran, inklusif, aman, serta kehidupan yang berkelanjutan untuk generasi yang akan datang (UNESCO, 2014). Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh McCowan, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warga negara yang demokratis sehingga tercipta masyarakat yang demokratis (McCowan, 2009). Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengintegrasikan aspek pengetahuan, keterampilan, nilai dan perilaku

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

kewarganegaraan serta menjadikan lingkungan sosial sebagai bagian dari “tempat” untuk siswa belajar serta mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat (Godanay, 2012). Era globalisasi melahirkan beragam kompleksitas dan keberagaman, Pendidikan kewarganegaraan menghadapi tantangan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara demokratis yang menghargai keberagaman dan perbedaan serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat pada konteks lokal, nasional, maupun global.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yakni melakukan transmisi pengetahuan mengenai berbagai konsep yang berkenaan dengan negara, juga membentuk keterampilan serta tindakan konkrit siswa dalam konteks kehidupan masyarakat yang demokratis (Beutel, 2012). Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk karakter warga negara yang demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan dukungan dari berbagai pihak yang berperan dalam menentukan terwujudnya kehidupan yang demokratis seperti kurikulum yang menjamin nilai-nilai demokrasi; kebijakan maupun budaya sekolah yang menjunjung nilai-nilai demokrasi, serta guru sebagai *rule model* yang menerapkan nilai demokrasi dalam proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran (Devies dkk, 1999). Pendidikan Kewarganegaraan mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang demokratis, terbuka dan toleran terhadap berbagai perbedaan dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pendidikan Kewarganegaraan membentuk siswa menjadi warga negara yang aktif merespon berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat serta mampu berpartisipasi secara efektif di berbagai bidang kehidupan (Gundara, 2000). Proses pembentukan karakter warga negara yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, perlu dukungan dari berbagai komponen masyarakat termasuk guru, dan lingkungan sosial yang lebih luas yang menjadi acuan siswa berperilaku.

Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut *The National Conference of State Legislatures* (2017) dalam Kennedy (2019) yakni membantu siswa memiliki pengetahuan, keterampilan, dan perilaku untuk menjadi warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab. Indikator warga negara yang kompeten dan bertanggung jawab yakni memiliki pengetahuan yang luas dan bijaksana; aktif

berpartisipasi dalam kehidupan kolektif diberbagai bidang kehidupan; aktif dalam kegiatan politik yang dilandasi dengan pengetahuan, keterampilan dan komitmen untuk memberikan kontribusi positif bagi kepentingan bersama; memiliki kebajikan moral dan kebajikan sebagai warga negara sehingga mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia, peduli terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan sesama, tanggung jawab sosial, dan lainnya.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mendorong perubahan pada tataran kehidupan individu maupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan keseimbangan dalam aspek pengetahuan, keterampilan serta nilai. Pengetahuan yang dipelajari siswa menyangkut berbagai hal seperti mengenai negara, konstitusi, lembaga negara; sejarah negara, dan lainnya. Keterampilan brehubungan dengan upaya mendorong kemampuan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik yang dapat dilakukan dengan pendekatan pembelajaran berpusat pada siswa sehingga memberikan kesempatan pada siswa untuk aktif dalam proses pembelajaran (McCowan, 2009). Dapat ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik, yakni warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab yang ditunjukkan dengan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bidang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk siswa menjadi warga negara yang baik dan demokratis (Schugurensky and Mayers, 2003). Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk menguatkan nilai demokrasi dan praktek demokrasi dalam kehidupan bernegara (Kennedy, 2019). Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan dapat mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang demokratis dan mampu berperan aktif dalam konteks kehidupan masyarakat, negara, dan dunia

2.1.3. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut McCowan (2009) dapat diselenggarakan dalam lingkup kecil yakni di sekolah maupun dalam konteks yang lebih luas yakni dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini gambaran perbedaan

aktivitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di dalam sekolah dan di luar sekolah atau dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.1 Perbedaan Aktivitas Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah dan di Masyarakat

Keterangan	Aktivitas	Struktur dan Hubungan
Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanasi atau menjelaskan materi - Investigasi - Diskusi - Simulasi - Dewan siswa 	Pedagogik Kurikulum tersembunyi (<i>hidden curriculum</i>) Membentuk semangat
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi politik - Kegiatan sukarela 	<ul style="list-style-type: none"> - Hierarki sosial - Struktur politik, dll

Sumber: McCowan, 2009.

Tabel di atas menunjukkan perbedaan kegiatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas dan di masyarakat. Pembelajaran kewarganegaraan di masyarakat menunjukkan pada keterlibatan secara aktif warga negara melalui partisipasi dalam politik maupun dalam kegiatan kemasyarakatan lainnya. Pembelajaran kewarganegaraan di kelas pada lingkungan sekolah dilakukan melalui berbagai kegiatan yang mendorong partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran seperti melalui diskusi, investigasi, simulasi, dan lainnya.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat menguatkan *Civic Knowledge* sebagai dasar bagi siswa untuk terlibat dalam kegiatan politik. Proses pembelajaran yang demokratis yaitu pembelajaran yang memberikan ruang terbuka terhadap berbagai nilai yang berbeda, diskusi, serta saling bertukar pendapat. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat diselenggarakan melalui berbagai kegiatan kesukarelaan yang berkenaan dengan materi yang dipelajari (Kennedy, 2019). Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu menggunakan beragam pendekatan pembelajaran.

Pendidikan Kewarganegaraan yang relevan dengan era globalisasi memerlukan transformasi pengajaran yakni pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sebelumnya hanya berkaitan dengan pembentukan tanggung jawab moral dan memahami hubungan saling terkait antar berbagai negara di dunia, menjadi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang

diorientasikan pada pembentukan pengetahuan, keterampilan dan perilaku kritis partisipatif sehingga dapat secara aktif menentang ketidaksetaraan, diskriminasi serta mengupayakan terwujudnya keadilan sosial (Chong, 2015). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu diselenggarakan dengan pendekatan *student center* sehingga siswa berpartisipasi aktif selama proses pembelajaran. Partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran menjadi bagian dari proses internalisasi nilai demokrasi seperti bebas menyampaikan pendapat, menghargai pendapat pihak lain, toleran terhadap perbedaan nilai, maupun pandangan hidup dan lainnya. pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga mempersiapkan siswa untuk aktif dalam mengatasi berbagai persoalan kolektif di tingkat lokal, nasional, dan global.

Upaya internalisasi nilai-nilai positif pada siswa dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan pembelajaran, salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran *value clarification* (McCowan, 2009). Pembelajaran *value clarification* membimbing siswa belajar untuk menerapkan nilai demokrasi yakni dengan tidak menghakimi atau menggagap salah setiap nilai yang dipandang tidak sejalan atau berbeda dengan nilai yang diyakini. Melalui pembelajaran *value clarification*, siswa belajar untuk mengkritisi nilai yang dianggap benar.

Materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menyangkut tiga komponen berikut ini: Tanggung jawab sosial dan moral; keterlibatan dalam komunitas; dan literasi politik (Crick dalam Lawton, 2000). Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan, meliputi: Dimensi pengetahuan yakni pengetahuan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan berbagai bentuk partisipasi politik; dimensi efektif meliputi nilai, sikap, dan watak kewarganegaraan; dan dimensi keterampilan yang meliputi keterampilan umum dan keterampilan untuk berpartisipasi (Godanay, 2012). Penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan perlu menggunakan pendekatan pembelajaran yang partisipatif yang mendorong siswa untuk memiliki pengetahuan, serta dibekali dengan sikap dan perilaku untuk aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial, budaya dan lainnya.

Dinamika kehidupan di era globalisasi berlangsung sangat cepat yang menimbulkan berbagai kontradiksi serta persoalan yang harus dihadapi oleh masyarakat dunia. Merespon kondisi tersebut, siswa perlu dibekali dengan

keterampilan menyelesaikan persoalan. Salah satu metode pembelajaran yang perlu digunakan Pendidikan Kewarganegaraan yakni pembelajaran berbasis masalah (PBL). Melalui metode ini, siswa dididik untuk mengidentifikasi persoalan yang muncul dengan adanya peningkatan penggunaan teknologi digital seperti *cyberbullying*, termasuk mengetahui dampaknya. Kemampuan mengidentifikasi persoalan yang dimiliki siswa, menjadi alat untuk menghindari tindakan yang termasuk dalam *cyberbullying*. Selain PBL, metode lain yang tepat untuk Pendidikan Kewarganegaraan digital yakni dengan pembelajaran berbasis proyek (*Project Base Learning*). Melalui pembelajaran ini, siswa dididik untuk secara sistematis mempelajari dan menganalisis kondisi tertentu untuk menghindari munculnya suatu persoalan (Davis, 2021). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan harus sejalan dengan nilai demokrasi yang diajarkan dalam materi Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menjadi dasar dalam proses pembelajaran, sehingga siswa menjadi subyek yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran.

2.2. Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Digital

2.2.1. Konsep Buku Teks Digital

Kemajuan teknologi telah mendorong perubahan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Salah satu komponen pendidikan yang mengalami perubahan yakni penggunaan sumber belajar yakni buku teks. Selama berabad-abad, buku teks cetak menjadi acuan utama dalam proses pembelajaran. Kemajuan teknologi terutama teknologi informasi, secara perlahan mulai menggantikan buku teks cetak menjadi teks digital. Penggunaan buku teks digital tidak hanya berkenaan dengan nilai kepraktisan, juga melengkapi keterbatasan yang terdapat pada buku teks cetak. Buku teks digital mengintegrasikan teks dan ilustrasi untuk pemahaman siswa sehingga dapat memudahkan pencapaian tujuan pembelajaran (Laspina, 2009). Buku teks digital merupakan bagian dari produk kemajuan teknologi yang digunakan dalam institusi pendidikan untuk menyesuaikan dengan karakteristik pengguna buku teks serta berupaya melengkapi kekurangan yang terdapat pada buku teks cetak.

Buku teks digital merupakan buku teks yang memanfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan memberikan kesempatan

pada siswa untuk mengatur belajar mereka secara mandiri (Sankey, 2005). Buku teks digital sebagai bagian dari sumber belajar digital, menurut OECD merupakan materi yang disajikan secara digital yang dilengkapi dengan gambar, video maupun animasi (OECD, 2009). Salah satu teknik penyajian materi pada buku teks yang memanfaatkan kemajuan teknologi dapat dilakukan dengan mencantumkan link yang di dalamnya terdapat beragam informasi yang relevan dengan pembelajaran dengan berbagai bentuk baik video, gambar, dan lainnya untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan siswa (Porter, 2004). Buku teks digital memudahkan siswa untuk mengakses buku teks kapanpun dan dimanapun. Buku teks digital juga memberikan kemudahan pada siswa untuk mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari dengan berbagai kemudahan teknologi seperti dengan menggunakan tautan atau link, dan lainnya.

Buku teks digital merupakan buku teks yang disajikan dengan menggunakan *software* sehingga pembaca dapat mengakses dan membaca teks melalui komputer atau smartphone (Amirian, 2004). Karakteristik yang membedakan buku teks cetak dengan buku teks digital yakni buku teks digital bersifat "*hypertext*" artinya bahwa untuk memahami materi, siswa dapat mengakses materi yang lebih besar melalui link yang menghubungkan dengan informasi yang lebih luas. Hal ini tidak ditemukan pada buku teks konvensional, karena siswa harus secara runtut membaca materi yang disajikan dan cakupan materi yang terbatas hanya pada apa yang disajikan dalam buku teks (Hyden, 2002). Buku teks digital memfasilitasi siswa untuk secara mudah dapat mengakses beragam pengetahuan atau informasi yang terkait dengan materi yang dipelajari.

Pengembangan buku teks digital perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini, yaitu: menggunakan kata-kata secara efisien dengan bahasa yang inklusif, yakni buku teks digital tidak menyajikan narasi yang sangat panjang, deskripsi teks ditunjang dengan gambar yang melengkapi penjelasan kata; penyajian buku teks digital melibatkan siswa secara interaktif; penyajian gambar pada buku teks dikaitkan dengan materi sehingga siswa dengan mudah membangun pemahaman karena materi dilengkapi penjelasan berupa gambar; menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang mengoptimalkan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran; pembelajaran berpusat pada siswa (*students center*); penggunaan

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

animasi dalam buku teks digital disarankan untuk menggunakan bahasa lisan serta tulis; materi yang dikembangkan berjenjang dari sederhana ke tahap yang lebih kompleks (Sankey, 2005). Buku teks digital merupakan sumber belajar berbasis digital yang dapat digunakan oleh siswa secara mandiri dan tidak terbatas baik dalam penggunaannya maupun dalam mengakses informasi yang berkenaan dengan materi yang dipelajari.

Perbedaan buku teks digital dapat diidentifikasi ke dalam dua jenis yakni model buku teks digital berbasis PDF dan model *ebook* berbasis “*browser*”. Model *ebook* berbasis PDF yakni menyajikan konten buku teks dalam file PDF. Pengguna buku teks dalam bentuk PDF tidak dapat melakukan edit, penjelasan atau menambahkan video atau audio dengan mudah; sedangkan model *ebook browser* merupakan buku teks digital yang menggunakan HTML atau XML untuk menunjukkan bagian yang berbeda dari struktur teks seperti halaman web (Visel 2003 dalam Adell & Barnabe, 2006, Regueira & Rodríguez, 2015). Buku teks digital merupakan buku teks yang menyajikan konten buku secara elektronik (Regueira & Rodríguez, 2015). Buku teks digital memiliki beberapa kelebihan antara lain sesuai dengan karakter siswa sebagai generasi yang hidup pada abad 21; membantu guru dan siswa mengelola waktu dengan baik karena buku dapat di akses kapanpun dan dimanapun; membantu guru untuk menyelenggarakan pembelajaran dengan baik karena disesuaikan dengan kebutuhan kelas dan siswa; buku teks digital tidak membutuhkan biaya yang tinggi; buku teks digital tidak membebani siswa secara fisik sehingga menjaga kesehatan siswa karena tidak membawa beban terlalu banyak pada tas sekolah mereka; melindungi lingkungan karena mengurangi penggunaan kertas yang bahan bakunya bersumber dari pohon (Mardis dkk dalam Regueira & Rodríguez, 2015). Penggunaan buku teks memberikan berbagai dampak positif yang menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Penggunaan buku teks digital dapat dirasakan manfaatnya oleh guru, siswa, maupun pada kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan buku teks digital perlu memperoleh dukungan kultural melalui respon positif penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, serta dukungan struktural berkaitan dengan kebijakan yang memfasilitasi produksi buku teks digital dalam pendidikan serta akses penggunaan buku teks digital.

2.2.2. Landasan Teori Pengembangan Buku Teks Digital

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi dinamika penyelenggaraan pendidikan. Tingkat penggunaan teknologi informasi oleh masyarakat dunia yang tinggi, membuka kesempatan dunia pendidikan untuk memanfaatkan teknologi digital termasuk *smartphone* dalam proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi digital sangat menunjang pembelajaran, dan memfasilitasi siswa untuk belajar dengan beragam kondisi. Teknologi digital sangat dirasakan kemanfaatannya ketika dunia diharapkan pada Virus Covid 19, meskipun sekolah tidak lagi melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung (tatap muka), siswa tetap dapat belajar dengan memanfaatkan teknologi digital.

Pengembangan buku teks Pendidikan Kewarganegaraan digital perlu disesuaikan dengan realitas kehidupan masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan baik personal maupun sosial. Choi (2016) menyatakan bahwa:

“Citizenship in the Internet era can be referred to as digital citizenship, including abilities, thinking, and action regarding Internet use, which allows people to understand, navigate, engage in, and transform self, community, society, and the world.”

Konsep kewarganegaraan di era digital digambarkan dengan warga negara yang memiliki kemampuan, pemikiran dan tindakan dalam menggunakan internet yang memungkinkan seseorang untuk memahami, mengarahkan, serta menjadi bagian dalam perubahan yang berpengaruh pada diri sendiri, komunitas, dan dunia (Choi, 2016). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk membentuk kompetensi warga negara di era digital sebagaimana dikemukakan oleh Choi, yakni warga negara yang mampu berfikir dan bertindak secara bijak dalam menggunakan teknologi digital termasuk bertindak untuk mendorong perubahan yang lebih baik ditingkat personal maupun sosial.

Siswa sebagai warga negara hipotetik perlu memiliki karakter warga negara yang sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, termasuk berkaitan dengan bagaimana menjalankan hak dan kewajiban warga negara di era digital. Landasan teori pengembangan buku teks digital Pendidikan Kewarganegaraan ini berkaitan

erat dengan pendapat Ribble & Baley (2007), terdapat sembilan elemen kewarganegaraan digital, yakni:

Digital access atau peluang yang luas bagi setiap orang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi; *digital commers* atau kemampuan dalam melakukan aktivitas ekonomi; *digital communication* atau kemampuan warga negara untuk melakukan komunikasi atau bertukar informasi; *digital literacy* atau kemampuan memperoleh informasi dan pengetahuan melalui teknologi digital; *digital etiquette* atau etika dalam menggunakan teknologi digital; *digital law* atau penggunaan teknologi digital sesuai ketentuan hukum; *digital rights and responsibility* pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai pengguna teknologi digital; *digital health and wellness* atau kemampuan menggunakan teknologi secara sehat dan memberikan kebaikan bagi dirinya dan orang lain; *digital security* atau kemampuan warga negara dan siswa sebagai pengguna teknologi dan calon warga negara dewasa untuk mampu melindungi data pribadi yang digunakan manakala menggunakan teknologi digital.

Pemaparan Ribble & Baley mengenai indikator warga negara digital tersebut, menegaskan bahwa kemajuan teknologi informasi telah membuka peluang yang sangat luas bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi baik pada konteks lokal, regional, maupun global. Untuk mengoptimalkan partisipasi warga negara baik secara personal maupun kolektif, maka perlu ditunjang dengan berbagai kemampuan berbasis teknologi di semua aspek kehidupan yakni kemampuan mengakses informasi; terlibat secara efektif dalam aktivitas ekonomi berbasis digital; mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak secara langsung atau dengan memanfaatkan berbagai media komunikasi digital; mampu memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mengakses berbagai informasi yang diperlukan secara efektif; menggunakan teknologi informasi termasuk media sosial secara beretika; mampu untuk memanfaatkan teknologi informasi secara tepat, efektif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; memahami dengan banar hak dan kewajibannya sebagai warga digital sehingga tidak membatasi, atau merampas hak orang lain; mampu memanfaatkan teknologi sesuai kebutuhan, selektif, tidak berlebihan yang akan mengganggu kesehatan fisik maupun mental; dan warga negara di era digital perlu memiliki pemahaman yang tepat mengenai keamanan data pribadi sehingga tidak berpotensi menjadi korban penyalahgunaan atau pencurian data berbasis digital.

Era digital membuka kesempatan interaksi dan komunikasi tanpa batas. Oleh karena itu, siswa harus dibekali dengan keterampilan memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan partisipasi mereka dalam berbagai bidang kehidupan. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memanfaatkan teknologi digital membekali siswa dengan kemampuan belajar, melakukan interaksi sosial secara digital, mengeksplorasi beragam identitas dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan partisipasi warga negara secara digital. Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Isman & Gungoren bahwa pada era digital, siswa perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan berkenaan dengan internet dan akses terhadap teknologi sehingga dapat menjadi warga digital yang partisipatif (Isman & Gungoren, 2014). Pendidikan Kewarganegaraan perlu diselaraskan dengan dinamika perubahan jaman. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan perlu diarahkan untuk membentuk siswa menjadi warga negara digital, yakni warga negara yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan diri serta untuk kemajuan masyarakat.

Partisipasi warga negara pada era digital semakin luas karena ditopang oleh kemajuan teknologi informasi. Diperlukan kecakapan untuk menggunakan teknologi informasi sebagai sarana partisipasi warga negara yang demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan digital mendidik siswa memiliki pengetahuan, keterampilan dan disposisi dalam menggunakan teknologi digital (James, dkk, 2019). Siswa sebagai generasi yang lekat dengan teknologi informasi dan komunikasi perlu memperoleh pengalaman belajar yang sejalan dengan kehidupan mereka, yakni proses belajar yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital. Salah satu bentuk pengalaman belajar yang memanfaatkan teknologi digital yakni dengan penggunaan sumber belajar dan media pembelajaran yakni buku teks Pendidikan Kewarganegaraan digital. Penggunaan buku teks digital sejalan dengan karakteristik generasi Z sehingga di harapkan dapat lebih menunjang capaian pembelajaran.

2.2.3. Buku Teks Digital dan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu Mata Pelajaran yang wajib diajarkan disemua jenjang pendidikan sebagaimana diatur Pasal. 37 Ayat (1),

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu mengikuti perkembangan teknologi, sebagaimana menjadi salah satu pertimbangan penyusunan kurikulum yang dinyatakan pada Pasal 36 ayat (3), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, bahwa dalam menyusun kurikulum yang akan diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan salah satu aspek yang diperhatikan yakni perkembangan teknologi. Dengan karakteristik peserta didik saat ini yang secara demografis dikategorikan sebagai generasi Z, dengan karakteristik yang terkait erat dengan teknologi, maka pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang memanfaatkan teknologi digital sangat relevan baik dengan kurikulum maupun dinamika jaman.

Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran disebut sebagai “*digital learning resources* (DLRs)”, yakni semua sumber belajar termasuk buku teks yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi digital sehingga tampak jelas perbedaan antara sumber belajar tradisional dengan sumber belajar yang berbasis digital seperti visual, interaktif, menyajikan banyak cerita yang berkaitan dengan materi, dan lainnya (OECD, 2009). Penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran diharapkan dapat meningkatkan capaian pembelajaran maupun motivasi belajar siswa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ho Jung dkk, menunjukkan bahwa penggunaan buku teks digital pada siswa yang diteliti telah meningkatkan motivasi belajar siswa (Ho Jung, dkk, 2015). Penggunaan buku teks digital merupakan bagian dari pembelajaran yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk memudahkan siswa mengakses materi pembelajaran kapan saja dan dimana saja tidak terbatas ruang dan waktu, sehingga diharapkan dapat meningkatkan capaian pembelajaran maupun motivasi belajar siswa. Buku teks digital berbeda dengan buku teks konvensional atau buku teks cetak. Buku teks digital memudahkan pengguna mengatur ukuran tulisan, mengakses informasi yang berkaitan dengan materi yang dipelajari (*hyperlink*), dan dapat disimpan di komputer atau perangkat lain seperti *smartphone* sehingga dapat diakses kapan saja (Pace, dalam Covalchick & Kara, 2004).

Penggunaan teknologi informasi dalam proses pembelajaran akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ally dalam Anderson (2008), bahwa pembelajaran *online* yang diterapkan pada satu masyarakat dengan masyarakat lainnya beragam karena dipengaruhi oleh perbedaan budaya, gaya belajar maupun motivasi belajar. Di era digital saat ini proses pembelajaran yang ditunjang dengan penggunaan teknologi digital sangat relevan dengan dinamika zaman dan karakteristik generasi Z yang selalu terkait dengan gadget.

Pendidikan Kewarganegaraan digital bertujuan untuk membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku siswa sehingga menjadi warga negara yang cerdas, bijak, terbuka terhadap perbedaan perspektif maupun pemikiran serta aktif dalam kegiatan masyarakat (Davis, 2021). Pendidikan Kewarganegaraan digital diharapkan dapat menunjang pembentukan kecerdasan digital siswa sebagai calon warga negara. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa digitalisasi teknologi dalam pendidikan merupakan suatu keniscayaan yang memiliki peran penting dalam menunjang pencapaian tujuan pembelajaran. Penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi digital merupakan bagian dari adaptasi terhadap dinamika kehidupan global yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan warga negara.

2.3. Kesetaraan Gender

2.3.1. Konsep Gender

Gender merupakan suatu konsep yang berkenaan dengan peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan sebagai produk sosial. Gender merupakan konsep yang berkaitan dengan perbedaan peran laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari proses sejarah (Smith, 1999). Sejarah menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki menempati peran yang berbeda. Laki-laki selalu berperan dalam berbagai kegiatan publik seperti pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Sementara perempuan hampir selalu menempati peran domestik sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

Gender merupakan suatu kondisi yang memposisikan laki-laki dan perempuan secara *vis a vis* yang sering kali bersifat hierarkhis. Gender merupakan

suatu bentukan budaya melalui bahasa yang digunakan dalam berbagai interaksi sosial. Bahasa memiliki kekuatan dalam membentuk relasi gender yang tidak setara atau sebaliknya. Melalui dekonstruksi yang mempertanyakan posisi laki-laki dan perempuan secara berhadap-hadapan tanpa ada peluang untuk pandangan alternatif yang memungkinkan untuk mewujudkan relasi gender yang lebih adil dan setara (Davies, 2010). Bahasa baik bahasa lisan maupun tulisan memiliki peran besar dalam memelihara peran gender yang diskriminatif atau sebaliknya. Bahasa juga memiliki peran transformatif dalam mewujudkan peran gender yang lebih setara.

Gender merupakan suatu konstruksi sosial yang dapat dirubah. Gender sebagai suatu bentukan sosial berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam hal peran, hak, tanggung jawab yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan. Pengaturan mengenai perbedaan peran, hak, tanggung jawab bersifat fleksibel, artinya selalu dapat dirubah sepanjang waktu (USAID, 2015). Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, diharapkan dapat terwujud kesetaraan gender sehingga setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran yang sama dalam memberikan kontribusi terbaik disemua aspek kehidupan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, menyebutkan bahwa kesetaraan gender adalah suatu kondisi dimana baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan turut berpartisipasi sebagai warga negara diberbagai bidang kehidupan termasuk kesamaan hak untuk merasakan dan memperoleh manfaat dari hasil pembangunan.

Gender merupakan suatu konsep yang tidak dapat dimaknai secara tunggal, karena konsep gender memiliki banyak dimensi dan sangat terkait erat dengan pembagian struktur sosial yang ada di masyarakat baik berkenaan dengan kelas, ras, etnisitas, serta tidak dapat dilepaskan dari berbagai pihak yang berperan dalam mengupayakan perubahan berdasarkan nilai kebebasan masing-masing (Aikman & Rao, 2012). Mewujudkan kesetaraan gender menjadi tanggung jawab semua pihak terutama yang memiliki sumber daya kekuasaan untuk bersama-sama mewujudkan kehidupan yang setara atas dasar gender.

Gender berkaitan dengan perbedaan peran, tugas, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial. Gender sebagai fenomena sosial budaya diartikan sebagai dampak sosial yang muncul dalam suatu masyarakat karena adanya perbedaan jenis kelamin (Febriasih dkk, 2008). Gender juga dimaknai sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural (Fakih, 2008). Gender berbeda dengan jenis kelamin (*sex*), perbedaan gender berkaitan dengan perbedaan laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial kultural, sedangkan perbedaan jenis kelamin (*sex*) merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan biologis yang alamiah.

Terdapat empat elemen yang saling terkait dengan konstruksi gender yakni: Simbol budaya yang mengandung representasi yang beragam; norma yang menentukan makna suatu simbol seperti feminin, maskulin, dll; relasi antar laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan seperti dalam institusi sosial, pekerjaan, pendidikan, dan lainnya; dan identitas personal (Scott, 1986). Dapat dipahami bahwa konsep gender berkaitan dengan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil suatu proses konstruksi sosial yang terjadi dalam relasi sosial. Konsep gender merupakan bentukan masyarakat yang tidak lepas dari aspek budaya yang hidup di masyarakat..

2.3.2. Konsep Kesetaraan Gender

Memaknai konsep kesetaraan gender dapat menggunakan berbagai perspektif. Kesetaraan gender merupakan kesetaraan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki dan untuk memperoleh hak asasi yang melekat pada laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat memberikan kontribusi serta memberikan kemanfaatan di berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya (USAID, 2008). Melalui kesetaraan gender, setiap orang baik laki-laki maupun perempuan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi terbaik bagi dunia.

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender. Terdapat empat dimensi kesetaraan gender dalam pendidikan,

yaitu: *Pertama*, Kesetaraan akses pendidikan, dimensi ini berkaitan dengan kesetaraan kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan; *kedua*, Kesetaraan dalam proses pembelajaran, dimensi ini berkaitan dengan perlakuan yang sama dan setara bagi laki-laki dan perempuan selama proses pembelajaran. Selama proses pembelajaran, peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang bebas dari diskriminasi maupun stereotip gender baik pada penggunaan metode pembelajaran, media maupun sumber belajar, termasuk buku teks sebagai sumber belajar tidak mengandung stereotip gender; *ketiga*, Kesetaraan hasil atau capaian pendidikan, dimensi ini berkaitan dengan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hasil dari pendidikan yang telah dijalani sesuai dengan potensi masing-masing serta usaha yang telah dilakukan; *keempat*, Kesetaraan atas hasil eksternal, dimensi ini berkaitan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengakses berbagai barang dan sumber daya yang diperlukan, serta kesetaraan dalam memberikan kontribusi serta berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial, budaya (Subrahmanian dalam USAID, 2008). Berdasarkan pendapat tersebut, dipahami bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan berkaitan dengan kesetaraan kesempatan (bersifat kuantitatif) bagi laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, penyelenggaraan atau proses pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender, serta manfaat yang diperoleh siswa dan siswi atas output dari proses pembelajaran yang telah diikuti.

Kesetaraan gender dilihat dari perspektif kewarganegaraan tidak hanya dipahami sebagai suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan laki-laki dan perempuan sebagai warga negara perlu dimaknai secara substantif yakni disesuaikan dengan kondisi maupun kapasitas laki-laki maupun perempuan (Pateman, 1992). Kesetaraan gender merupakan suatu konsep yang tidak sederhana, memaknai kesetaraan gender tidak sekedar persamaan dalam semua hal antara laki-laki dan perempuan atau sebaliknya. Kesetaraan gender dimaknai sebagai perlakuan yang berbeda terhadap laki-laki dan perempuan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing (Freser dalam Goodman & Martin, 2002). Kesetaraan gender berkaitan dengan persamaan laki-laki dan

perempuan dengan memperhatikan berbagai aspek baik mengenai kapasitas, kebutuhan, kondisi, dan lainnya.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan untuk mewujudkan kesetaraan gender, antara lain: Prinsip mencegah kemiskinan, merupakan salah satu prinsip yang dapat mewujudkan kesetaraan perempuan maupun laki-laki dengan membebaskan mereka dari kemiskinan. Salah satu penyebab ketidakadilan gender yakni akses sumber daya ekonomi yang tidak sama antara perempuan dan laki-laki. Perempuan secara ekonomi tergantung pada laki-laki, sehingga menciptakan relasi yang tidak setara. Penerapan prinsip ini, dapat membangun relasi gender yang setara; prinsip anti eksploitasi yakni kesetaraan akan terwujud ketika setiap orang baik laki-laki maupun perempuan bebas dari eksploitasi, baik eksploitasi yang terjadi di ranah privat yakni dalam keluarga, maupun eksploitasi di ranah publik seperti eksploitasi pada industri, antara pemilik modal dan pekerja/buruh, maupun eksploitasi dalam kaitannya dengan relasi warga negara dan negara atau aparat negara; prinsip kesetaraan, yakni laki-laki dan perempuan harus diperlakukan secara setara berkaitan dengan gaji, waktu senggang, dan lainnya; prinsip anti marginalisasi, yakni setiap orang baik laki-laki maupun perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan tanpa ada pihak yang dikesampingkan baik secara kultural maupun atas dasar kebijakan; prinsip *antiandrosentrisme*, yakni kesetaraan gender dapat terwujud manakala norma gender yang diterapkan menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara, bukan norma gender yang memposisikan laki-laki sebagai pusat yang mengesampingkan eksistensi perempuan (Freser dalam Goodman & Martin, 2002). Pendapat di atas menegaskan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender diperlukan pendekatan sistematis yang melibatkan peran pemerintah selaku pembuat kebijakan yang didukung oleh *stakeholders* untuk menjamin dan mengupayakan pemahaman hak perempuan dan laki-laki melalui akses yang setara pada kegiatan ekonomi termasuk kesetaraan upah atas beban kerja yang sama, menjamin perlakuan yang sama tanpa diskriminasi gender.

Kehidupan yang menjunjung kesetaraan gender merupakan gambaran dari pemenuhan hak asasi manusia dan penerapan kehidupan demokrasi yang menjadi dasar terciptanya kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif yang menguatkan

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

kohesi sosial (UNESCO, 2010). Kesetaraan gender tidak hanya berkaitan perlakuan yang setara antara laki-laki dan perempuan, kesetaraan gender juga berkaitan dengan persamaan kesempatan untuk mengakses beragam sumber daya untuk pengembangan diri dan perannya sebagai bagian dari masyarakat.

2.3.3. Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender. Realitas kehidupan masyarakat yang masih menunjukkan berbagai bentuk persoalan yang bermuara pada ketidakadilan gender menuntut institusi pendidikan untuk dapat menjadi agen sosial yang mendorong transformasi dalam menciptakan kehidupan yang menjamin relasi gender yang setara. Kesetaraan gender dalam pendidikan akan memberikan pengaruh pada berbagai bidang kehidupan baik sosial ekonomi, politik, dan lainnya (UNESCO, 2003). Setiap anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai sesama manusia. Pendidikan berkewajiban untuk memenuhi hak siswa dan siswi untuk memperoleh pengalaman belajar yang sama sehingga dapat mengembangkan potensi masing-masing dan memperoleh hasil pembelajaran yang optimal dalam rangka mempersiapkan diri menjadi warga masyarakat yang aktif berpartisipasi di berbagai bidang kehidupan.

Kesetaraan gender dalam pendidikan dimaknai sebagai kesetaraan akses laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan atau bersekolah; kesetaraan dalam proses pembelajaran dan pengalaman belajar; serta kesetaraan dalam pencapaian hasil pembelajaran serta kesetaraan untuk memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat di berbagai bidang, (Colclough, 2004). Untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, diperlukan adanya jaminan akses pendidikan yang setara bagi perempuan dan laki-laki yang didukung kebijakan yang menjamin kesetaraan gender serta kurikulum yang responsif gender (Connell, 2010). Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat terwujud ketika beberapa aspek yang saling melengkapi dan terkait terpenuhi antara lain berkaitan dengan menjamin kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mengikuti pendidikan, kurikulum yang berperspektif gender, proses pembelajaran yang menjamin kesetaraan gender termasuk dalam hal penggunaan metode, media

dan sumber belajar yang adil gender, serta *output* pendidikan yang sama sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kapasitas untuk aktif berpartisipasi di semua aspek kehidupan.

Kesetaraan gender dalam pendidikan yaitu kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama dalam memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri sehingga dapat memberikan kontribusi untuk kehidupan yang lebih baik. Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat terwujud ketika kebijakan pendidikan serta institusi pendidikan memberikan perhatian terhadap upaya mewujudkan kesetaraan gender dengan tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk diskriminasi, stereotip, maupun marginalisasi atas dasar gender dalam penyelenggaraan pendidikan. Institusi pendidikan memiliki peran penting untuk mewujudkan kesetaraan gender yakni dengan memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan yang mendorong nilai, keyakinan, sikap maupun perilaku yang berkeadilan gender (UNESCO, 2013). Komitmen pembuat kebijakan menjadi salah satu kunci utama optimalisasi institusi pendidikan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Kebijakan pendidikan yang responsif gender akan menjamin penyelenggaraan pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender serta meminimalisir berbagai bentuk persoalan yang bermuara pada ketimpangan gender seperti diskriminasi, stereotip, maupun kekerasan berbasis gender di lingkungan pendidikan.

Pendidikan sebagai sarana mengembangkan potensi peserta didik dalam penyelenggarannya perlu menjunjung tinggi nilai demokrasi sehingga dapat memposisikan siswa sebagai subyek yang memiliki harkat dan derajat yang sama. Pendidikan yang berkeadilan gender tercermin dalam proses pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama pada siswa dan siswi untuk berpartisipasi secara aktif tanpa ada perlakuan diskriminatif (Tilaar, 2012). Gambaran penyelenggaraan pendidikan yang menjunjung kesetaraan gender, yaitu: Kesetaraan kesempatan, pendidikan harus memberikan kesetaraan kesempatan pada laki-laki dan perempuan meskipun latar belakang siswa beragam namun dapat menghasilkan *output* pendidikan yang sama; kesetaraan pendidikan dipahami sebagai kemampuan sekolah dalam menghasilkan *output* yang kurang lebih sama diantara peserta didik yang memiliki keberagaman latar belakang; kesetaraan dalam

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

pendidikan dimaknai sebagai peran penting negara dan sekolah untuk aktif dalam menjamin *output* pendidikan yang setara meskipun berasal dari beragam latar (Smith, 2003). Pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan aspek kesetaraan gender sehingga pendidikan menjadi wahana transformatif nilai keadilan gender. Dengan kata lain, pendidikan harus berorientasi pada upaya mewujudkan keadilan gender (Jatiningsih, 2017). Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting sebagai wahana transformasi yang mendorong kehidupan yang setara.

Pendidikan untuk anak laki-laki dan anak perempuan pada masa lalu memiliki orientasi yang berbeda. Bagi anak laki-laki pendidikan diorientasikan untuk mempersiapkan mereka memasuki dunia kerja dan untuk menjadi warga negara yang aktif. Pendidikan bagi anak perempuan difokuskan pada mempersiapkan mereka sebagai istri dan ibu, potensi intelektual yang dimiliki perempuan cenderung diabaikan, juga partisipasi perempuan di berbagai bidang kehidupan termasuk dalam dunia kerja (Paechter, 2018). Beragam persoalan ketidakadilan gender perlu mendapatkan perhatian dari dunia pendidikan. Ketidakadilan atau diskriminasi gender dalam pendidikan dapat diketahui melalui beberapa gambaran berikut ini: penyelenggaraan pendidikan yang ditopang oleh relasi gender yang tidak setara yang tercermin dalam pembedaan serta pembatasan hak asasi dan kebebasan siswa dan siswi. Ketidaksetaraan relasi terkait dengan pengaruh interaksi siswa dengan berbagai unsur pendidikan seperti interaksi antara siswa dengan guru yang merupakan *rule model* bagi siswa dengan sistem nilai yang diyakini termasuk nilai ideal mengenai relasi laki-laki dan perempuan. Pada masyarakat yang masih menganut sistem patriarkhi, sistem nilai mempengaruhi nilai dianut oleh guru sebagai bagian dari masyarakat. Selain guru, sumber belajar termasuk buku ajar memiliki pengaruh dalam menegaskan atau menentang diskriminasi gender. Buku sebagai produk budaya tidak terlepas dari sistem nilai yang dimiliki oleh penyusunnya. Sistem patriarkhi yang masih melekat dalam masyarakat akan mempengaruhi nilai yang ditransmisi dalam buku teks baik pada materi maupun gambar. Unsur lain yang menegaskan relasi gender yang tidak setara seperti budaya sekolah, aturan sekolah, dan lainnya (Wuri, 2018). Pendidikan perlu memiliki

pemahaman mengenai ketidakadilan gender sebagai suatu persoalan yang memiliki efek domino dan sangat mempengaruhi seluruh bidang kehidupan.

Relasi laki-laki dan perempuan yang tidak setara dalam konteks kehidupan personal maupun sosial dipengaruhi oleh faktor penguasaan terhadap sumber daya atau berkaitan dengan aspek ekonomi. Menurut teori stratifikasi gender, stratifikasi gender salah satunya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi. Ketidakadilan gender yang memposisikan perempuan sebagai warga negara kelas dua disebabkan karena perempuan memiliki ketergantungan ekonomi. Perempuan yang memiliki peran dalam bidang ekonomi relatif memiliki kekuasaan dan memiliki posisi sosial yang cukup strategis (Blumberg, 1984). Melalui teori stratifikasi gender yang dikemukakan Blumberg tersebut, dipahami bahwa salah satu sumber ketidakadilan gender yakni perbedaan akses terhadap sumber daya ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki memiliki akses yang sangat luas dalam memanfaatkan dan mengeksploitasi berbagai sumber daya ekonomi, sedangkan perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi sehingga perempuan tergantung atau *dependent* secara ekonomi pada laki-laki. Kondisi ini menimbulkan relasi gender yang tidak setara.

Terdapat tiga teori untuk memahami ketidakadilan gender, yakni: *Pertama*, teori hubungan produksi dan properti, ketidakadilan gender terjadi karena ketidaksetaraan kepemilikan materi. Teori ini dilandasi pemikiran Marxisme, yakni ketidakadilan bersumber dari kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi. Kesetaraan gender dapat terwujud ketika sumber daya baik akses maupun kendali atas sumber daya dikuasai oleh laki-laki dan perempuan secara setara; *kedua*, struktur keluarga dan rumah tangga, ketidakadilan gender berasal dari struktur keluarga dan rumah tangga yang menempatkan perempuan sebagai penanggungjawab pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak. Perempuan tidak melakukan kegiatan yang menghasilkan uang sehingga perempuan secara finansial tergantung pada laki-laki. Untuk menghilangkan ketidakadilan gender, maka perlu adanya pembagian peran dalam rumah tangga secara setara antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dapat diwujudkan ketika perempuan memiliki peran yang sama penting baik di rumah maupun dalam kehidupan masyarakat; *ketiga*, aturan sosial, terutama berkaitan dengan pekerjaan. Menurut feminis, ketidakadilan

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

gender terjadi karena peran perempuan sebagai penanggung jawab utama pekerjaan rumah dan pengasuhan anak. Meskipun perempuan terlibat dalam pekerjaan formal, perempuan tetap menjadi penanggung jawab pekerjaan rumah sehingga perempuan berada pada posisi inferior dibanding laki-laki baik dalam penghasilan maupun capaian karir. Untuk menciptakan kesetaraan gender maka pemisahan pekerjaan berdasarkan jenis kelamin perlu dihapuskan (Agassi, 1989).

Pendidikan secara historis memiliki peran penting dalam mengkonstruksi relasi antara masyarakat dengan identitas seseorang mengenai berbagai atribut baik ras, kelas, maupun gender. Pendidikan juga memiliki peran besar dalam mendorong perubahan dengan menghapus beragam batasan sosial yang sengaja diciptakan (Goodman & Martin, 2002). Upaya mengkonstruksi kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dilakukan antara lain melalui penggunaan cerita yang tidak bersifat seksis, *critical reading*, melibatkan guru dalam workshop yang membahas mengenai gender dan kesetaraan gender, membuka ruang diskusi baik yang membahas ketidakadilan gender atau upaya mewujudkan kesetaraan dengan memahami maskulinitas, serta lainnya (Francis, 1999, 2000 dalam Arnot, 2006). Kesetaraan gender dalam pendidikan sangat ditentukan oleh input yang menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Pendidikan yang menjamin kesetaraan gender harus ditopang oleh beberapa *input* pendidikan, yakni: Kebijakan pemerintah yang berperspektif kesetaraan gender, aturan sekolah yang menjamin kesetaraan gender, kurikulum serta bahan ajar yang memperhatikan aspek kesetaraan gender serta guru yang memiliki nilai dan pemahaman akan kesetaraan gender (UNESCO, 2019). Diperlukan sinergi antar berbagai pihak yang bersinggungan dengan pendidikan baik pada tingkat pembuat kebijakan, penyusun kurikulum, pelaksana pendidikan ditingkatan sekolah, termasuk kepala sekolah dan guru yang perlu memiliki perspektif gender.

Terdapat empat pendekatan untuk memahami kesetaraan gender dalam pendidikan, yakni: *Pertama*, pendekatan modal manusia, dalam pendekatan ini, kesetaraan gender dimaknai sebagai kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam mengakses pendidikan, berpartisipasi dan memperoleh pendidikan yang berkualitas sehingga mereka dapat menjadi individu yang mampu mengambil bagian dalam

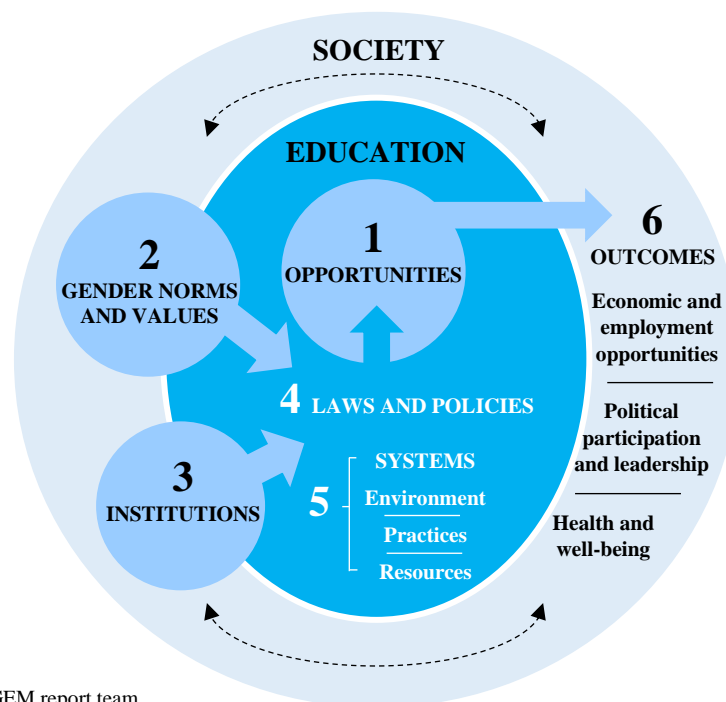
berbagai bidang kehidupan termasuk dalam ekonomi; *kedua*, pendekatan hak asasi manusia dan kekuasaan, berdasarkan pendekatan ini, kesetaraan gender dalam pendidikan dilakukan dengan berupaya melakukan restrukturisasi relasi yang tidak setara dan timpang yang tercermin dalam sejarah masa lalu, maupun dalam berbagai kebijakan serta praktek kelembagaan yang memposisikan perempuan secara subordinat; *ketiga*, pendekatan kritik setelah jaman kolonial yakni pendekatan untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui penghargaan terhadap beragam perbedaan yang ditemui dalam realitas pendidikan baik berkenaan dengan bahasa, pengetahuan, dan lainnya; *keempat*, pendekatan pembangunan sebagai suatu tindakan sosial yang berupaya mewujudkan pemberdayaan, kesetaraan gender dalam pendidikan dimaknai sebagai kebebasan yang dimiliki oleh seseorang untuk memperoleh keadilan dan mendorong kehidupan yang adil bagi semua orang (Aikman, dkk, 2011). Mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan memerlukan dukungan dari pembuat kebijakan. Terdapat empat alternatif dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang berperspektif gender yakni pendekatan modal manusia yang fokus pada pengembangan potensi personal yang dimiliki laki-laki dan perempuan; pendekatan hak asasi manusia dan kekuasaan, pendekatan ini berupaya melakukan rekonstruksi terhadap relasi gender yang timpang sebagai suatu hasil proses sejarah, ketimpangan relasi gender tersebut harus diperbaiki mengingat setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak asasi yang sama. Pendekatan lainnya yakni pendekatan kritis, pendekatan ini berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan mempertanyakan atau mengkritisi berbagai realitas yang mengandung ketimpangan gender baik berkenaan dengan pengetahuan yang dianggap sebagai suatu kebenaran yang mutlak, bahasa sebagai simbol yang merupakan hasil konstruksi, dan lainnya. Pendekatan pembangunan, yakni tindakan pemerintah yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender dengan menjamin pemenuhan kebebasan setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh haknya dan untuk memperoleh kehidupan yang adil.

Pendekatan lain untuk memahami kesetaraan gender dan pendidikan, yaitu: *Pertama*, kesetaraan gender dimaknai sebagai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan secara kuantitas dan kualitas; *kedua*, kesetaraan gender berkaitan

dengan kekuasaan dan relasi yang tidak setara secara struktural antara laki-laki dan perempuan; *ketiga*, kesetaraan gender berkenaan dengan upaya menciptakan kondisi dan proses yang memungkinkan seseorang secara kritis mengkaji proses pendidikan dan menentukan tindakan yang tepat berkaitan dengan pemenuhan kepentingan masing-masing; kesetaraan gender dalam pendidikan dipandang sebagai suatu yang bersifat multidimensional, untuk mewujudkan kesetaraan gender diperlukan keterlibatan berbagai institusi yang bersinggungan dengan pendidikan, guru yang memiliki perspektif gender, sumber belajar, bahan ajar yang memperhatikan kesetaraan gender, serta aspek di luar lingkungan pendidikan seperti keluarga, lingkungan sosial, dan lainnya (Unterhalter, 2012). Menurut Aikman & Rao, diantara empat pendekatan tersebut, pendekatan yang tepat untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan yakni pendekatan pembangunan, karena pendekatan modal manusia dan pendekatan hak asasi manusia dipandang mengesampingkan konteks sosial ekonomi dimana siswa itu berada. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas yang memperhatikan kesetaraan gender diperlukan dukungan dari berbagai aspek yakni keluarga, masyarakat, kebijakan pemerintah, kebijakan sekolah, lingkungan sekolah, serta proses belajar mengajar yang dilandasi oleh perspektif kesetaraan gender (Aikman & Rao, 2012). Selain pendekatan pembangunan, menurut peneliti, pendekatan kritis penting untuk digunakan dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, melalui pendekatan kritis, dapat dilakukan rekonstruksi pendidikan yang sejalan dengan nilai kesetaraan gender, selain itu berbagai kebijakan maupun praktik yang tidak sejalan atau bertentangan dengan nilai kesetaraan gender dapat dirubah dan dihilangkan.

Untuk mewujudkan kesetaraan gender diperlukan dua pendekatan berikut ini, yakni: pengarusutamaan gender di berbagai berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan; selain itu diperlukan pembaruan terhadap jaminan hak asasi perempuan (Skjeie, 2005). Pendapat Skjeie tersebut menegaskan bahwa untuk mewujudkan kesetaraan gender, salah satu pihak yang paling berperan yakni pemerintah sebagai pemegang kewenangan untuk membuat kebijakan pengarusutamaan gender dan untuk membuat berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang responsif gender.

Mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan memerlukan keterhubungan antara sistem pendidikan dengan lingkungan sosial yang lebih luas. UNESCO menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa kesetaraan gender diperhatikan dalam pendidikan.



Sumber: GEM report team

Gambar 2.2 Kerangka Kerja untuk Memonitor Kesetaraan Gender dalam Pendidikan

Melalui kerangka kerja di atas, dipahami bahwa pintu masuk bagi upaya mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan yakni ketika setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan. Selain itu, nilai dan norma yang ada di masyarakat menjunjung kesetaraan gender. Tidak kalah pentingnya yakni dukungan yuridis, melalui aturan hukum serta kebijakan terutama berkaitan dengan pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender. Selain itu, aspek - aspek yang menjadi bagian dalam sistem pendidikan menunjang kesetaraan gender baik berkaitan dengan lingkungan yang memiliki budaya yang menghargai kesetaraan gender, penyelenggaraan proses belajar yang menghargai kesetaraan gender, serta berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yang memperhatikan kesetaraan gender seperti guru yang memiliki perspektif gender atau penggunaan sumber belajar yang responsif gender. Ketika semua hal tersebut terpenuhi, maka luaran pendidikan akan mempengaruhi

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

kesempatan ekonomi dan kesempatan kerja seperti meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Selain itu, pendidikan yang berperspektif gender akan berpengaruh terhadap tingkat partisipasi perempuan dalam dunia politik dan untuk menduduki posisi pimpinan. Melalui pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender, perempuan memperoleh pemenuhan hak atas kesehatan hidup secara luas maupun kehidupan yang sejahtera (UNESCO, 2019). Pendidikan secara umum, dan secara lebih spesifik Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman pada siswa akan pentingnya penghargaan terhadap harkat dan derajat manusia tanpa adanya perlakuan yang berbeda atas dasar apapun termasuk atas dasar gender. Pemahaman ini akan menjadi katalisator bagi perubahan sosial yang lebih adil bagi semua pihak.

Pendidikan merupakan bagian dari kehidupan sosial yang tidak bebas dari nilai dan norma gender. Institusi pendidikan idealnya menjadi lembaga yang berperan dalam mendorong transformasi norma gender yang setara, melalui guru yang memiliki perspektif gender, penggunaan pendekatan dan metode pembelajaran yang bersifat *student centre* dan menjunjung nilai kesetaraan, sumber belajar dan media pembelajaran yang berperspektif gender, serta kebijakan dan budaya sekolah yang adil gender. Sejatinya kesetaraan gender merupakan hak asasi yang seharusnya dinikmati oleh semua peserta didik baik laki-laki maupun perempuan sehingga mereka dapat mengembangkan semua potensi diri yang dimiliki sehingga dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan tanpa dibatasi oleh “*label*” gender yang dilekatkan pada mereka.

2.3.4. Mewujudkan Kesetaraan Gender Melalui Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan

Buku teks memiliki peran penting dalam membangun kesadaran sosial dan melakukan tindakan nyata tanpa ada perbedaan sosial, ekonomi, gender, dan lainnya. Buku teks berperan sebagai agen sosialisasi yang mempengaruhi bagaimana siswa berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan rule model yang disajikan dalam buku teks, termasuk mempelajari bagaimana relasi gender dibangun. Mewujudkan kesetaraan gender dapat dilakukan melalui buku teks, yakni buku teks yang menyajikan narasi, ilustrasi, dan bahasa yang memperhatikan representasi

gender yang setara (Gachukia & Chung, 2005). Pendidikan Kewarganegaraan perlu diselenggarakan secara demokrasi tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun. Salah satu upaya menjamin penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan yang demokratis yakni melalui penggunaan buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang brepespektif gender. Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang menyajikan representasi gender yang setara secara eksplisit yang mengaskan bahwa setiap orang baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan berperspektif kesetaraan gender menjadi acuan siswa dalam berfikir, bersikap, dan berperilaku.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2006 berkenaan dengan Pendidikan Kewarganegaraan dinyatakan bahwa:

“Pendidikan kewarganegaraan ditujukan untuk membentuk siswa menjadi pribadi yang memiliki rasa nasionalisme dan patriotisme yang ditunjukkan dalam berbagai tindakan positif yang menjunjung nilai-nilai dasar bangsa Indonesia yakni Pancasila yang di dalamnya sarat akan nilai demokrasi”.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi salah satu katalisator mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran penting dalam mewujudkan kesetaraan gender (Dillabough, 2016). Keberhasilan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mewujudkan kesetaraan gender akan sangat ditentukan bagaimana proses pembelajaran berlangsung termasuk bagaimana buku teks mendukung upaya mewujudkan kesetaraan gender. Siswa mempelajari peran gender melalui buku teks, sehingga representasi gender yang setara penting untuk disajikan dalam buku teks agar siswa mempelajari bahwa setiap orang baik laki-laki dan Perempuan memiliki peran yang sama penting (Mustapa & Mills, 2015).

Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan perlu menggunakan perspektif gender sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai kesetaraan relasi gender pada siswa. Upaya yang dapat dilakukan yakni dengan menjelaskan gambaran realitas yang menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai *partner* yang setara, pentingnya laki-laki dan perempuan diperlakukan secara setara tanpa dibedakan dalam hal pengupahan, dan menjadikan tanggung jawab domestik sebagai tanggung

jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan; serta mempertanyakan kekerasan yang dialami perempuan sebagai wujud hegemoni laki-laki dalam sistem sosial (Chakraborty, 2010). Berbagai bentuk ketimpangan gender yang merugikan salah satu pihak (Sebagian besar perempuan), seperti relasi superior-inferior antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aktivitas publik, pengupahan yang tidak setara untuk beban kerja yang sama, maupun berbagai bentuk kekerasan (sebagian korban perempuan) dianggap sebagai suatu kondisi yang dapat diterima dan mendapatkan legitimasi kultural. Melalui buku teks Pendidikan Kewarganegaraan, siswa memperoleh pemahaman mengenai relasi setara laki-laki dan perempuan sebagai sesama manusia dengan harkat dan derajat yang sama sehingga berhak diperlakukan secara setara tanpa ada perlakuan yang diskriminatif yang memposisikan salah satu pihak secara subordinat.

Buku teks memiliki peran sangat penting dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena buku teks menjadi sarana pembelajaran utama bagi guru dan siswa. Konten buku teks mengandung nilai-nilai yang tidak terlepas dari hasil negosiasi berbagai kepentingan. Buku teks harus menjadi sarana untuk mewujudkan pendidikan yang setara (Brugeilles & Combers, 2009). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana yang mendidik siswa untuk memahami eksistensi mereka sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif dalam kehidupan. Pendidikan Kewarganegaraan berperan penting mengenalkan beragam hak pada peserta didik, juga mendorong peserta didik untuk menggunakan hak yang mereka miliki (Gordon, 2006). Pendapat yang dikemukakan Gordon lebih menekankan pada peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun kesadaran siswa dan siswi untuk menggunakan hak yang mereka miliki. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam mendorong kesetara gender, karena dalam norma sosial sering ditemukan pembatasan akan hak yang seringkali dialami perempuan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan memiliki keterkaitan erat dengan upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai bagian dari gambaran kehidupan demokrasi yang menjadi salah satu tujuan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan.

2.4. Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Digital Berbasis Kesetaraan Gender

2.4.1. Pengertian dan Peran Penting Buku Teks

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Sistem Perbukuan, buku teks merupakan buku yang disusun untuk pembelajaran berdasarkan standar nasional pendidikan dan kurikulum yang berlaku. Buku teks jelas memiliki peran penting dalam proses pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan oleh (Loveridge dkk, 1970), bahwa Buku Teks adalah buku sekolah yang berisi materi-materi pilihan pada suatu subjek tertentu, dalam bentuk tertulis yang menciptakan pembelajaran dan situasi pengajaran yang nyaman, dan diatur secara sistematis sehingga dapat diterima oleh peserta didik. Buku teks merupakan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pendidikan dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang sudah ditentukan, dalam buku teks terdiri dari teks atau tulisan serta ilustrasi yang disusun sesuai dengan ketentuan (Bruggiles & Chrome, 2009). Jelas bahwa buku teks berperan penting bagi siswa dan guru, selain sebagai rujukan dalam memperoleh materi dan pengetahuan juga berperan dalam menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses pembelajaran.

Buku teks memiliki peran sebagai media pembelajaran utama yang secara khusus di desain untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Buku teks terdiri dari teks atau gambar termasuk ilustrasi serta petunjuk berkaitan dengan aktivitas pembelajaran yang perlu di lakukan (Gachukia & Fay, 2005). Buku teks juga menjadi salah satu alat yang berperan penting dalam membangun pemahaman mengenai beragam perbedaan yang menjadi bagian dari realitas kehidupan sosial baik dalam agama atau keyakinan, budaya maupun perbedaan gender. Siswa belajar untuk dapat hidup secara inklusif dan menolak berbagai bentuk diskriminasi melalui buku teks(UNESCO, 2017).

Buku teks menjadi agen sosialisasi keberagaman atau pluralitas yang menjadi realitas kehidupan di masyarakat baik dalam hal keberagaman agama, etnisitas, ras, kelas sosial, maupun gender. Sebagaimana dinyatakan oleh Gachukia & Cung (2005), bahwa *Textbook are important socialization agents. They present a world from which girls and boys adopt respective role models that influence their*

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

thoughts, attitudes and life aspiration, and relation with opposite gender. Buku teks merupakan agen sosialisasi yang memiliki peran besar dalam membentuk peran gender siswa. Materi buku teks yang menyajikan gambaran kehidupan, termasuk tokoh yang dijadikan panutan yang dimunculkan dalam buku teks menjadi acuan bagi siswa dalam berfikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan peran gender yang telah dipelajari mengingat pengetahuan yang disajikan di dalam buku teks diyakini sebagai kebenaran yang dijadikan acuan bagi siswa.

Buku teks memiliki kekuatan dalam melegitimasi apa yang dianggap benar oleh kelompok dominan dan mengesampingkan kelompok minoritas secara subordinat. Buku teks juga berperan dalam mendorong perubahan yang memberikan gambaran yang positif pada semua pihak (USAID, 2015). Buku teks memiliki peran yang sangat strategis yakni sebagai acuan siswa dalam mengenai pengetahuan, budaya masyarakat, sistem nilai dan moral dan perilaku. Oleh karena itu, berbagai kekuatan kelompok dengan beragam latar belakang baik ras, kelas, agama maupun gender berupaya mempengaruhi konten atau pengetahuan yang disajikan dalam buku teks (Apple, 1992). Pengetahuan pada buku teks diyakini sebagai suatu kebenaran yang bersifat netral.

Pengetahuan yang disajikan di dalam buku teks sebenarnya merupakan hasil suatu hubungan, perjuangan maupun kompromi kekuasaan yang kompleks dengan melibatkan berbagai identitas seperti ras, kelas, agama, maupun gender. Buku teks merupakan tempat berbagai wacana disajikan berkaitan dengan ekonomi, politik, agama maupun gender. Buku merupakan *instrument* kekuasaan yang penting yang menentukan kebenaran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, buku teks tidak semata-mata menjadi sumber belajar dan media pembelajaran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran dan tujuan pendidikan. Buku teks juga memiliki peran penting dalam mendorong kehidupan yang inklusif dan setara di tengah perbedaan yang menjadi bagian dari realitas kehidupan siswa.

2.4.2. Fungsi Buku Teks

Menurut Tarigan & Tarigan (2009), buku teks memiliki beragam fungsi, antara lain: 1). Mencerminkan suatu sudut pandang; 2). Menyediakan suatu sumber belajar yang teratur rapi dan bertahap; 3). Menyediakan pokok masalah yang kaya

dan serasi; 4). Menyediakan aneka metode dan sarana pengajaran; 5). Menyajikan fiksasi awal bagi tugas dan pelatihan; 6). Menyajikan sumber bahan evaluasi dan remedial.

Buku teks merupakan hasil produk budaya yang isinya tidak dapat dilepaskan dari perspektif penyusun buku. Buku teks menjadi wahana untuk merepresentasikan suatu perspektif tertentu. Buku teks juga memiliki fungsi penting sebagai sumber belajar yang menyajikan materi secara sistematis dan hierarkis. Melalui buku teks, berbagai isu dan pembahasan disajikan secara seimbang. Disamping itu, buku teks juga menyediakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, tanya jawab, *problem based learning*, *project based learning*, dan lainnya, selain itu juga menyediakan berbagai sarana pembelajaran. Pada buku teks juga disediakan berbagai tugas dan pelatihan

Buku teks memiliki beberapa fungsi, yakni: *pertama*, buku teks memiliki fungsi untuk mentransmisi dan menginternalisasi nilai yang diyakini masyarakat. Setiap masyarakat berupaya menjaga dan melestarikan sistem nilai yang dianggap baik, dan buku teks merupakan salah satu sarana yang berfungsi mentransmisi dan menginternalisasi sistem nilai tersebut pada generasi baru sehingga tetap lestari dan terjaga; *kedua*, buku teks memiliki fungsi sebagai sarana untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku. Melalui buku teks, siswa memperoleh pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan, mempelajari berbagai keterampilan serta perilaku sebagaimana yang disajikan di dalam buku teks. *ketiga*, buku teks berfungsi sebagai saran yang memfasilitasi siswa selama proses pembelajaran, dan membantu siswa untuk memperoleh luaran pembelajaran yang berkualitas (UNESCO, 2010).

Fungsi dari buku teks secara umum, yaitu: Sebagai sumber belajar bagi siswa untuk mengenal berbagai nilai kehidupan dan gambaran dunia; sebagai sumber pengetahuan; sebagai sumber nilai demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk penghormatan terhadap kesetaraan gender; sebagai sumber pengetahuan yang diyakini kebenarannya oleh siswa; sebagai media pembelajaran yang memudahkan siswa mengetahui dan memahami materi yang dipelajari; sebagai sarana untuk menyajikan materi sesuai dengan kurikulum yang telah

ditetapkan pemerintah; sebagai sarana bagi siswa untuk belajar baik secara mandiri maupun berkelompok; sebagai media pembelajaran yang menyajikan beragam strategi pembelajaran; sebagai sarana untuk mengukur keberhasilan pembelajaran siswa melalui berbagai bentuk latihan.

Berdasarkan fungsi buku teks di atas, jelas bahwa buku teks memiliki peran yang sangat strategis dalam proses pembelajaran. Buku teks berperan sebagai sumber belajar, media pembelajaran, sumber nilai-nilai yang penting dalam masyarakat, mendorong partisipasi siswa dalam kehidupan bermasyarakat, melalui beragam penugasan yang berorientasi pada pembelajaran berpusat pada siswa (*learner center*).

2.4.3. Komponen Buku Teks Berperspektif Gender

Menyusun buku teks berperspektif gender perlu memperhatikan berbagai komponen yang menunjang integrasi gender dalam materi buku teks yakni teks dan gambar. Sebagaimana dinyatakan oleh Mayer dkk, (1995):

“Textbooks should be designed in ways that elicit the cognitive processes required for meaningful learning—namely selecting relevant verbal information to build a text base and selecting relevant pictorial information to build an image base, organizing these representations into coherent situation models of the verbal material and of the visual material, and integrating across these two representations of the material”.

Pendapat Mayer tersebut menegaskan bahwa dalam penyusunan buku teks, perlu memperhatikan proses kognitif sehingga menghasilkan pembelajaran yang bermakna dengan materi memuat informasi relevan ditunjang oleh gambar yang representatif. Penggunaan gambar dalam buku teks menjadi komponen yang sangat penting. Ditegaskan oleh Mayers dkk (1995), bahwa gambar dalam buku teks memiliki beberapa fungsi, yakni:

“A set of annotated illustrations can serve three functions corresponding to the cognitive processes required for meaningful learning. First, annotated illustrations can serve as a signal that helps readers select relevant words and images. Second, annotated illustrations can serve as a structural summarizer that helps readers to organize the material into a cause and-effect system. Third, annotated illustrations can serve as an elaborative cue that helps readers connect visual and verbal representations of the same systems”.

Buku teks memiliki fungsi untuk membantu pembaca dalam memilih gambar dan kata-kata secara tepat. Gambar juga berperan membantu pembaca untuk memahami materi dalam suatu sistem sebab akibat.

Buku teks yang representatif gender perlu memperhatikan penggunaan bahasa yang tidak mengandung bias gender atau stereotip gender karena bahasa merupakan bagian dari sistem budaya suatu masyarakat yang sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh nilai budaya yang ada di dalamnya. Postl (2017), menyatakan bahwa “*A patriarchal world produces a patriarchal language, which in turn means that women and men are not on the same playing field with respect to linguistic expression, either in speech or writing*”. Penyusunan buku teks perlu menegaskan kesetaraan peran, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan, sehingga relasi gender yang setara dapat disajikan dalam buku teks.

Bahasa tidak bersifat netral, di dalamnya mengandung relasi gender yang menempatkan perempuan sebagai pihak dengan posisi subordinat. Bahasa dianggap sebagai sarana untuk melakukan marginalisasi terhadap perempuan (Postl, 2017). Bahasa sebagai produk budaya yang terkait atau sangat dipengaruhi oleh nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Dalam menyusun buku teks, penting untuk dipastikan bahwa bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang tidak bias gender, atau mengandung stereotip gender, sehingga siswa mempelajari bahwa setiap orang, laki-laki dan perempuan memiliki relasi yang setara.

Untuk menghasilkan buku teks yang berperspektif gender, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu: Komitmen penyusun buku untuk mengasilkan buku yang berkeadilan gender, menolak ketidakadilan gender yang berlangsung di masyarakat; buku teks menyajikan relasi gender yang setara antara laki-laki dan perempuan termasuk berkaitan dengan hak yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan; menggunakan bahasa yang responsif gender, bukan bahasa yang menunjukkan superioritas salah satu gender; materi buku teks menyajikan laki-laki dan perempuan dengan peran yang sama, termasuk keberhasilan yang diperoleh (Gachukia & Cung, 2005). Adapun menurut Michael, untuk menyusun buku teks yang berperspektif gender, dapat dilakukan dengan menyajikan hal berikut ini: Penyajian karakter laki-laki dan perempuan secara setara baik pada materi maupun

ilustrasi; materi buku teks menyajikan distribusi peran yang setara pada laki-laki dan perempuan di ranah publik maupun domestik; penggambaran yang setara mengenai karakter laki-laki dan perempuan baik maupun buruk; menghindari penggunaan bahasa yang bersifat seksis atau mengandung bias gender (Michael, 1986).

Komponen untuk menyusun buku teks terdiri dari: Teks yang menyajikan representasi gender yang setara; ilustrasi atau gambar yang disajikan secara setara dan inklusif; menggunakan bahasa yang inklusif dan tidak bias gender; menyajikan peran gender yang setara dan transformatif, tidak mengacu pada peran gender tradisional (USAID, 2015). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, sangat penting bagi penyusun buku teks untuk memiliki perspektif gender sehingga dapat menghasilkan buku teks yang isi (*conten*), gambar maupun bahasa tidak mengandung bias gender, stereotip atau diskriminatif gender.

2.4.4. Landasan Yuridis Pengembangan Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Digital Berperspektif Kesetaraan Gender

Buku teks yang memperhatikan kesetaraan gender secara yuridis diatur dalam berbagai peraturan perundangan pada tingkatan nasional maupun global. Sebelum menyajikan berbagai ketentuan nasional dan internasional mengenai buku teks yang perlu memperhatikan kesetaraan gender, terlebih dahulu disajikan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai buku teks, berikut ini:

Pertama, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Buku terdiri atas buku cetak dan buku elektronik. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tersebut, buku memiliki dua macam bentuk yakni buku dalam bentuk cetak atau print out dan buku dalam bentuk digital. Secara lebih spesifik, buku dalam bentuk digital dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, bahwa Buku elektronik merupakan buku teks yang di dalamnya terdapat teks, gambar, audio, video, atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan secara elektronik. Dalam pendidikan, penggunaan buku teks merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk menopang kegiatan pembelajaran. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017,

buku pendidikan merupakan buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus.

Penggolongan buku yang digunakan dalam pendidikan diatur dalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, yakni buku pendidikan dikategorikan menjadi dua yakni buku teks dan buku nonteks. Pengertian Buku teks dimuat dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, bahwa buku teks merupakan buku pelajaran yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Pemerintah Pusat tanpa dipungut biaya. Berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, dapat dipahami bahwa menurut Undang-Undang tersebut, buku terdiri dari dua macam yakni buku fisik atau cetak dan buku elektronik yakni buku yang dipublikasikan secara digital atau elektronik. Dalam pendidikan, terdapat dua macam buku yakni buku teks dan buku nonteks. Buku teks merupakan buku wajib yang digunakan dalam proses pembelajaran yang penyusunannya mengacu pada kurikulum yang berlaku.

Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan. Pengertian buku menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017, Buku adalah karya tulis dan/atau karya gambar yang diterbitkan berupa cetakan berjilid atau berupa publikasi elektronik yang diterbitkan secara tidak berkala. Berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, setiap karya tulis dan atau yang disertai dengan gambar baik yang diterbitkan dalam bentuk cetak maupun elektronik. Menurut pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, buku yang digunakan dalam pendidikan baik pada pendidikan umum, pendidikan kejuruan dan lainnya terdiri dari dua macam yakni buku teks dan buku non teks. Berkaitan dengan buku teks, secara spesifik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019, yakni buku yang disusun untuk digunakan dalam pembelajaran yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan serta kurikulum yang berlaku.

Ketiga, Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, Permendikbud ini mengatur mengenai buku yang digunakan dalam pendidikan. Buku teks menurut Pasal 1 Ayat (1) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, yaitu

“Buku teks pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan pada satuan pendidikan”.

Berdasarkan pengertian buku teks di atas, dipahami bahwa Buku teks yang digunakan dalam satuan pendidikan baik pada jenjang Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun Sekolah Menengah Atas yang dijadikan sumber belajar utama yang telah melalui seleksi kelayakan oleh Kemendikbud untuk mencapai kompetensi dasar dan Kompetensi inti yang ditentukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Penyusunan buku teks harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Menurut Pasal. 2 Ayat (2) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016, dinyatakan bahwa buku teks maupun buku non teks yang digunakan pada satuan pendidikan harus sesuai dengan nilai atau norma positif yang berlaku di masyarakat, seperti bebas dari pornograsi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias gender, dan nilai lainnya yang menyimpang. Berdasarkan Pasal. 2 Ayat (2) Permendikbud No. 8 Tahun 2016, dinyatakan bahwa buku teks pendidikan yang baik salah satu indikatornya yakni tidak mengandung bias gender. Meskipun dalam Pasal. 2 Ayat (2) Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 diatur mengenai tidak dibenarkan adanya bias gender dalam buku teks yang digunakan dalam proses pembelajaran, buku teks secara implisit masih mengandung bias gender, seperti dalam bentuk marginalisasi maupun subordinasi perempuan pada buku teks (Febriyanti dkk, 2020; Christiani, 2015; Purnama Sari, 2014). Diperlukan instrumen untuk mengukur kesetaraan gender pada buku teks pendidikan yang representatif sehingga semua pihak terwakili setara setara baik perempuan maupun laki-laki.

Keempat, Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2022, tentang Penilaian Buku Pendidikan, peraturan ini secara umum berkaitan dengan ketentuan bagaimana menilai buku sehingga menghasilkan buku yang berkualitas yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan bahan ajar bagi siswa maupun guru. Pada

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

Pasal 4 Ayat (1) Permendikbudristek Nomor 25 Tahun 2022, dinyatakan bahwa penilaian buku teks utama merupakan penilaian terhadap buku teks yang ditulis oleh masyarakat sebagai suatu mekanisme penyusunan buku teks utama oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa buku teks merupakan salah satu buku pendidikan yang dijadikan acuan utama dalam kegiatan pembelajaran. pengembangan buku teks berlandaskan standar nasional dan kurikulum yang berlaku.

Buku teks sebagai sumber belajar dan bahan ajar utama dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan kesetaraan gender, mengingat kesetaraan gender dalam pendidikan dan secara spesifik dalam buku teks telah diatur dalam berbagai kebijakan perundangan di tingkat nasional maupun konvensi pada tingkat internasional. Berbagai konvensi internasional mengenai pentingnya pendidikan yang demokratis tanpa ada diskriminasi termasuk atas dasar gender sudah disahkan. Berikut ini berbagai bentuk komitmen internasional dalam mewujudkan keadilan bagi manusia baik laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, antara lain:

1). *Convention against Discrimination in Education* UNESCO 1960

Pasal 1, menyatakan bahwa “Untuk tujuan Konvensi ini, istilah ‘diskriminasi’ termasuk setiap perbedaan, pengecualian, batasan atau preferensi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal kebangsaan atau sosial, ekonomi kondisi atau kelahiran, memiliki tujuan atau efek meniadakan atau merusak kesetaraan khususnya dalam pendidikan: (a) Merampas akses pendidikan dalam bentuk apapun kepada siapa pun atau sekelompok orang ditingkat manapun; (b) Membatasi pendidikan seseorang atau sekelompok orang dengan standar yang lebih rendah; (c) Tunduk pada ketentuan Pasal 2 Konvensi ini, tentang pembentukan atau memelihara sistem atau lembaga pendidikan terpisah untuk orang atau kelompok orang; atau (d) Menyebabkan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan martabat manusia”.

2). *Convention of Elimination all Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)*

Dalam Pasal 1 *Convention of Elimination all Forms Of Discrimination Against Women*, dinyatakan bahwa “Untuk tujuan konvensi ini, ‘diskriminasi terhadap perempuan’ berarti perbedaan, pengucilan, dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat atau bertujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan - kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan laki-laki dan perempuan”. Jelas bahwa berbagai bentuk perlakuan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang berdampak negatif diberbagai bidang kehidupan yang ditujukan pada perempuan dipandang sebagai suatu tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Pasal 10 poin (c) CEDAW, menegaskan bahwa “penghapusan setiap konsep yang stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan di semua tingkat dan semua bentuk pendidikan, dengan menganjurkan pendidikan campuran (perempuan dan laki-laki) dan bentuk pendidikan lain yang dapat membantu pencapaian tujuan ini, dan terutama dengan merevisi buku-buku pelajaran dan program-program sekolah serta menyesuaikan metode-metode pelajaran”. Berdasarkan Pasal 10 CEDAW tersebut, dipahami bahwa pendidikan harus menghapuskan berbagai bentuk stereotip peran gender yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan termasuk dalam buku teks yang digunakan, buku teks yang mengandung stereotip gender harus direvisi dan disusun ulang dengan konten yang memperhatikan kesetaraan gender.

3). *Convention on the Rights of the Child* 1989

Pasal 29 ayat (1) *Convention on the Rights of the Child* , menyatakan bahwa “Pihak Negara setuju bahwa pendidikan anak harus diarahkan pada: (a) Pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal; (b) Pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental, dan prinsip diabadikan dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa; (c) Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua dan anak, identitas budaya sendiri, bahasa dan nilai-nilai, nilai-nilai nasional dari negara tempat anak itu tinggal, dari negara mana dia berasal, dan untuk peradaban yang berbeda dari miliknya; (d) Persiapan anak untuk hidup bertanggung jawab

dalam masyarakat bebas, dalam semangat pengertian, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan diantara semua orang, etnis, bangsa dan agama kelompok dan orang asli; (e) Pengembangan penghargaan terhadap lingkungan alam”.

4). *World Declaration on Education for All 1990*

Poin 3 yakni Prioritas yang paling mendesak adalah menjamin akses dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan, dan menghilangkan semua rintangan yang menghambat partisipasi aktif mereka. Semua bentuk stereotip gender dalam pendidikan harus dihilangkan. Salah satu rintangan dalam mewujudkan keadilan gender dalam pendidikan yakni buku teks yang mengandung stereotip gender. Buku teks yang tidak memperhatikan kesetaraan gender harus diperbaiki sehingga pendidikan dapat menjadi awal perubahan mewujudkan relasi yang setara antara laki-laki dan perempuan.

5). *Vienna Declaration And Programme Of Action 1993 World Conference On Human Rights*

Pendidikan hak asasi manusia harus mencakup perdamaian, demokrasi, pembangunan dan keadilan sosial, sebagaimana diatur dalam instrumen hak asasi manusia internasional dan regional, untuk mencapai pemahaman dan kesadaran bersama dengan tujuan untuk memperkuat komitmen universal terhadap hak asasi manusia.

6). *Sustainable Development Goals*

Tujuan SDGs ke 5 yakni kesetaraan gender, serta target-target pada tujuan SDGs lainnya yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Dari berbagai bentuk kesepakatan internasional tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa saat ini, dunia pendidikan masih menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, dan diperlukan komitmen bersama agar kondisi tersebut tidak lagi terjadi. Melalui penyelenggaraan pendidikan dan semua komponen yang menunjang terwujudnya kehidupan yang demokratis dan berkeadilan gender.

Adapun Landasan hukum dalam konteks nasional, antara lain:

1. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan Pendidikan”, dan dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Setiap orang bebas dari perlakuan yang

bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

2. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*).
4. Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi bab II berkenaan dengan prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender.
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Berdasarkan berbagai ketentuan perundangan yang secara umum maupun spesifik berkaitan tentang kesetaraan gender dalam pendidikan, dipahami bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk menjamin pemenuhan akan hak perlakuan

yang setara tanpa ada diskriminasi diberbagai kehidupan termasuk dalam pendidikan. Diperlukan ketegasan dalam implementasi berbagai ketentuan tersebut sehingga pendidikan memiliki wajah demokratis bebas dari berbagai bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi atas dasar gender.

2.4.5. Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Berperspektif Gender

Buku teks merupakan bagian penting yang digunakan dalam proses pembelajaran, adanya bias gender dalam materi yang terdapat pada buku teks akan menghambat upaya mewujudkan kesetaraan gender melalui pendidikan (Hülya Kosar, 2015).

Untuk menunjang buku teks yang tidak bias gender, perlu diperhatikan berbagai aspek yang terdapat pada buku teks baik berkenaan dengan teks, karakter, gambar, dialog, dan lainnya. Selain itu, diperlukan komitmen semua *stakeholders* pendidikan agar buku teks yang dijadikan acuan dalam pendidikan berkeadilan gender. Buku teks yang berkeadilan gender merupakan hal yang mendasar dalam menopang budaya masyarakat demokratis, apalagi untuk konteks Pendidikan Kewarganegaraan mengingat mata pelajaran ini secara khusus ditujukan untuk membentuk karakter warga negara yang baik yakni warga negara yang demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Sebagai mata pelajaran demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan harus ditunjang dengan buku teks yang mencerminkan nilai demokrasi sehingga memungkinkan terwujudnya pendidikan transformatif yang lebih mengakomodir kepentingan semua pihak. Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan menjadi wahana perubahan sosial yang berorientasi pada inklusivitas dan transformasi (Hein & Shelden, 1998). Untuk mendukung buku teks berkeadilan gender, diperlukan komitmen dari pihak-pihak terkait serta strategi yang menegaskan buku teks yang disusun berkeadilan gender. Menurut Brugeile (2009), menghilangkan diskriminasi gender dalam buku teks, perlu memperhatikan beberapa hal yakni:

“Dalam Buku teks harus memperhatikan representasi laki-laki dan perempuan; karakter yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang tidak menggambarkan keadilan gender perlu dilakukan upaya perbaikan bukan dibiarkan; karakter yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan tidak dapat dilepaskan dari peran gender, meskipun antara satu buku teks dengan buku teks lain digambarkan secara berbeda. Oleh karena itu, representasi laki-laki

dan perempuan harus memperhatikan kesetaraan gender baik pada isi buku, latihan soal, maupun pada materi yang dilampirkan; representasi laki-laki dan perempuan harus ada baik pada teks maupun ilustrasi buku teks; Kesesuaian antara isi teks dengan ilustrasi penting diperhatikan, netralitas teks perlu diikuti dengan ilustrasi yang menyertai teks, karena sering terjadi inkonsistensi antara teks dengan ilustrasi berkenaan dengan keadilan gender, adakalanya teks dan teks saling menguatkan dalam mendukung kesetaraan gender, atau sebaliknya yakni saling melemahkan atau tidak sinkron satu sama lain”.

Penyusun buku teks serta penilai buku teks harus memiliki perspektif gender sehingga saat menulis buku teks dan menilai buku teks berbagai indikator kesetaraan gender dalam buku teks diperhatikan seperti representasi laki-laki dan perempuan dalam konten buku teks, karakteristik laki-laki dan perempuan yang digambarkan dalam buku teks dengan memperhatikan kesetaraan, bukan berdasarkan peran gender yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dipelajari oleh siswa dari lingkungan sosialnya yang cenderung bias atau diskriminatif gender. Buku teks menjadi salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, dan memiliki pengaruh penting dalam membangun pemahaman siswa terhadap materi maupun nilai yang terdapat dalam konten maupun gambar pada buku teks. Buku teks yang memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender diharapkan dapat membentuk dan membangun kesadaran akan kesetaraan gender pada siswa.

Islam & Assadullah (2018), menyajikan indikator buku teks yang memperhatikan kesetaraan gender memperhatikan yakni:

Pertama, konten buku teks yang berdiri dari kata: Nama variabel dalam buku teks (nama; pekerjaan); total variabel yang disebutkan dalam buku teks; kata benda; kata ganti orang; atribut gender yang muncul dalam buku teks; total atribut yang muncul dalam buku teks; peran sosial laki-laki dan perempuan di luar ranah domestik; pekerjaan profesional; aktivitas; kalimat: laki-laki atau perempuan yang menjadi peran utama dalam kalimat; laki-laki atau perempuan yang terlibat dalam dialog; cerita: penulis baik penulis buku teks atau cerita, dan lainnya yang terdapat pada buku teks; laki-laki dan perempuan yang berperan sebagai pemimpin; laki-laki dan perempuan yang menjadi pusat atau tokoh utama dalam cerita; total karakter laki-laki dan perempuan dalam buku teks; Kualitas presentasi: laki-laki dan perempuan dalam peran domestik; istilah yang digunakan dalam menyebutkan perempuan; peran profesional.

Kedua, gambar pada buku teks yang terdiri dari: Jumlah total gambar laki-laki dan perempuan dalam buku teks; laki-laki dan perempuan yang menjadi

pusat dalam gambar pada buku teks; gambar laki-laki dan perempuan pada aktivitas di dalam rumah; gambar laki-laki dan perempuan pada aktivitas di luar rumah.

Untuk menghasilkan buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang berperspektif gender, perlu memperhatikan representasi gender secara kualitas dan kuantitas pada konten atau materi buku teks maupun pada ilustrasi yang dimunculkan pada buku teks. Konten dan ilustrasi buku teks perlu memunculkan karakter laki-laki dan perempuan dengan berbagai peran pada ranah publik dan domestik yang menggambarkan relasi gender yang setara.

Pendidikan tidak dapat berperan sendirian dalam mewujudkan kesetaraan gender, karena dampak negatif norma diskriminatif gender yang ada di masyarakat terbawa dalam dunia pendidikan sehingga memunculkan bias gender yang mempengaruhi perilaku guru, pilihan materi maupun pilihan karir bagi peserta didik khususnya perempuan serta mempengaruhi kesempatan bagi siswa perempuan untuk kehidupannya di masa yang akan datang (UNESCO, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa penyusunan buku teks sangat berkaitan dengan norma gender yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan buku teks perlu memiliki perspektif gender sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang demokratis dan adil tanpa ada pihak yang dirugikan dan diperlakukan secara diskriminatif.

2.4.6. Landasan Filosofis Pengembangan Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Digital Berbasis Kesetaraan Gender

Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan peneliti berdasarkan pada beberapa landasan filosofis, berikut ini landasan filosofis yang digunakan dalam penelitian ini:

Pertama, Filsafat Ki Hadjar Dewantara, Ki Hadjar Dewantara merupakan seorang tokoh pendidikan di Indonesia dengan pemikiran yang berpengaruh luas dalam kehidupan bangsa Indonesia di masa lalu hingga saat ini. Bemikiran beliau sangat relevan dengan sistem nilai, budaya dan konteks kehidupan Bangsa Indonesia. Ki Hadjar Dewantara menjadikan pendidikan sebagai kunci kemerdekaan Bangsa Indonesia. Pendidikan sangat penting bagi laki-laki dan

perempuan untuk bebas dari berbagai bentuk eksploitasi. Dalam Buku “Ki Hadjar Dewantara Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan dan Sikap merdeka”, dinyatakan bahwa pendidikan merupakan sumber kebebasan dan kemerdekaan manusia. Melalui pendidikan, manusia dapat menjalankan kehidupan tanpa bergantung pada orang lain, serta mampu menjadi anggota masyarakat yang baik (Ki Hadjar Dewantara, 2013). Pendidikan menjadi sarana untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan.

Lembaga pendidikan yang didirikan Ki Hadjar Dewantara yakni Taman Siswa, menerapkan beberapa prinsip penyelenggaraan pendidikan, yaitu: *Pertama*, hak menentukan nasib sendiri, Ki Hadjar Dewantara menempatkan pemenuhan hak setiap individu untuk dapat menentukan diri sendiri, mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai penentu kedamaian dan ketentraman hidup bermasyarakat. Melalui sistem pengajaran yang disebut “*sistem among*”, setiap individu diharapkan dapat mengembangkan semua potensi yang dimiliki baik berkaitan dengan ahlak, jiwa, maupun raga. Setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dianugerahkan Tuhan dengan akal dan hati serta berbagai potensi alamiah yang melekat pada diri masing-masing. Pendidikan dengan sistem among sebagai “pintu gerbang” bagi setiap individu, laki-laki dan perempuan untuk dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai bagian dari anggota masyarakat;

Prinsip *kedua*, yakni siswa yang mandiri, menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan tidak sekedar menjadikan siswa pandai, atau memiliki pengetahuan luas. Pendidikan diharapkan membentuk siswa mampu berfikir dan bertindak secara mandiri, sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat. Kemandirian menjadi sarana yang membebaskan siswa dan siswi dari ketergantungan dan sifat pasif yang akan bermuara pada berbagai bentuk penindasan maupun eksploitasi. Kemampuan berfikir dan bertindak mandiri membimbing siswa dan siswi menjadi pribadi yang mampu mencari pengetahuan, membuat keputusan dan bertindak yang tepat dan bermanfaat bagi diri dan lingkungannya;

Prinsip *ketiga*, pendidikan harus mencerahkan masyarakat, prinsip ini berkaitan dengan peran penting institusi pendidikan sebagai garda depan yang mampu membuka cakrawala berfikir masyarakat untuk dapat mengenali peradaban bangsa sendiri, tidak sekedar “mengikuti” peradaban bangsa lain yang dianggap lebih baik;

Prinsip *keempat*, pendidikan harus mencakup wilayah yang luas, prinsip ini berkaitan dengan kemanfaatan pendidikan secara luas jika dapat diakses oleh sebagian besar orang. Sebaik apapun kualitas pendidikan jika hanya dapat dinikmati oleh sedikit orang, dampaknya tidak akan mendorong perubahan secara luas, mengingat pendidikan esensinya merupakan sarana perubahan, semakin banyak yang mengakses pendidikan, maka akan menjadi sumber kekuatan bangsa termasuk untuk mendorong perubahan sosial secara luas;

Prinsip *kelima*, perjuangan kemandirian, pendidikan harus bebas dari intervensi yang hanya berorientasi pada kepentingan tertentu. Pendidikan harus mampu terbebas dari ketergantungan yang membelenggu dan membatasi peran pendidikan untuk membebaskan siswa dari berbagai bentuk penindasan yang membelenggu; *keenam*, sistem ketahanan diri, yakni kemampuan sistem pendidikan untuk dapat bertahan dari ketergantungan terhadap pihak lain; *ketujuh*, pendidikan anak-anak, anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri dan menyempurnakan perkembangan diri sebagai seorang manusia, institusi pendidikan memiliki peran untuk memenuhi pemenuhan hak tersebut (Ki Hadjar Dewantara, dalam Marihandono, 2017).

Berdasarkan beberapa prinsip di atas, jelas bahwa pemikiran Ki hadjar Dewantara sangat menunjung tinggi peran pendidikan sebagai wahana yang membebaskan dan memerdekakan individu dan bangsa dari berbagai penindasan dan eksploitasi. Ki Hadjar Dewantara sangat mendorong akses pendidikan yang seluas luasnya untuk semua orang tanpa dibedakan atas dasar apapun, termasuk atas dasar gender. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan agar dapat memberikan kontribusi terbaik dalam masyarakat. Melalui *sistem among*, setiap peserta didik baik laki-laki dan perempuan diharapkan dapat mengembangkan

semua potensi yang dimiliki, sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Ki Hadjar Dewantara sangat mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan sesuai dengan esensinya sebagai manusia. Sebagaimana dinyatakan dalam buku yang berjudul “Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian II Kebudayaan”, Ki Hadjar Dewantara menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, derajat dan harga diri yang sama, dan persamaan hak laki-laki dan perempuan perlu dijamin. Persamaan tidak selalu dimaknai dengan persamaan dalam semua hal terutama berkaitan dengan perilaku dalam menjalani hidup dan kehidupan (Ki Hadjar Dewantara, 1928 dalam Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 2011). Berdasarkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, dipahami bahwa pendidikan memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia untuk memerdekakan diri dari ketidaktahuan yang akan berujung pada berbagai bentuk penindasan. Laki-laki maupun perempuan harus memperoleh pendidikan agar menjadi pribadi yang cerdas dan mandiri serta mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat.

Kedua, Feminisme sebagai salah satu aliran filsafat yang berupaya mencari jawaban atas berbagai persoalan subordinasi perempuan. Menurut Mill, perempuan memiliki posisi yang berbeda dengan kelompok lain. Relasi laki-laki dan perempuan tidak setara. Laki-laki memiliki posisi superior sebagai “tuan” yang harus ditaati oleh perempuan. Menurut Mill, lembaga pendidikan dilibatkan untuk menjaga ketaatan tersebut. Perbedaan laki-laki dan perempuan juga berkaitan dengan gambaran ideal hidup yang dijalani. Laki-laki memiliki gambaran hidup ideal sebagai pemegang kekuasaan yang aktif di berbagai kegiatan publik, yang berusaha mewujudkan apa yang dikehendaki. Sebaliknya, gambaran ideal perempuan yakni berusaha untuk mengalah demi kepentingan orang lain, baik suami, anak, keluarga, dll. Posisi perempuan yang subordinat merupakan hasil suatu bentukan sosial, bukan bersifat alamiah.

Feminisme yang menggunakan kerangka kerja pemikiran Marxisme, menjadikan faktor penentu sejarah yakni produksi dan reproduksi. Di satu sisi, produksi berkaitan dengan mempertahankan eksistensi berupa pemenuhan kebutuhan sebagai manusia baik berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat

tinggal. Di sisi lain, reproduksi berkaitan dengan upaya menjaga dan memperluas penyebaran manusia. Setiap masyarakat dengan sejarah yang dimiliki serta kekhasan masing-masing selalu berupaya untuk memenuhi kedua hal tersebut yakni kegiatan kerja dan keluarga. Ketika jenis pekerjaan masih sederhana, kehidupan masyarakat masih sederhana, ikatan antar masyarakat masih erat, dan bersifat kekeluargaan. Seiring berkembangnya produksi, hubungan tersebut tidak lagi ada dan menciptakan kelas sosial yang berbeda antara pemilik modal dan pekerja, dengan pemegang utama kekuasaan ada pada pemerintah.

Merespon persoalan keterbatasan struktur materi maupun diskursif dalam pendidikan, feminis menggunakan kerangka kerja poststrukturalis khususnya yang berkenaan dengan bahasa, wacana, rasionalitas, kekuasaan, penolakan atas tindakan dominatif, kebebasan, kebenaran dan pengetahuan, serta tentang subyektifitas (Piere, 2000). Salah satu teori yang dikembangkan oleh feminis poststrukturalis yakni berkenaan dengan bahasa atau teks sebagai sarana mendistribusikan apa yang dianggap benar. Menurut teori bahasa yang dikembangkan feminis poststrukturalis, teks dibangun dengan memberikan perspektif alternatif diluar pandangan dominan tentang relasi laki-laki dan perempuan yang hierarkhis.

Teks bukan suatu yang sakral serta tidak dapat dirubah, sebaliknya teks dapat dikonstruksi serta kebenarannya dapat dipertanyakan secara kritis (Comber & Nixon, 1994). Subyek selalu pada proses produksi dan reproduksi berdasarkan struktur makna yang beragam, tidak selalu logis, serta terkadang aneh (Kristeva dalam Leckrone, 2005).

Ketiga, Humanisme, aliran filsafat ini berupaya menempatkan manusia sebagai makhluk rasional yang mampu membuat keputusan yang otonom. Menurut aliran filsafat ini, manusia pada hakekatnya bersifat baik, dan sebagai makhluk yang merdeka, pilihan manusia dalam menentukan hidupnya sendiri dengan segala kekhasan yang dimiliki harus dihargai; setiap individu berhak mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dan berupaya memperoleh kehidupan yang lebih baik (Pohan, 2019). Salah satu tokoh aliran ini yakni Hebermas, pandangan Hebermas tentang belajar emansipatoris menempatkan siswa sebagai subyek yang berupaya membangun kesadaran akan perlunya perubahan budaya kearah yang lebih baik.

Dalam hal ini, transformasi budaya yang lebih baik menjadi capai tertinggi dalam proses pendidikan (Pohan, 2019).

Keempat, Progresivisme, menurut aliran ini, manusia memiliki kemampuan alamiah berupa kecerdasan yang membantunya untuk dapat mengatasi berbagai tantangan dan hambatan dalam kehidupan dengan mengembangkan semua potensi yang dimiliki untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. filsafat progresivisme dalam pendidikan berupaya menempatkan siswa sebagai pusat atau subyek dalam proses pembelajaran. Filsafat progresivisme dalam pendidikan diorientasikan pada terselenggaranya pendidikan yang demokratis. Salah satu ciri pendidikan menurut aliran filsafat progresivisme yakni pendidikan demokratis yang menghargai berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, melalui proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik (Fadillah, 2017). Menurut filsafat progresivisme, tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk peserta didik yang berkualitas yakni yang memiliki kemampuan untuk merespon berbagai perubahan dan tuntutan jaman (Pohan, 2019). Dari dua pendapat tersebut jelas dipahami bahwa filsafat progresivisme menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki kelebihan yakni kecerdasan sebagai sarana (instrumen) dalam menjalani kehidupan secara baik dengan berbagai persoalan, hambatan serta tantangan yang dihadapi sepanjang sejarah peradaban manusia. Oleh karena itu, pendidikan memiliki peran penting dalam memfasilitasi semua peserta didik untuk dapat mengoptimalkan kecerdasan serta potensi alamiah yang dimiliki oleh siswa.

2.4.7. Landasan Teori Pembelajaran Berbasis Digital

Landasan teori pembelajaran dalam mengembangkan Buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender yang digunakan dalam penelitian yakni teori konstruktivisme. Menurut konstruktivisme siswa sebagai subyek mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka berdasarkan hasil interaksi siswa dengan lingkungan. Esensi dari teori konstruktivisme yakni proses pembelajaran merupakan proses asimilasi informasi baru dengan melakukan penyesuaian terhadap struktur pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sehingga sesuai dengan informasi baru yang diperoleh siswa (Degdilelis, 2005).

Pembelajaran secara digital dapat dilakukan dalam berbagai format antara lain: Menggunakan email untuk mengirim materi pembelajaran, penilaian, *feebeck* dan lainnya; grup sosial media untuk kelompok diskusi; *download* materi atau tutorial pembelajaran; pembelajaran secara interaktif menggunakan web; pembelajaran secara interaktif menggunakan MOO (*multiuser object oriented*) (Wulf, 1996 dalam Munir, 2017). Prinsip pembelajaran digital menurut Degdilelis (2005), terdiri dari:

Prinsip *logic tool* atau logika alat dimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran ditujukan untuk mempermudah siswa untuk belajar atau untuk mempermudah pembelajaran; prinsip *multiple interface* atau beragam “wajah” dalam hal ini pembelajaran tidak hanya dilakukan secara langsung namun juga dapat dilakukan dengan menggunakan beragam instruksi; Prinsip representasi ganda: Pengetahuan dalam konteks lingkungan pendidikan harus diekspresikan dengan banyak cara, melalui beberapa kerangka kerja yang saling berhubungan dan setara dari beragam sudut pandang.

Berdasarkan pendapat di atas, dipahami bahwa pembelajaran digital merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran untuk memfasilitasi pembelajaran sehingga lebih optimal dan relevan dengan karakteristik generasi Z.

Selain teori pembelajaran konstruktivisme, landasan teori belajar dalam pengembangan buku teks digital juga menggunakan psikologi kognitif (*cognitive psychology*). Teori pembelajaran penggunaan teori belajar psikologi kognitif berperan dalam menentukan bagaimana prinsip dan proses pembelajaran akan dilaksanakan, dan teori pembelajaran konstruktivisme digunakan dalam mempersiapkan materi pembelajaran digital yang disesuaikan dengan realitas konteks kehidupan siswa (Ally dalam Anderson, 2008).

2.4.8. Landasan Teori Belajar dalam Pengembangan Buku Teks Pendidikan Kewarganegaraan Digital Berbasis Kesetaraan Gender

Landasan teori belajar yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, teori belajar sosial yang dikembangkan oleh Jerome S Bruner. Menurut Bruner, belajar merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh seseorang setelah melalui tiga proses kognitif yakni proses memperoleh informasi baru yang diperoleh melalui bacaan, atau dari materi yang dijelaskan guru atau sumber lainnya; tahap selanjutnya yakni proses transformasi atas informasi yang diterima; dan tahapan terakhir yakni

proses pengujian dan ketepatan pengetahuan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Winayaputra, 2019). Tahap perkembangan kognitif yang dialami anak terdiri dari tiga tahap yakni tahap enaktif yakni tahap penyajian yang ditunjukkan melalui tindakan; tahap ikonik yakni tahap penyajian grafik serta gambar yang mengandung konsep tertentu; tahap simbolik yakni berkenaan dengan penggunaan bahasa dalam menyajikan konsep-konsep yang terstruktur secara hierarkhis dengan memberikan alternatif yang menyajikan berbagai gabungan (kombinatural) (Winayaputra, 2019). Buku teks sebagai bagian dari komponen yang terdapat dalam lingkungan sosial yakni pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan proses belajar siswa, pada tahap awal sebagai sumber informasi yang kemudian akan digunakan oleh pembaca yakni siswa untuk mentransformasi pengetahuan yang diperoleh dari buku teks yang dibaca. Buku teks perlu disusun dengan memperhatikan materi maupun gambar sebagai penunjang pemahaman siswa terhadap materi yang di pelajari.

Buku teks merupakan salah satu media yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran. Buku teks merupakan sarana belajar yang digunakan pada pendidikan formal baik di sekolah maupun perguruan tinggi untuk menunjang program pembelajaran yang telah ditentukan (Buckingham, 1958 dalam Tarigan & Tarigan, 2009). Buku teks PPKn digital berbasis kesetaraan gender merupakan salah satu media pembelajaran yang digunakan selain untuk memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran, juga memiliki tujuan khusus yakni untuk membentuk literasi kritis siswa dengan mengintegrasikan kesetaraan gender pada materi buku teks yang dikembangkan.

Teori lain yang digunakan sebagai dasar pengembangan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital yakni teori belajar sibernetik. Kata sibernetik berasal dari bahasa Yunani, "*kubernetes*" yang bermakna pengendali atau yang mengatur. Sibernetik berkaitan dengan bagaimana melakukan Sesutu dengan baik melalui kemampuan mengatur dan mengendalikan komunikasi. Menurut Wiener (1948), *cybernetics originally centred around control and communication in people and machines*. Perkembangan teknologi telah menjadikan manusia sangat terkait dengan teknologi, termasuk teknologi komunikasi. Dalam

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

Teori siberetik, komunikasi menghasilkan umpan balik, umpan balik ini berperan penting penting dalam merubah perilaku dan komunikasi. Menurut teori siberetik, siswa diposisikan sebagai pengamat yang dalam menjalani kehidupan berupaya menggambarkan salah satu domain realitas, dengan menyadari bahwa terdapat banyak domain realitas lainnya. Melalui pemahaman ini, maka tidak ada yang merasa memiliki kebenaran mutlak dalam memaknai dunia (Murray, 2006).

Teori belajar siberetik merupakan teori belajar yang menganggap bahwa teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya bisa digunakan untuk mengolah data, presentasi, membuat *database*, dan alat komunikasi. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk membentuk dan meningkatkan kemampuan pemecahan masalah peserta didik sehingga dapat menciptakan dan membangun pengetahuan baru. Selaras dengan prinsip teori siberetik bahwa belajar merupakan pengolahan informasi. Teori belajar siberetik berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan ilmu komunikasi, teori ini menjadikan proses belajar lebih mementingkan proses belajar dibanding hasil belajar (Yunus, 2018)

Salah satu prinsip pembelajaran siberetik yakni refleksi berupa umpan balik kontekstual yang berasal dari pembelajar. Teori siberetik penting digunakan dalam mengembangkan desain pembelajaran, termasuk dalam menyusun buku teks sehingga siswa dapat menjadi observer partisipatif yang reflektif (Scott, dkk, 2007). Melalui buku teks digital, siswa dapat mengelola informasi, menganalisis informasi, dan berpartisipasi untuk ikut menyelesaikan masalah berdasarkan informasi yang diperoleh.

2.5. Literasi Kritis Generasi Z

2.5.1. Konsep Literasi Kritis

Sebelum membahas mengenai literasi kritis, terlebih dahulu dibahas mengenai konsep literasi. Literasi berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam hal membaca dan penulisan teks. Adapun literasi kritis berkaitan dengan kemampuan menganalisis, mengkritik dan mengubah norma mengenai suatu sistem aturan maupun praktek kehidupan sehari - hari dengan menggunakan teknologi cetak maupun media komunikasi lainnya (Luke, 2004 dalam Luke, 2012). Literasi

kritis juga berkenaan dengan pengetahuan seseorang mengenai bagaimana peran bahasa dan pengetahuan dalam membentuk makna. Selain itu, literasi kritis berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memposisikan diri dalam kehidupan berdasarkan perilaku yang demokratis, bijaksana dan adil (Harstle, 2003). Literasi kritis bertujuan untuk membentuk warga negara yang bertanggung jawab yakni warga negara yang secara aktif melawan ketidaksetaraan dalam berbagai bentuk serta ketidakadilan sosial melalui tindakan nyata (Beck, 2005). Dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki peran dalam membentuk literasi kritis melalui berbagai proses interaksi dan komunikasi dan negosiasi mengenai makna yang dipertukarkan. Literasi kritis membentuk siswa untuk mampu merefleksikan dan menemukan sendiri persoalan yang disajikan dalam teks, materi diskusi, maupun dari tugas yang diberikan dan mampu mengkaitkan persoalan yang disajikan dengan realitas sosial yang lebih besar (Kuo, 2013). Jelas bahwa dalam menunjang sistem demokrasi, literasi kritis penting dimiliki oleh warga negara. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk literasi siswa sebagai calon warga negara dewasa.

Literasi kritis merupakan kemampuan membedakan bias yang terdapat dalam teks termasuk mampu mengidentifikasi, melakukan interogasi hierarkhi kekuasaan yang ada dibalik teks, dan diharapkan mampu mengatasi kesenjangan tersebut sehingga menciptakan kehidupan yang lebih demokratis (White, & Cooper, 2015). Literasi kritis menjadi pelindung bagi seorang individu untuk mengadvokasi diri sendiri dari berbagai ketidakadilan karena melalui literasi kritis, seseorang mempertanyakan mengenai sumber kekuasaan, posisi, tempat dalam kaitannya dengan realitas sosial, norma yang berlaku, hak istimewa yang dimiliki oleh suatu pihak, maupun ketidakadilan yang ditemukan atau diketahui oleh orang tersebut (Anderson, 2019). Di era digital yang membuka akses informasi tanpa batas telah membuka ruang yang sangat luas bagi setiap orang untuk mengakses informasi tentang semua hal tanpa ada batasan tempat dan waktu.

Literasi kritis merupakan suatu keterampilan dasar yang tidak hanya berkenaan dengan kemampuan memahami kode dan menulis, literasi kritis merupakan keterampilan untuk menilai pesan dibalik teks yang dibaca dikaitkan dengan realitas pembaca (Hull, 1993). Literasi kritis merupakan suatu literasi yang

berkaitan dengan kemampuan reflektif serta sikap kritis yang mempertanyakan bentuk maupun isi pesan yang terdapat pada media cetak maupun elektronik serta semua bentuk media komunikasi (Taylor, 1998 dalam Warnick, 2002). Literasi kritis secara eksplisit memiliki tujuan untuk melakukan kritik dan mendorong transformasi terhadap ideologi, budaya dan ekonomi, lembaga serta sistem politik dominan (Luke, 2012). Kemampuan dalam menghubungkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki dengan gagasan yang disajikan pada teks merupakan salah satu bentuk kemampuan literasi kritis (McLaughlin & DeVogd, 2004). Setiap wacana baik dinyatakan secara lisan maupun teks mengandung pesan yang tidak dapat dipisahkan dari pihak yang memproduksi atau menciptakan wacana tersebut. Kemampuan literasi kritis dapat mengetahui kepentingan apa dan siapa dibalik pesan yang terdapat pada wacana, dan apakah diorientasikan pada upaya mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak atau sebaliknya.

Literasi kritis merupakan alat untuk menciptakan kehidupan yang lebih adil, juga merupakan modal budaya yang membantu dalam memahami sejarah manusia sehingga dapat mendorong perubahan kehidupan yang lebih baik (Gregory & Cahill, 2009). Literasi kritis merupakan kemampuan memahami hubungan antara bahasa dan kekuasaan disemua aspek kehidupan baik berkaitan dengan kehidupan sosial, budaya, maupun praktek politik yang terdapat dalam suatu teks. Teks dipahami secara luas tidak hanya berkaitan dengan buku teks cetak atau yang tidak dicetak seperti gambar atau teks yang digunakan media populer, dan lainnya (Yoon, 2016). Agenda untuk mewujudkan demokrasi membutuhkan literasi kritis, karena literasi kritis berkenaan dengan pengetahuan seseorang bahwa terdapat kekuasaan yang beragam yang berada dalam kehidupan masyarakat dan berupaya untuk mewujudkan kehidupan setara, adil dan saling peduli atau saling mengasihi (Powell dkk, 2001). Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek penting dalam budaya manusia merupakan bahasa, dan melalui bahasa, berbagai nilai, maupun kepentingan yang saling tumpang tindih berupaya untuk diwujudkan. Diperlukan literasi kritis sehingga sistem demokrasi yang menjamin kebebasan berfikir dan berpendapat dapat terselenggara dengan baik yang bermuara pada kehidupan sosial yang adil bagi semua pihak.

Literasi kritis membantu siswa mampu menghubungkan materi yang di baca dengan realitas pengalaman hidup mereka dan secara aktif berpartisipasi dalam diskusi untuk memperdebatkan pemahaman mereka. Literasi kritis juga mendorong siswa untuk mengkritisi teks yang dibaca melalui diskusi dan berupaya memahami kekuatan atau pengaruh bahasa, dan memahami bahwa bahasa yang terdapat pada teks yang dibaca memiliki lebih dari satu pandangan sesuai dengan pengalaman dan pemahaman pembaca. Literasi kritis yang dimiliki siswa membangun kesadaran pada mereka bahwa meskipun mereka warga negara biasa, namun mereka memiliki hak yang melekat pada mereka dan mau berjuang sungguh-sungguh agar haknya dapat terpenuhi. Menurut Mansilla & Jackson (2011), literasi kritis berkenaan dengan:

Kemampuan melakukan investigasi atas realitas kehidupan; menggunakan beragam bahasa, sumber, media untuk mengidentifikasi dan menimbang bukti secara relevan; melakukan analisa, integrasi, dan melakukan sintesis terhadap bukti yang ada untuk mengkonstruksi bukti yang masuk akal; mengembangkan argumentasi berdasarkan bukti dan mampu mempertahankan kesimpulan yang dihasilkan; mengenali berbagai perspektif serta mampu mengidentifikasi pengaruh dari perspektifnya; mengenali perspektif orang lain serta mampu mengidentifikasi dasar perspektif tersebut; mampu menjelaskan pengaruh atas interaksi budaya; mampu mengartikulasi akses yang berbeda terhadap pengetahuan, teknologi dan sumber lain yang mempengaruhi kualitas hidup dan perspektif seseorang; mengkomunikasikan gagasan termasuk di dalamnya terdiri dari: mengenali dan mampu mengeskpresikan persepsi yang berbeda dari pendengarnya; mampu menjadi pendengar dan berkomunikasi secara efektif dengan orang dari berbagai latar belakang; memilih dan menggunakan teknologi serta media secara tepat untuk berkomunikasi dengan berbagai orang dengan beragam latar belakang; mampu merefleksikan bagaimana komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi pemahaman serta membangun kolaborasi dalam kehidupan yang saling terkait; mampu mengidentifikasi dan menciptakan kesempatan untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik secara individual atau kolektif; bertindak baik secara personal maupun kolektif untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik; melakukan refleksi atas kemampuan yang dimiliki untuk meningkatkan kehidupan yang lebih baik.

Literasi kritis membangun pemahaman siswa mengenai ketidakadilan sosial yang terjadi dan bagaimana mereka dapat berperan dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil untuk semua pihak. Hal ini menegaskan bahwa literasi kritis menguatkan demokrasi melalui pembentukan kompetensi *civic* pada siswa (Soares & Wood, 2010). Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa

literasi kritis berupaya untuk memahami makna dibalik teks yang di baca, dan menyadari adanya relasi kekuasaan dalam teks.

2.5.2. Landasan Filosofis Literasi Kritis

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori kritis. Teori kritis bertujuan untuk membangun emansipasi dan pencerahan, sehingga agen atau pembelajar menyadari bahwa terdapat paksaan yang tersembunyi sehingga membangun kesadaran diri agen untuk secara bebas memilih posisi yang diyakini terbaik bagi mereka (Geuss, 1981). Teks merupakan hasil konstruksi penulisnya. Penulis yang menentukan atau membuat keputusan atas pilihan kata yang akan digunakan dalam teks tersebut. Teks tidak ada yang netral karena setiap penulis teks memiliki perspektif tersendiri berkenaan dengan kepentingan yang ingin disampaikan melalui teks. Pembaca yang kritis berusaha menginterogasi atau mempertanyakan kepentingan siapa yang terdapat dalam teks, atau kekuasaan dibalik teks, serta siapa yang dirugikan, (Janks, 2018).

Di era postmodern, lembaga pendidikan harus mendorong sikap reflektif terhadap identitas seseorang (Herman dkk, 2018). Pendidikan merupakan suatu konstruksi dari realitas. Oleh karena itu, isi pengajaran harus memberi siswa kesempatan untuk membangun kreativitas dalam memahami realitas yang multidimensi. Isi pengajaran juga harus mendorong siswa untuk melakukan refleksi diri secara kritis (Mazirow, 1991 dalam Herman dkk, 2018). Berdasarkan berbagai pandangan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan perlu membangun kemampuan reflektif siswa sehingga dapat bersikap kritis serta bertindak untuk mendorong perubahan sosial yang lebih baik.

2.5.3. Urgensi Literasi Kritis dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang diorientasikan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki akhlak mulia, berkeadilan, demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan sangat terkait dengan upaya mewujudkan literasi kritis. Melalui kemampuan literasi kritis yang dimiliki siswa, membantu mereka dapat berpartisipasi mendorong kehidupan yang lebih adil dan demokratis. Terdapat dua aspek penting dalam literasi kritis yakni: Elemen evaluasi atau penilaian; dan obyek

yang evaluasi atau di nilai (Kim, 2014). Menurut Powell dkk, terdapat tiga asumsi dasar literasi kritis yaitu: Literasi tidak pernah netral, namun selalu terkait dengan ideologi atau perspektif tertentu; literasi kritis mendukung sistem demokrasi yang berlandaskan pada kesetaraan dan pengambilan keputusan secara bersama; literasi kritis memandang bahwa pembelajaran literasi menjadi sarana untuk memberdayakan peserta didik sehingga mendidik siswa sampai pada tindakan transformatif mewujudkan kehidupan yang demokratis (Powell dkk, 2001). Pendidikan Kewarganegaraan perlu ditunjang dengan literasi kritis sehingga siswa memiliki nilai hidup dan sikap yang kritis mendorong kehidupan yang demokratis, setara dan tidak ada kelompok minoritas yang dimarginalkan.

Menurut Bishop (2014), terdapat lima prinsip literasi kritis, yaitu:

Memobilisasi siswa sebagai aktor sosial sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan yang digunakan untuk tidak menerima begitu saja suatu kondisi atau realitas yang dipandang sebagai hal yang wajar, dengan mempertanyakan kondisi tersebut dari perspektif keadilan; dalam memahami suatu isu, siswa terlebih dahulu diajarkan untuk melakukan penelitian, analisis, dan interograsi dari berbagai perspektif; proses pendidikan dilakukan dengan melakukan identifikasi persoalan sosial politik yang dialami peserta didik; merancang dan melaksanakan tindakan kelas yang fokus pada upaya mewujudkan keadilan sosial; merefleksikan tindakan yang telah dilakukan untuk menghadirkan visi masa depan yang lebih baik dan lebih adil.

Selama ini sering ditemukan pendidikan pendidikan yang memposisikan siswa secara pasif, melalui literasi kritis siswa dilibatkan sebagai subyek atau agen sosial. Sebagaimana dinyatakan oleh Bishop, bahwa literasi kritis tidak semata-mata mengetahui realitas sosial, siswa juga mampu mempertanyakan secara kritis realitas tersebut berdasarkan nilai keadilan. Disamping itu, literasi kritis menjadi *guide* bagi siswa khususnya bagi siswa generasi Z yang selalu bersinggungan dengan berbagai informasi yang mudah di akses melalui teknologi informasi dan media sosial sehingga tidak terjebak atau terbawa isu atau berita tidak benar (*hoax*) karena sebelum siswa percaya kebenaran berita atau informasi, mereka terlebih dahulu mengkritisi berita tersebut melalui tahap analisis dan melihat dari berbagai perspektif.

Literasi kritis sangat penting dalam membangun kehidupan yang demokratis dan mendorong kehidupan yang lebih adil bagi semua pihak. Dalam hal ini,

Pendidikan tidak dapat memposisikan diri secara netral dengan mengabaikan realitas yang tidak adil. Literasi kritis berupaya mengangkat isu-isu tentang keadilan dan kesetaraan diseluruh kurikulum (Sweeney, 1999). Salah satu isu sosial yang dapat dikaitkan dengan literasi kritis yakni mengenai hak perempuan, melalui pembahasan tentang isu sosial dalam teks yang dibaca, siswa dapat mempelajari karakteristik isu tersebut dan menghubungkan dengan pengalaman mereka serta memposisikan secara kritis terhadap isu yang di baca (Soares & Wood, 2010). Dari pendapat tersebut, jelas bahwa berbagai persoalan ketimpangan dan ketidakadilan yang menjadi bagian dari realitas masyarakat dapat diminimalisir melalui pembentukan kemampuan literasi kritis siswa oleh institusi pendidikan, sehingga siswa siap menjadi warga negara dewasa yang aktif berpartisipasi merespon berbagai persoalan sosial sesuai dengan kapasitas masing-masing diberbagai bidang kehidupan.

Pendidikan diarahkan untuk memberdayakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat membangun persepsi kritis mengenai eksistensi mereka di dunia dan menemukan diri mereka dan menyadari bahwa dunia bukan merupakan realitas statis namun merupakan suatu realitas dinamis yang berada pada proses transformasi secara terus menerus (Freire, 2005). Berdasarkan pendapat tersebut, dipahami bahwa pendidikan berperan mendorong perubahan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis dan sejahtera. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat bersikap netral dengan menutup mata pada berbagai persoalan sosial yang menggambarkan ketidakadilan.

Pendidikan yang membentuk literasi kritis menghasilkan penerus bangsa yang partisipatif dan responsif terhadap berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat maupun bangsanya. Literasi kritis berkaitan dengan kemampuan untuk mengkritisi pengetahuan yang diperoleh, juga kemampuan untuk menciptakan pengetahuan berdasarkan refleksi atas realitas kehidupan yang dialami sehingga siswa sebagai subyek pendidikan berpartisipasi secara aktif dan terus menerus membangun pengetahuan atau pemahaman baru sesuai dengan pengalaman hidup mereka (Freire, 2005). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan demokrasi berkenaan dengan pembentukan kapasitas siswa dalam menilai,

menentukan pilihan dan melakukan tindakan atau berpartisipasi secara aktif di ranah publik dan politik (Stanton, 2016).

Pendidikan berperan untuk memahami hubungan antar masyarakat, tempat dan kelompok marginal seperti masyarakat miskin. Diperlukan kurikulum dengan agenda mewujudkan keadilan sosial melalui pembentukan literasi kritis dimana siswa dan guru mampu melakukan investigasi terhadap berbagai realitas sosial yang berubah dan memahami hubungan kekuasaan di dalamnya, bukan hanya pembelajaran yang memposisikan siswa secara pasif (Comber, 2015). Literasi kritis dapat menjadi salah satu luaran dari proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengingat pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang diorientasikan pada upaya membentuk karakter warga negara yang baik termasuk untuk membentuk warga negara yang demokrasi, menjunjung tinggi hak, serta mampu partisipatif di berbagai bidang kehidupan sehingga proses pembelajaran harus didukung dengan kurikulum yang menjunjung nilai demokrasi, buku teks juga digunakan untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk kapasitas siswa dalam menilai, menentukan pilihan dan melakukan tindakan atau berpartisipasi secara aktif di ranah publik dan politik (Stanton, 2016). Berdasarkan pendapat Stanton, dipahami bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu kanal demokrasi yang mempersiapkan warga negara untuk mampu mengidentifikasi persoalan sosial yang ada baik pada konteks lokal, nasional, maupun global serta turut ambil bagian atau berpartisipasi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Pendidikan Kewarganegaraan dewasa ini berperan dalam mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik dengan pemaknaan tradisional yakni berkenaan dengan relasi warga negara dan negara seperti nasionalisme, patriotisme, serta untuk dapat membentuk warga negara global dengan nilai dasar yang sama, terbuka terhadap perbedaan atau multikultur, termasuk untuk mendorong keadilan sosial, rekonstruksi sosial yang memberikan ruang yang adil bagi kelompok marginal, serta mewujudkan kehidupan demokratis. Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan sebagai pendidikan kritis atau pedagogi kritis yang mendorong siswa menjadi bagian dalam emansipasi dan transformasi untuk kehidupan mereka yang lebih baik dan lebih adil dimasa yang akan datang (Jhonson & Moris, 2010).

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

Berbagai pandangan yang dikemukakan di atas menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang berperan dalam pembentukan literasi kritis untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis. Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, siswa dididik untuk memahami peran mereka dalam konteks kehidupan beramasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta siswa di arahkan untuk berpartisipasi mewujudkan kemajuan bersama.

2.5.4. Konsep Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi yang lahir bersamaan dengan lahirnya internet. Generasi ini disebut juga sebagai *digital native*. Generasi Z merupakan generasi yang aktivitasnya didominasi oleh penggunaan internet, generasi ini berada pada jenjang sekolah menengah atas dan perguruan tinggi (Persada, dkk, 2019). Mereka memiliki perspektif, preferensi maupun ekpektasi yang berbeda dengan generasi sebelumnya, Pendekatan pembelajaran untuk generasi Z berpusat pada siswa (Talmon, 2019). Generasi Z merupakan generasi yang lahir pada pertengahan tahun 1990 hingga akhir tahun 2010, mereka terbiasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai orang di dunia sepanjang waktu (Turner, 2015). Dapat ditarik benang merah bahwa generasi Z merupakan generasi yang hidupnya tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi, karena sejak awal kehidupannya sudah *familiar* dengan teknologi informasi. Pembelajaran perlu dibekali dengan literasi kritis sehingga tidak menjadi korban berita, isu atau informasi yang tidak benar.

2.5.5. Karakteristik Generasi Z

Generasi Z atau *digital native* memiliki karakteristik terbiasa menerima informasi secara cepat; senang melakukan berbagai kegiatan pada waktu yang bersamaan; lebih senang membaca grafik dibanding membaca teks; lebih menyukai mengakses informasi secara acak (*hypertext*); mampu melakukan kegiatan secara optimal manakala terhubung dengan internet; cepat puas dan memperoleh banyak penghargaan; lebih menyukai *game* daripada melakukan aktivitas serius (Prensky, 2001). Selain itu, generasi Z memiliki karakteristik kreatif; memiliki jiwa kewirausahaan; bersikap adil; berorientasi pada tujuan; belajar dari pengalaman langsung; memiliki ekspektasi tinggi; memiliki beragam tugas; personalisasi

pengalaman sehari-hari; pragmatis; mampu memperoleh informasi secara mandiri; percaya diri; fokus pada pembentukan keterampilan; berjejaring melalui media sosial; memiliki kemampuan bercerita; memiliki kepercayaan diri atau yakin; maju dalam karir (Scwieger & Ladwig, 2018). Sebagai generasi yang hidup sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, generasi Z mengakses informasi secara mudah dan dari berbagai sumber, kondisi ini perlu dibarengi dengan literasi kritis sehingga mereka tidak mudah mempercayai beragam informasi yang diperoleh.

Implikasi karakteristik generasi Z, antara lain: Paham teknologi, tumbuh bersama dengan teknologi, teknologi mempengaruhi semua aktivitasnya termasuk apa yang mereka lakukan dan mereka beli; mengandalkan mesin pencari dalam memperoleh informasi; tertarik dengan multimedia untuk berbagai keperluan baik hiburan, *game*, musik, video, dll; membuat konten melalui berbagai bentuk baik foto, video, dan lainnya yang di *upload* melalui *youtube*; bekerja dengan cepat dalam melakukan berbagai kegiatan dengan mengakses teknologi informasi; belajar secara induktif yakni lebih menyukai belajar dengan melakukan (*learning by doing*) dibandingkan harus mengikuti apa yang harus dilakukan atau dibaca; belajar melalui proses *trial and error*, belajar bagi mereka seperti sedang bermain *game* dan mencoba menyelesaikan tantangan yang dihadapi; dapat melaksanakan kegiatan secara bersamaan dalam semua hal; memberikan perhatian secara singkat karena mereka terkait dengan banyak aktivitas; terbiasa melakukan komunikasi secara visual karena kemudahan teknologi; sangat membutuhkan interaksi sosial tatap muka, karena intensitas penggunaan teknologi komunikasi yang sangat tinggi; terbuka secara emosional karena terbiasa berinteraksi dengan orang baru, mudah berkomunikasi dengan beragam orang, dll; hidup dalam keberagaman dan multikultur; menyukai kerja tim dan kolaborasi; berupaya untuk menjalani pola hidup sehat; merasa tertekan untuk dapat mencapai kesuksesan; secara terus menerus mencari umpan balik untuk mencapai prestasi optimal; terbiasa dengan kepuasan yang bersifat instan; memberikan respon secara cepat dan berharap sebaliknya yakni memperoleh respon yang cepat atas informasi yang diperlukan; lebih suka mengetik dibandingkan dengan menulis manual dengan tangan (Berk, 2009). Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Berk, dapat dipahami bahwa dengan karakteristik yang dimiliki generasi Z, diperlukan kemampuan berfikir

kritis dan literasi kritis sehingga keputusan cepat yang selalu dilakukan setiap saat oleh generasi Z termasuk berkaitan dengan respon mereka pada informasi yang di terima dilandasi oleh pemikiran dan hasil analisis kritis.

Setiap generasi memiliki tantangan dan dinamika masing-masing, yang mempengaruhi karakteristik generasi tersebut. Berikut ini ditampilkan perbedaan karakteristik generasi X, Y, dan generasi Z.

Tabel 2.2 Perbedaan Karakteristik Generasi X, Y, dan Generasi Z

Perspektif	Gen X Busters	Gen Y Millenials	Gen Z Digital Native
Tahun lahir	1965-1980	1981-1994	1995-2010
Pandangan hidup	Terkait dengan diri (<i>Relate to me</i>)	Hidup merupakan hiburan (<i>Life is a cafeteria</i>)	Membuat perbedaan (<i>Make a difference</i>)
Pandangan terhadap otoritas	Abaikan mereka	Pilih mereka	Bekerja dengan meraka
Pandangan terhadap relasi sosial	Peduli	24/7	Peduli
Sistem nilai	Media	Seputar belanja	Berfikir terbuka
Pandangan terhadap karir	Tidak menyenangkan	Tempat untuk mengabdikan	Tempat untuk menyelesaikan masalah
Pandangan terhadap teknologi	Bersenang-senang dengan teknologi	Memanfaatkan teknologi	Hidup dengan teknologi
Pandangan terhadap masa depan	Putus asa atau tidak ada harapan	Optimis	Menyelesaikan masalah yang ada (<i>solve it</i>)

Sumber: Mohr & Mohr, 2017.

Tabel tersebut menunjukkan perbedaan karakteristik masing-masing generasi. Generasi X memiliki karakteristik fokus pada pencapaian diri, memiliki sikap peduli terhadap sesama, disamping itu generasi X cenderung tidak peduli dengan penguasa serta memandang masa depan secara pesimistis, mereka memiliki pandangan kurang positif mengenai karir dan mereka menjadikan teknologi hanya sebagai sarana untuk bersenang-senang saja.

Generasi Y memiliki karakteristik yang lebih santai, kehidupan dipandai sebagai sebagai waktu untuk bersenang-senang, sikap mereka terhadap pemerintah disesuaikan dengan kepentingan mereka, jika mengakomodir kepentingan mereka maka otoritas pemerintah akan didukung, sebaliknya, jika kepentingan mereka

tidak diakomodir, maka akan memilih untuk berseberangan (oposisi) dengan pemerintah, dapat dipandang memiliki kepedulian besar pada lingkungan sosial, pekerjaan dipandang sebagai kesempatan untuk mengabdikan pada masyarakat, dan teknologi dipandang sebagai pemberi informasi, selain itu, generasi Y memiliki pandangan optimis terhadap masa depan.

Generasi Z memiliki karakteristik melihat kehidupan dari berbagai perspektif, mereka juga tidak mengambil jarak dengan otoritas, namun berkolaborasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan berbagai persoalan, generasi ini memiliki kepedulian tinggi pada masyarakat, akses informasi melalui teknologi yang menjadi bagian dari kehidupan mereka menjadikan mereka memiliki nilai hidup dan sikap terbuka terhadap berbagai perbedaan. Bagi mereka, berkarir merupakan bentuk kontribusi mereka untuk menyelesaikan persoalan, teknologi merupakan bagian dari keseharian mereka, dan mereka berupaya mengatasi masalah yang ada.

Karakteristik generasi Z dalam hal keuangan bersikap konservatif, pragmatis, dalam memahami persoalan fokus pada akar masalah bukan gejala yang tampak. Generasi Z juga memiliki sifat ingin melakukan transformasi budaya dibandingkan mewujudkan transformasi pada karir yang memberikan keuntungan finansial, generasi ini juga memiliki sifat realistis (Carter, 2018). Mengenai rentang waktu antara satu generasi dengan generasi lain dikategorikan sebagai berikut: 1). Kaum tradisional yang lahir antara 1928 dan 1944; 2). *The Baby Boomers* (Boomers), lahir antara tahun 1945 dan 1965; 3). Generasi X, lahir antara tahun 1965 dan 1979; 4). Generasi Y (milenial), lahir antara 1980 dan 1995; 5). Generasi Z (*post-millennials, iGen*), lahir setelah 1995; 6). Generasi Alfa atau Google Kids lahir di antaranya 2010 dan 2025 (De-Menendez dkk, 2020).

Generasi tradisional merupakan generasi yang lahir di akhir perang dunia kedua. Adapun generasi Boomers merupakan generasi setelah perang dunia kedua, mereka menghadapi berbagai keterbatasan dan kesulitan akibat perang, kondisi ini mempengaruhi karakteristik mereka; generasi X merupakan generasi yang lahir setelah masa sulit akibat perang berakhir, generasi Y atau millennial merupakan generasi yang lahir pada perubahan abad; generasi Z merupakan generasi yang lahir sejalan dengan munculnya internet, dan generasi *alfa* merupakan generasi yang

sangat lekat dengan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berdasarkan penjabaran tersebut, dipahami bahwa generasi Z merupakan generasi dengan karakteristik terbuka, responsif, dan hidup berorientasi pada penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan mereka.

Seemiller & Grace (2019) menyatakan bahwa generasi Z memiliki karakteristik sebagai berikut:

Pertama, memiliki integritas yang tinggi dan ditunjukkan dengan sikap dan perilaku jujur; adil; loyal; tanggung jawab; serta mampu memberikan penilaian secara baik; *dua*, terbuka, yakni kreatif; berfikir terbuka; humoris; memiliki sifat petualangan; memiliki spontanitas; terbiasa mengambil perspektif; toleran; *tiga*, memiliki keteguhan hati yang tercermin pada sifat memiliki rasa penasaran; kerja keras; motivasi; memiliki tekad bulat; kompetitif; menggerakkan; *empat*, memiliki karakteristik peduli yang ditandai dengan mampu memahami orang lain; tulus; kasih sayang; baik hati.

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat dipahami bahwa setiap generasi memiliki karakteristik yang khas sesuai dengan perkembangan zamannya, begitu pula dengan generasi Z yang memiliki karakteristik terbuka, kreatif, peduli serta berbagai karakteristik positif lainnya yang dipengaruhi oleh keterkaitan generasi tersebut dengan teknologi digital khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

2.5.6. Pendekatan Pendidikan untuk Generasi Z

Generasi Z merupakan generasi yang sangat lekat dengan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini juga mempengaruhi proses belajar yang mereka jalani. Generasi Z belajar tidak hanya dari informasi yang diberikan guru, mereka juga dengan mudah mengakses informasi berkenaan dengan materi pelajaran dari berbagai macam sumber yang diakses dari teknologi informasi yang mereka miliki. Penggunaan berbagai sumber untuk memperkaya informasi harus diikuti dengan literasi kritis sehingga mereka dapat secara tepat memilih dan menggunakan informasi dari sumber yang benar dan yang memberikan perspektif yang beragam dengan mengakomodir berbagai kepentingan tanpa adanya pihak yang dimarginalkan. Berikut disajikan gambaran persepsi siswa (gen Z) dan guru dari generasi yang berbeda, dan upaya menjembatani perbedaan menurut Cilliers (2017), sebagai berikut:

Tabel 2.3 Perbedaan Persepsi Siswa (Gen Z) dan Guru

Pandangan siswa (generasi Z)	Pandangan guru	Upaya menjembatani perbedaan
Mengetahui bahwa mereka memiliki pengetahuan mengenai teknologi yang lebih baik dari pengajar mereka	Menyadari bahwa mereka mengajar siswa yang memiliki pengetahuan mengenai teknologi yang lebih banyak	Pengajar perlu menggunakan pendekatan kreatif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, media digital, teknologi dan sosial.
Mampu mengakses informasi secara cepat karena selalu terhubung dengan internet	Menggunakan teknologi secara terbatas dalam pembelajaran.	Internet dijadikan sebagai sarana komunikasi dalam membuat keputusan kelompok, sehingga teknologi komunikasi berperan dalam menguatkan keterkaitan antar anggota kelompok
Menghendaki penggunaan teknologi yang lebih banyak pada sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran	Adanya pemahaman bahwa media sosial dapat dijadikan sebagai strategi pembelajaran, namun tidak memahami bagaimana memulainya.	Melakukan penelitian untuk mengetahui efek media sosial terhadap pembelajaran tradisional
Minat terhadap ujian <i>online</i> maupun bahan ajar <i>online</i> meningkat	Meyakini bahwa metode tradisional baik ujian tertulis atau tatap muka merupakan strategi terbaik	menggunakan perangkat lunak untuk mendukung pembelajaran.
Lebih menyukai pembelajaran yang mengutamakan kontak antar siswa secara <i>daring</i>	Lebih menyukai pembelajaran kontak langsung	Pembelajaran memanfaatkan metode pembelajaran visual dan kreatif.
Lahir di era internet dan tidak memahami adanya perbedaan pandangan yang berbeda	Tidak sepenuhnya memahami karakter generasi Z, namun berupaya untuk memahaminya	Beberapa pengajar memerlukan bantuan dalam mentransformasi pembelajaran tradisional.

Sumber: Cilliers, 2017.

Berbagai gambaran tentang generasi Z di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu disesuaikan dengan karakteristik peserta didik sehingga pendidikan dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa.

2.6. Penelitian yang Relevan

2.6.1. Penelitian yang Relevan dengan Buku Teks, Buku Teks Digital, dan Buku Teks Berperspektif Gender

- 1). Kim Foulds Tahun 2013, dengan judul: *The Continue of Identities in Colonial Curricula: Kenyan Students Perceptions of Gender in School Textbook*. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana persepsi siswa terhadap gambaran yang terdapat dalam buku teks yang digunakan di sekolah dikaitkan dengan realitas kehidupan mereka masing-masing khususnya berkenaan dengan kehidupan di ruang privat dan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z

memiliki pendapat bahwa isi buku teks tidak lepas dari identitas gender, dan gambaran transformatif perempuan yang disajikan dalam buku teks tidak sesuai dengan realitas kehidupan mereka.

- 2). Marie Carson & Tuba Kanci tahun 2016, dengan judul: *The Nationalized and Gendered Citizen in a Global World – Examples From Textbooks, Policy and Steering Documents in Turkey and Sweden*. Penelitian ini membandingkan buku teks studi sosial seperti kewarganegaraan, geografi, agama, dan sejarah pada negara Turki dan Swedia yang digunakan tahun 2012 kelas 6-7 dengan menggunakan perspektif gender. Temuan dalam penelitian ini, sebagai berikut: Buku teks yang diteliti dari Negara Swedia maupun Turki keduanya menunjukkan bahwa perempuan tidak hadir dalam sejarah negara tersebut. Buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang diteliti dari Negara Turki menunjukkan nasionalisme yang berbasis pada budaya etnisitas, dengan memposisikan warga negara sebagai pelayan negara untuk memperoleh perlindungan dari musuh, dan buku teks cenderung mengabaikan perbedaan dengan mengesampingkan keberadaan minoritas; sedangkan buku teks yang digunakan di Negara Swedia menyajikan nasionalisme yang mengandung penghormatan terhadap nilai demokrasi termasuk kesetaraan kewarganegaraan perempuan dan laki-laki. Disamping itu, diketahui bahwa Turki mendefinisikan kewarganegaraan berdasarkan pada budaya etnisitas, sedangkan Swedia mengacu pada kebudayaan dan kewargaan. Kewarganegaraan dari perspektif gender berbeda pada kedua negara, meskipun tampak ada perubahan narasi yang memberikan ruang bagi perempuan untuk menempati posisi yang lebih setara dengan laki-laki.
- 3). Hayat Aoumeur. 2014. Judul artikel: *Gender Reperesentations in Three School Textbooks: A Feminist Critical Discourse Analysis*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis buku teks yang digunakan pada kelas 6-10 sekolah dasar di Algeria. Hasil analisis terhadap buku teks yang diteliti menunjukkan bahwa buku teks masih menyajikan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan peran gender tradisional, yang menunjukkan adanya pemisahan tegas antara perempuan dan laki-laki, serta adanya stereotip atas dasar gender.

- 4). Hazir Ullah, Johar Ali, Arab Nas. 2014. Judul artikel: *Gender Representation in Children's Books: A Critical Review of Empirical Studies*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks baik yang terdapat di negara maju maupun berkembang masih mengandung stereotip gender; bias gender dalam buku teks mempengaruhi pemahaman siswa mengenai diri dan masyarakatnya.
- 5). Aim Abdulkarim, Kokom Komalasari, Didin Saripudin, Neiny Ratmaningsih, & Diana Noor Anggraini. 2020. Judul artikel: *Development of A Unity in Diversit y- Based Pancasila Education Text Book for Indonesian University*. Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang ditujukan untuk mengembangkan model buku teks Pendidikan Pancasila berbasis Bhineka Tunggal Ika atau “kesatuan dalam keberagaman”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual model kesatuan dalam keberagaman pada buku teks Pendidikan Pancasila dapat digunakan dan sangat sesuai dengan isu-isu yang berkenaan dengan keberagaman yang saat ini terjadi di Indonesia; adapun konten buku teks yang dikembangkan terdiri dari : judul bab; pendahuluan; kata kunci dan peta konsep; penyajian materi yang dielaborasi dengan nilai kebhinekaan; unjuk kompetensi; kesimpulan; refleksi; penilaian otentik; umpan balik; dan kegiatan lanjutan.
- 6). Ann Emerson. 2018. Judul Artikel: *The Making of (Il) Legitimate Citizen: The Case of the Pakistan Studies Textbook*. Penelitian ini merupakan analisis kritis terhadap buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan pada kelas 9 dan 10 sekolah menengah pertama di Islamabad. Hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi dalam buku teks cenderung menyajikan identitas tunggal yang mengesampingkan keberadaan kelompok lain termasuk perempuan. Buku teks mengandung kekerasan budaya yang berpotensi menjustifikasi kekerasan struktural dan kekerasan yang diarahkan langsung pada individu warga negara.
- 7). Yaghoob Foroutan. Tahun 2012. Judul artikel: *Gender Representation in School Textbook in Iran: The Place of Language*. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten baik konten yang termanifestasikan maupun konten yang bersifat laten terhadap buku teks Bahasa Persia, Inggris, dan Arab. Dasar

teori untuk melakukan analisis buku teks menggunakan teori sosialisasi, yakni bagaimana proses sosialisasi dalam pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam memastikan penghormatan terhadap kesetaraan gender; semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin didominasi oleh laki-laki; konten buku teks pada jenjang pendidikan dasar menunjukkan representasi laki-laki dan perempuan yang setara, konten buku teks pada jenjang yang lebih tinggi, representasi perempuan semakin berkurang, dan cenderung didominasi laki-laki; struktur sosial dan ideologi menjadi penentu representasi gender dalam sistem pendidikan termasuk dalam buku teks.

- 8). Kazi Md. Islam & M. Niaz Assadullah. 2018. Judul artikel: *Gender Stereotype And Education: A Comparative Analysis Content of Malaysian, Indonesiaan, Pakistani, and Bangladeshi School Textbook*. Penelitian ini berupaya melakukan komparasi terhadap hasil analisis konten buku teks Bahasa Inggris untuk sekolah menengah pertama yang diterbitkan pemerintah pada beberapa negara antara lain: Malaysia, Indonesia, Pakistan dan Banglades. Menggunakan analisis kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua buku teks yang dianalisis mengandung bias gender yang didominasi oleh karakter laki-laki baik dalam teks maupun ilustrasi atau gambar. Karakter perempuan berada pada posisi subordinat secara kuantitatif maupun kualitatif. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa peran gender tradisional masih kental disajikan dalam buku teks dimana laki-laki ditunjukkan berperan dalam ranah publik dan profesional dengan karakteristik yang aktif, sedangkan perempuan berperan pada ranah domestik dan cenderung digambarkan dengan karakter yang pasif. Secara kuantitatif, presentase karakter perempuan pada teks dan gambar di Indonesia dan Malaysia yakni 44,4% dan 44,1%, sedangkan untuk Pakistan dan Banglades sebesar 24.4% dan 37.3%.
- 9). Lisa Okeefe. 2013. Judul artikel: *A Frame work to Analysis of Textbook*. Penelitian ini menggunakan analisis konten buku teks Matematika yang digunakan di Irlandia. Hasil analisis menunjukkan bahwa buku teks memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Untuk mencapai efektivitas buku

teks, perlu memperhatikan empat hal, yakni: Konten buku teks, struktur buku, ekspektasi, dan bahasa yang digunakan dalam buku teks.

- 10). Kokom Komalasari, & Sapriya. 2016. *Living Values Education in Teaching Materials to Develop Civic Disposition*. Penelitian ini mendeskripsikan pengembangan model buku teks Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan nilai hidup (*living values*) dengan subyek penelitian mahasiswa pada perguruan tinggi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *living values* dapat diintegrasikan dalam materi pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan; kerangka pengembangan buku teks Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari pembukaan, kata kunci, peta konsep, materi, diskusi, nilai hidup (*living values*), kesimpulan, refleksi penerapan nilai hidup (*living values*), dan referensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model *living values* dalam materi pengajaran efektif membentuk *civic disposition* peserta didik.
- 11). Hazir Ullah & Christine Schelton. 2013. *Gender Representation in The Public Sector Schools Textbooks of Pakistan*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk melakukan analisis konten mengenai representasi perempuan pada buku teks baik dalam teks/materi dan gambar pada 24 buku teks mata pelajaran Urdu, Bahasa Inggris, dan studi sosial yang digunakan di kelas 1 hingga kelas 8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya yang dilakukan oleh kementerian Pendidikan yang bekerja sama dengan organisasi internasional untuk mewujudkan pendidikan yang adil gender termasuk dalam buku teks, namun buku teks secara ideologis masih mengandung unsur ketidaksetaraan gender yang tercermin dari konten buku teks yang masih didominasi oleh karakter laki-laki dan representasi karakter perempuan masih rendah. Salah satu pemicu persoalan tersebut yakni aspek penyusun kurikulum dan penyusun buku teks yang masih belum memiliki pemahaman akan kesetaraan gender.
- 12). Budi Setyono. 2018. *The Portrayal of Women in Nationally - Endorsed English as A Foreign Language (EFL) Textbooks for Senior High School Students in Indonesia*. Latar belakang Penelitian ini yaitu temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa buku teks mengandung bias gender. Penelitian ini

dilakukan untuk menganalisis konten buku teks Bahasa Inggris yang digunakan di sekolah menengah atas kelas X, XI, dan XII di Indonesia. Menggunakan perspektif feminis kritis, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter perempuan dan perannya sebagai bagian dari masyarakat yang disajikan dalam buku teks masih mengandung stereotip dan bias gender. Meskipun demikian, terdapat konten yang memunculkan gambaran karakter perempuan yang konstruktif. Berdasarkan temuan ini, diketahui bahwa buku teks perlu ditunjang dengan materi yang memperhatikan kesetaraan gender termasuk menyajikan ilustrasi atau gambar perempuan dan laki-laki secara setara baik dari segi jumlah maupun relasi antar keduanya.

- 13). Magdalena Cupjak & Violetta Copinska. 2015. Judul artikel: *Discrimination in The Courses of Polish Textbooks Dedicated to The Civic Discourse*. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis kritis terhadap gambar yang terdapat pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas Menengah Atas dengan tema tentang hak asasi manusia, perlindungan hak dan kebebasan, dan pendidikan dan pekerjaan di Polandia dan Uni Eropa. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Analisis dilakukan terhadap 283 foto atau gambar yang menampilkan 388 individu dan 60 kelompok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambar didominasi oleh ras kulit putih yakni 67.5%, kelompok didominasi oleh kulit berwarna yakni 50%. Selain itu, berdasarkan perbedaan jenis kelamin, gambar didominasi oleh laki-laki kulit putih dan berwarna yakni sekitar 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa, lembaga pendidikan yang seharusnya mempromosikan nilai penghargaan terhadap keberagaman dan nilai kesetaraan, ternyata dalam realitanya masih menunjukkan representasi yang tidak setara dan menunjukkan dominasi suatu kelompok.
- 14). Somaye Sarvarsade & Christin Min Wotipka, tahun 2017. Judul Artikel: *The Rise, Removal, and Return of Woman: Gender Representations in Primary Level Textbooks in Afganistan 1980-2010*. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari representasi gender pada buku teks Seni Bahasa Dari (DLA) yang digunakan pada kelas satu dan dua sekolah dasar di Afganistan sejak tahun 1980 hingga 2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan

melakukan analisis konten terhadap teks dan gambar yang terdapat pada buku teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa Republik Demokrasi Afganistan yakni dari tahun 1978-1992, representasi gender pada buku teks DLA menunjukkan kesetaraan atau egaliter antara laki-laki dan perempuan. Sejak tahun 1992 di bawah pemerintahan Islam Afganistan, terdapat perubahan ideologi yang mempengaruhi representasi perempuan dalam buku teks, yakni representasi perempuan dalam buku teks sangat rendah atau dikesampingkan; sejak tahun 2000 di bawah Pemerintah Republik Islam Afganistan representasi perempuan pada buku teks Kembali muncul. Namun, representasi perempuan di dalam buku teks secara kualitatif dan kuantitatif kurang egaliter dibandingkan pada saat pemerintahan demokrasi Afganistan tahun 80an. Dinamika representasi perempuan dalam buku teks di Afganistan tidak dapat dilepaskan dari pandangan politik dan agama yang sangat kaku. Dimasa yang akan datang, buku teks yang digunakan di sekolah diharapkan memiliki *benchmark* yang dapat mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan.

- 15). Mana Nakagawa & Christine Min Wotipka. Judul artikel: *The Word Wide Incorporation of Woman and Woman Rights in Social Sciences Textbook 1970-2008*. Penelitian ini melakukan analisis bagaimana perubahan terhadap representasi perempuan dan hak perempuan di dalam buku teks pada 74 negara dari tahun 1970-2008. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dilakukan pada 500 buku teks mata pelajaran studi sosial yang digunakan pada Sekolah Menengah Pertama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebutan perempuan dan hak perempuan pada buku teks meningkat secara global sepanjang waktu. Kesimpulan penelitian ini bahwa representasi perempuan dan hak perempuan dalam buku teks dipengaruhi oleh berbagai faktor internal yang terjadi pada masing-masing negara dan faktor eksternal yakni dinamika global atau transnasional. Faktor internal yang mempengaruhi representasi perempuan dan hak perempuan dalam buku teks antara lain pembangunan ekonomi, politik dan sosial di negara tersebut. Kesempatan untuk mendorong peningkatan representasi perempuan dalam pendidikan dan khususnya dalam buku teks terdapat dimana-mana.

- 16). Jessica J Good, Julie A Woodzicha, Laylan C Wingfield. 2010. Judul artikel: *The Effects of Stereotypic and Counter Stereotypic Textbook Image on Science Performance*. Latar belakang penelitian ini yakni hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan representasi perempuan dalam berbagai buku teks lebih rendah dibanding laki-laki. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya untuk menginvestigasi dampak gambar yang mengandung stereotip gender dan gambar yang tidak mengandung stereotip gender pada buku teks terhadap tingkat pemahaman dan kecemasan siswa Sekolah Menengah Atas yang diteliti. Menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini melibatkan 81 siswa kelas 9-10 sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa laki-laki yang membaca buku teks dengan gambar yang mengandung stereotip gender memperoleh skor pemahaman yang lebih tinggi dibanding dengan hasil skor setelah membaca buku teks dengan gambar yang tidak mengandung stereotip gender; sebaliknya, siswa perempuan memperoleh skor pemahaman yang lebih baik ketika melihat gambar yang tidak mengandung stereotip gender, dan sebaliknya hasil skor lebih rendah ketika melihat gambar yang mengandung stereotip gender. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gambar yang digunakan pada buku teks memberikan pengaruh terhadap pemahaman siswa.
- 17). Christine Woysner, Tahun 2006. Judul artikel: *Picturing Woman: Gender, Image, and Representation in Social Studies*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara kritis bagaimana representasi perempuan pada gambar buku teks studi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui analisis kritis terhadap gambar yang digunakan pada buku teks, kesadaran siswa akan representasi perempuan semakin meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa representasi perempuan dalam buku teks berperan dalam membangun kesetaraan gender, dan studi sosial memiliki peran penting dalam mempersiapkan warga negara yang menjunjung tinggi kesetaraan gender.
- 18). Che Cheung Ruby Yang. 2016. Judul artikel: *Are Male and Female Stilled Portrayed Stereotypically? Visual Analysis of Gender in Two Hong Kong Primary English Language Textbook Series*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui representasi perempuan dan laki-laki pada ilustrasi di dalam buku

teks Bahasa Inggris pada sekolah dasar di Hongkong. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif terhadap gambar yang terdapat pada buku teks yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilustrasi yang menggambarkan karakter laki-laki dan perempuan dalam buku teks masih dikaitkan dengan atribut gender tradisional yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki sebagai feminin dan maskulin. Rekomendasi dari hasil penelitian yakni untuk penulis buku dan ilustrator buku teks perlu memperhatikan representasi karakter laki-laki dan perempuan yang seimbang pada ilustrasi yang digunakan dalam buku teks.

- 19). Qaisah Khan, Nighat Sultana, Qasim Bughio, Arab Naz. 2014. Judul artikel: *Role of Language in Gender Identity Formation in Pakistani Schools Textbooks*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran bahasa yang digunakan pada buku teks dalam mengkonstruksi identitas gender. Penelitian ini merupakan analisis buku teks dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum materi buku teks menyajikan nilai, norma, dan kebiasaan masyarakat yang mencerminkan peran, fungsi dan tanggungjawab yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki berdasarkan peran gender tradisional. Secara khusus, bahasa yang digunakan dalam buku teks menegaskan maskulinitas dan feminitas dengan relasi yang tidak setara.
- 20). Caylay Burton. Tahun 2020. Judul artikel: *Gender Disrupted During Story Time: Critical Literacy in Early Childhood Education*. Artikel ini berupaya mengetahui keterkaitan antara proses belajar membaca pada anak dengan sosialisasi gender pada anak. Penelitian ini merupakan suatu kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akan gender melalui buku cerita bergambar mendorong keterampilan sosial anak seperti kepercayaan diri, kemampuan mengadvokasi diri sendiri, serta mampu berempati terhadap orang lain.
- 21). Marti Hope Gonzales, Eric Riedel, Ian Williamson, Patricia G. Avery, John L Sullivan, Anggela Bos. 2004. *Variations of Citizenship Education: A Content Analysis of Rights, Obligations, and Participation Concepts in High School Civic Textbooks*. Artikel ini merupakan analisis konten secara kuantitatif terhadap buku teks Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Atas.

Analisis menggunakan tradisi liberal, republikan, atau komunitarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa materi buku teks hanya menunjukkan partisipasi warga negara pada kegiatan politik hanya pada saat pemilu, sedangkan partisipasi politik selain keterlibatan dalam pemilu tidak muncul di dalam buku teks.

- 22). Nurdan Kalayci & Fahriye Hayirsever. Tahun 2014. Judul artikel: *An Analysis of Citizenship & Democracy Education Textbook in The Context of Gender Equality and Determining Student's perception on Gender Equality*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara materi mengenai kesetaraan gender pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan dengan realitas yang berlangsung pada kegiatan pembelajaran. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pendapat siswa tentang kesetaraan gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembahasan tentang kesetaraan gender pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan tidak memperkuat kesadaran gender siswa, karena siswa menghubungkan kegiatan yang dilakukan dengan peran gender yang melekat pada laki-laki dan perempuan.
- 23). Anna Mickosvska-Relevka. Tahun 2019. Judul Artikel: *Civic Education For Democratic Citizens: To What Extent Do Civic Education Curricula And Textbooks Establish Foundations For Developing Active Citizens In The Republic Of Macedonia?* Penelitian ini menggunakan metode analisis konten terhadap dokumen kurikulum dan buku teks. Tujuan penelitian yakni untuk melakukan analisis kritis terhadap kurikulum dan buku teks dilihat dari pembentukan kompetensi kewarganegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum dan buku teks Pendidikan kewarganegaraan terdapat upaya untuk membentuk kompetensi kewarganegaraan baik dalam pengetahuan sikap, nilai dan perilaku.
- 24). Siv Fahlgren & Lena Sawyer. Tahun 2011. Judul artikel: *The Power Of Positioning: On The Normalization Of Gender, Race/Ethnicity, Nation And Class Positions In A Swedish Social Work Textbook*. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana dan teori *Positioning*, yang fokus pada posisi penulis melalui alur cerita yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi penulis menentukan perbedaan teks yang

berkaitan dengan normalisasi gender, ras, etnis atau kelas. Hasil analisis menunjukkan bagaimana pengorganisasian buku memposisikan lebih istimewa suatu cerita tertentu, dengan menyajikan penelitian gender pada bagian khusus buku dan menjadikannya sebagai perspektif.

- 25). Mehari Yimulaw Gebregeorgis. Tahun 2016. Judul artikel: *Gender Construction Through Textbooks: The Case of an Ethiopian Primary School English Textbook*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gender dikonstruksi pada buku teks Bahasa Inggris kelas empat di Etiopia. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan analisis wacana kritis menggunakan model tiga dimensi Fairclough's. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks yang digunakan menggambarkan upaya untuk mempertahankan konstruksi gender sebagaimana tatanan yang sudah ada. Di sisi lain, terdapat upaya untuk mengkonstruksi tatanan baru yang mendorong kesetaraan gender.
- 26). Ronak Karami. Tahun 2020. Judul artikel: *Gender Bias in Persian Literature Textbooks*. Penelitian ini bertujuan untuk mengobservasi stereotip gender pada buku teks sastra yang digunakan di Sekolah Menengah Atas Persia, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui sejauhmana buku teks tersebut menunjukkan ideologi gender, berdasarkan nilai Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks mengandung bias gender yang menunjukkan keberpihakan pada laki-laki, perempuan tidak terwakili baik pada judul, dialog, cerita, maupun gambar.
- 27). Dionysios Gouviyas & Christos Alexopoulos. Tahun 2016. Judul artikel: *Sexist Stereotypes In The Language Textbooks Of The Greek Primary School: A Multidimensional Approach*. Penelitian ini menggunakan analisis konten pada buku teks Bahasa Yunani kelas tiga. Analisis dilakukan untuk mengetahui stereotip gender diseluruh buku. Selain analisis konten, dilakukan wawancara dengan guru mata pelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan untuk melakukan evaluasi buku teks bahasa yang ada di sekolah dasar untuk mempromosikan kesetaraan gender. Guru juga perlu mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pemahaman guru berkaitan dengan gender seperti mengenai stereotip gender, bahasa yang bersifat sexist, kebijakan pengarusutamaan gender, dan lainnya.

- 28). Raewyn Connell. Tahun 2010. Judul: *Kartini's Children: On The Need For Thinking Gender And Education Together On A World Scale*. Artikel ini membahas mengenai bagaimana kesetaraan gender menjadi agenda dunia, suatu upaya yang diperjuangkan Kartini dimasa lalu. Melalui artikel ini, eksplorasi persoalan dengan menggunakan teori pendidikan pada skala global yang sangat terkait dengan gender. Dari artikel ini, disarankan bagi peneliti untuk melakukan penelitian mengenai gender dan pendidikan, dan pentingnya membangun keadilan gender dalam pendidikan.
- 29). Jackie F.K Lee. Tahun 2016. Judul artikel: *Gender Representation in Japanese EFL Textbooks – A Corpus Study*. Penelitian ini berupaya menginvestigasi upaya Pemerintah Jepang dalam mendorong kesetaraan gender pada pendidikan. Penelitian ini melakukan analisis pada empat buku Bahasa Inggris populer yang diterbitkan tahun 2011 khususnya pada buku teks. Analisis dilakukan untuk mengetahui rasio kemunculan laki-laki dan perempuan, konstruksi netral gender dan konstruksi gender, kata sifat umum yang dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan. Temuan penelitian menunjukkan beberapa bukti kesetaraan gender pada buku teks, termasuk dalam penggunaan kosakata serta panggilan yang bersifat netral gender. Berdasarkan temuan penelitian, masih ditemukan laki-laki sebagai pihak yang berada pada posisi pertama, dan perempuan menempati posisi sekunder. Secara kuantitatif, representasi laki-laki dan perempuan setara, namun masih terdapat stereotip gender. Saran bagi otoritas pendidikan untuk membantu penulis buku teks menghasilkan buku teks yang mendorong kesetaraan gender.
- 30). Dipta Bhog & Malini Ghose. Tahun 2014. Judul: *Writing Gender In: Reflections on Writing Middle-School Political Science Textbooks In India*. Latar belakang penelitian ini berkaitan dengan pandangan bahwa keluarga dan lingkungan sosial menjadi tempat pertama internalisasi norma gender. Feminist menganggap bahwa sekolah merupakan tempat yang penting dalam pembentukan identitas gender. Di sekolah, kurikulum dan buku teks memiliki peran penting dalam menentukan dan mentransmisi pengetahuan tentang isu gender. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem pendidikan di India, upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender sudah tampak, melalui transmisi

pengetahuan mengenai kesetaraan gender, namun tidak menentang relasi kuasa gender. Buku memiliki peran penting dalam mengkonstruksi relasi gender yang lebih setara.

- 31). Juliane Richter, Katharina Scheiter, Alexander Eitel. Tahun 2015. Judul artikel: *Signaling Text-Picture Relations In Multimedia Learning: A Comprehensive Meta-Analysis*. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode kajian literatur. Penelitian ini fokus pada bagaimana keterkaitan tanda (sinya;) teks dan gambar. Hasil penelitian menunjukkan efektifitas penggunaan prinsip sinyal (tanda) untuk siswa yan memiliki pengetahuan yang rendah.
- 32). Joseph Kahne, Erica Hodgins & Elysa Eidman-Aadahl. Tahun 2016. Judul artikel: *Redesigning Civic Education For The Digital Age: Participatory Politics And The Pursuit Of Democratic Engagement*. Revolusi digital telah menciptakan perubahan besar dalam kehidupan politik, terutama berkaitan dengan bentuk partisipasi politik berubah dari partisipasi institusional yang terikat dengan elit maupun institusi tradisional, menjadi partisipasi yang berbasis interaktif, maupun dengan rekan. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan perlu merespon perubahan tersebut melalui penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan yang mendorong praktik dalam membentuk kemampuan siswa untuk dapat menjadi warga negara yang terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat maupun politik seperti investigasi, dialog, sirkulasi, produksi, dan mobilisasi yang diajarkan pada siswa secara berbeda sesuai dengan konteks. Artikel ini mengkonseptualisasi perubahan kehidupan politik yang berpengaruh terhadap Pendidikan Kewarganegaraan, dengan mendorong agenda perubahan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di era digital.
- 33). Brook Blevins & Sunny D. Wells. Tahun 2014. Judul artikel: *Citizenship Education Goes Digital*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dari salah satu inovasi teknologi yakni *iCivic.Org* suatu program game pendidikan *online*. Secara lebih spesifik, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak dari penggunaan *game* tersebut pada 13 kelas yakni 4, 5, 6, 8, dan 12 yang melibatkan 250 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *iCivic* memberikan dampak positif dalam aspek pengetahuan siswa. Temuan

lain dalam penelitian ini yakni peran penting guru yang menentukan implementasi *iCivic*.

- 34). Yvonne Behnke. Tahun 2016. Judul artikel: *How Textbook Design May Influence Learning with Geographic Textbooks*. Penelitian ini berupaya melakukan investigasi pengaruh desain pada buku teks terhadap tingkat perhatian siswa terhadap grafik, foto, dan teks pada buku Geografi. Sampel penelitian ini menggunakan random sampling. Penelitian dilakukan pada hasil penelitian menunjukkan bahwa desain buku teks menjadi salah satu faktor penentu bagi siswa dalam memahami materi pada buku teks.
- 35). Deok-Ho Jang, Pilnam Yi, In- Soo Shin. Tahun 2016. Judul artikel: *Examining the Effectiveness of Digital Text Book Use On Student's Learning Outcome In South Korea: A Meta Analysis*. Penelitian ini menggunakan meta-analisis, dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan buku teks digital (*Digital Textbook*) terhadap hasil belajar siswa. Dari 26 studi yang dilakukan dengan menggunakan 262 *effect sizes* (ESs), diperoleh hasil 0.34. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku teks digital lebih meningkatkan motivasi belajar siswa dibanding dengan peningkatan hasil belajar siswa. Berdasarkan temuan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan buku teks digital dapat meningkatkan motivasi siswa, sehingga diharapkan pemangku kebijakan dapat mendukung penggunaan buku teks digital dalam proses pembelajaran.
- 36). Janaina de Oliveira, Mar Camacho, Merce Gisbert. Tahun 21014. Judul artikel: *Exploring Student and Teacher Perception of E Textbook in a primary School*. Latar belakang penelitian yaitu kemajuan teknologi yang berpotensi dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, salah satunya adalah *ebook*. Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai perspsi siswa dan guru pada Sekolah Dasar menggunakan buku teks digital. Melalui Penelitian ini, diketahui persepsi guru dan siswa mengenai keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran dengan menggunakan buku teks digital. Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa dan guru memaknai ruang kelas sebagai ruang belajar yang multimodal yang melibatkan aspek virtual, fisik, dan lingkungan kognitif untuk menegosiasikan makna dan merenungkannya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa persepsi siswa dan guru berkaitan dengan penggunaan buku teks digital sangat dipengaruhi oleh budaya yang melembaga di lingkungan tersebut. Buku teks digital dapat menjadi alternatif dalam mengakses sumber informasi secara gratis, selain itu juga dapat mendukung kegiatan belajar yang komunikatif.

- 37). Mohammed Y. Nofal & Hanadi A. Qawar. Tahun 2015. Judul artikel: *Gender Representation in English Language Textbook: Action Pact 10*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi gender dalam buku teks Bahasa Inggris paket tindakan 10 di Yordania. Penelitian difokuskan pada mengetahui representasi rasio karakter laki-laki dan perempuan dalam pengaturan peran sosial dan rumah tangga yang terdapat pada teks dan gambar. Selain itu, dilakukan analisis terhadap bahasa yang digunakan dalam buku teks (mengandung bias gender atau tidak) serta gambar pada buku teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter laki-laki disajikan lebih dominan baik secara linguistik, visual maupun sosial. Laki-laki lebih banyak digambarkan melakukan banyak peran sosial dibanding perempuan. Buku teks tidak menggambarkan peran perempuan yang sudah memiliki posisi yang lebih baik dalam kehidupan masyarakat Yordania saat ini.
- 38). Chiho Mori & Ian Devies. Tahun 2014. Judul artikel: *Citizenship Education In Civics Textbooks In The Japanese Junior High School Curriculum*. Penelitian ini dilakukan terhadap buku teks Pendidikan Kewarganegaraan yang digunakan Jepang sejak tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks Pendidikan Kewarganegaraan cukup mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran melalui tugas dan latihan yang diorientasikan pada pembentukan keterampilan dan pemahaman yang diperlukan dalam konteks kehidupan kontemporer.
- 39). Moonsoon Choi. Tahun 2016. Judul artikel: *A Concept Analysis of Digital Citizenship For Democratic Citizenship Education In The Internet Age*. Latar belakang penelitian yakni adanya kesadaran bahwa meskipun mempromosikan kewarganegaraan yang bertanggung jawab merupakan hal yang penting di era digital saat ini, namun ada yang belum menjadi perhatian yakni definisi warga negara digital. Penelitian ini menemukan empat kategori yang menopang

kewarganegaraan digital yakni: Etika, literasi media dan informasi, partisipasi atau keterlibatan, dan resistensi kritis. Berdasarkan empat kategori tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa kewarganegaraan digital perlu dipahami secara multidimensi dan kompleks namun tidak selalu sejalan dengan kehidupan warga negara dalam hubungannya dengan situasi nyata.

- 40). Chara Haeussler Bohan. Tahun 2017. Judul: *Gender And Feminists Scholarship In Social Studies Research A Dynamic Theoretical Framework Living On The Edge*. Latar belakang penelitian ini yakni pandangan yang menyatakan bahwa buku teks studi Sosial menyajikan perempuan yang digambarkan dengan peran gender tradisional yakni sebagai penanggung jawab urusan rumah tangga, dan pengasuhan anak. Pandangan ini didukung oleh berbagai penelitian serupa yang menunjukkan bahwa pada buku teks, laki-laki berada pada posisi dominan, sedangkan perempuan menempati posisi subordinat. Selain itu, laki-laki dan perempuan digambarkan sesuai dengan peran tradisional masing-masing yakni laki-laki menempati ranah publik, yang digambarkan dengan berbagai keterlibatan laki-laki dalam berbagai kegiatan diluar rumah atau publik, sedangkan perempuan menempati ranah domestik dengan berbagai gambaran aktivitas rumah tangga dan pengasuhan anak. Atas berbagai temuan tersebut, menurut Bohan diperlukan penelitian yang komprehensif yang mencakup konteks sosial politik sehingga diperoleh pemahaman mengenai bagaimana aspek sosial politik mungkin memberikan kontribusi pada representasi perempuan pada buku teks.

2.6.2. Penelitian yang Relevan dengan Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

- 1). Daeill Lea. Judul artikel: *Transformative Citizenship: A Redefinition Of Citizenship In A Multicultural Society*. Penelitian ini merupakan suatu kajian literatur yang berupaya mengkritisi pendekatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini diselenggarakan yang cenderung hanya mentransmisi pengetahuan; Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu pendidikan reflektif berkenaan dengan pengetahuan sosial, dimana kedua pendekatan ini menempatkan demokrasi sebagai konsep yang bersifat statis, bukan suatu konsep yang dinamis dan penuh dengan perjuangan untuk mewujudkan kehidupan yang setara dan adil. Melalui penelitian ini,

ditawarkan konsep kewarganegaraan alternatif yang berupaya memberdayakan yakni demokrasi transformatif. Melalui konsep alternatif ini, Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan lebih mendorong distribusi yang adil dan setara untuk kemaslahatan masyarakat. Konsep kewarganegaraan transformatif berupaya mendorong perubahan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan agar terbentuk pola pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan kesukarelaan untuk aktif menjadi bagian yang berupaya mengatasi persoalan sehingga mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang setara tanpa ada pihak yang berada pada posisi dominan, dan ada pihak yang menjadi kelompok marginal.

- 2). Ruth Lister. 2008. Judul artikel: *Inclusive Citizenship: Gender And Poverty Some Implication For Citizenship For Education*. Penelitian ini merupakan studi literatur yang berkaitan dengan konsep kewarganegaraan inklusif yang menyoroti upaya kelompok marginal untuk memperoleh pengakuan yang sama sebagai warga negara yakni perempuan dan orang miskin. Berdasarkan kajian awal tersebut, peneliti mengkaitkan konsep kewarganegaraan inklusif dengan implikasi Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan dalam memperkuat kewarganegaraan kelompok marginal serta untuk mengedukasi semua pihak agar menghargai kelompok marginal baik dalam konteks kehidupan nasional maupun global. Kesimpulan dari penelitian ini yakni Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mewujudkan Kewarganegaraan yang inklusif terbuka terhadap perbedaan termasuk perbedaan atas dasar gender, saling menghargai, bersifat reflektif serta mendorong partisipasi aktif untuk mengatasi persoalan dalam konteks lokal, nasional, maupun global.
- 3). Claudia W Ruitenber. Tahun 2015. Judul artikel: *The Practice Of Equality A Critical Understanding Of Democratic Citizenship Education*. Penelitian ini merupakan studi literatur berkenaan dengan konsep Pendidikan Kewarganegaraan dari aspek politik berdasarkan pemikiran Balibar, Rencier, dan Biesta yang memandang bahwa Pendidikan Kewarganegaraan demokratis harus mencakup pendidikan yang menegaskan kesetaraan. Dalam penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan, semua peserta didik tidak

dibedakan atas dasar apapun merupakan subyek yang memiliki posisi setara dan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar mengemukakan pendapat maupun untuk berpartisipasi secara politik.

- 4). Marshal H & Arnot. Tahun 2008. Judul artikel: *Globalising The School Curriculum: Gender, EFA, And Global Citizenship Education*. Penelitian ini merupakan studi literatur yang mengkaji tentang upaya mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kurikulum sekolah melalui analisis gender, pendidikan dan pembangunan. Latar belakang penelitian ini yakni temuan penelitian di negara berkembang yang menunjukkan adanya kontradiksi antara kurikulum nasional dan kurikulum global yang memiliki potensi mendorong kesetaraan. Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan global yang menempatkan perempuan secara subordinat dengan relasi kuasa yang tidak setara dengan laki-laki yang diharapkan dapat dihilangkan melalui program EFA (*education for all*). Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Pendidikan Kewarganegaraan global dapat berperan dalam membangun visi berkeadilan gender, juga dapat berperan sebaliknya yakni melegitimasi ketidakadilan gender manakala pengetahuan mengenai ketidaksetaraan gender dikesampingkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan global, sehingga menghambat potensi siswi untuk ikut menyuarakan pendapat dan berpartisipasi sesuai dengan peran mereka sebagai warga negara.
- 5). Chole Ashbridge, Matthew Clarke, Beth T Bell, Helen Saunton & Emma Walker. Tahun 2022. Judul artikel: *Democratic Citizenship, Critical Literacy And Educational Policy In England: A Conceptual Paradox?*. Artikel ini berupaya mengidentifikasi paradoks konseptual antara kebijakan pemerintah Inggris dalam bidang pendidikan dengan pemahaman sosial demokratis berkaitan dengan literasi kritis. Berbagai peristiwa politik yang terjadi di Inggris baru-baru ini, menegaskan diperlukannya pendidikan yang mengajarkan siswa untuk kritis menanggapi informasi yang beredar secara *online*. Literasi kritis dilihat dari geneologinya merupakan model pendidikan demokrasi. Dalam hal ini, guru memiliki peran penting sebagai agen yang mendorong literasi kritis siswa. Adanya *gap* antara penelitian mengenai literasi dan media digital menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah memprioritaskan

pada sistem neoliberalisme. Pendidikan yang demokratis, memperhatikan keadilan sosial berorientasi pada literasi kritis pada abad 21 saat ini menjadi suatu kebutuhan yang mendesak.

- 6). Anthony Kamau Wainaina & Guantai Mboroki. Tahun 2013. Judul artikel: *Effect Of Civic Education On Woman' Political Participation In Gatanga Ward In Gatanga Constituency Murang'a Country – Kenya*. Penelitian ini berupaya mengkaji efek Pendidikan Kewarganegaraan (CE) terhadap partisipasi politik perempuan di Gatanga Ward, Gatanga Constituency di Kabupaten Murang'a-Kenya terutama pengetahuan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mendukung partisipasi politik perempuan dalam kehidupan publik di masyarakat. Selain itu, perempuan mendukung hak mereka untuk memiliki kesempatan pendidikan yang sama, serta partisipasi yang setara diberbagai bidang kehidupan termasuk partisipasi politik. Hasil penelitian menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berkaitan dengan partisipasi politik perempuan. Penelitian ini merekomendasikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang membangun kesadaran perempuan tentang peran mereka dalam politik dan partisipasi dalam posisi kepemimpinan lainnya. Perempuan juga harus dipertimbangkan untuk penunjukan politik di tingkat Kabupaten dan Nasional untuk memfasilitasi keseimbangan gender.
- 7). Roland Tormey & Jim Gleeson. Tahun 2012. Judul artikel: *The Gendering Of Global Citizenship: Findings From A Large-Scale Quantitative Study On Global Citizenship Education Experiences*. Literatur yang berkembang tentang kewarganegaraan atas dasar gender dan Pendidikan Kewarganegaraan menyoroiti gagasan Barat tentang 'kewarganegaraan' yang secara implisit mengecualikan perempuan. Pada saat yang sama, feminis membahas kewarganegaraan, mereka cenderung melihatnya dalam konteks lokal dan nasional. Literatur feminis telah meletakkan dasar untuk memahami bagaimana sekolah telah membentuk dan mengkonstruksi warga negara berdasarkan gender, terdapat kekurangan berdasarkan data kuantitatif yang memungkinkan untuk mengeksplorasi persinggungan antara gender dan Pendidikan Kewarganegaraan global. Data yang disajikan di sini menunjukkan bahwa kewarganegaraan sedang “digenderkan” di sekolah-sekolah. Data

menunjukkan bahwa sekolah perempuan lebih mungkin daripada jenis sekolah lain untuk menekankan rasa tanggung jawab dan melakukan analisis berkaitan dengan ketidaksetaraan global. Perbedaan muncul diantaranya sekolah anak laki-laki dan sekolah yang menggabungkan laki-laki dan perempuan.

- 8). Christine Fox. Tahun 2003. Judul: *No Place for Girls? Gender, Ethnicity, and Citizenship Education in the Lao People's Democratic Republic*. Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum pendidikan di Laos kontradiktif dan bermasalah. Persoalan yang muncul berkaitan dengan marginalisasi kelompok minoritas, kesetaraan laki-laki dan perempuan, tidak diikuti dengan pengakuan akan ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam konteks kehidupan masyarakat yang lebih luas. Temuan peneliti menunjukkan bahwa peran dan partisipasi perempuan sebagai warga negara tidak muncul dalam silabus dan buku teks, termasuk dalam konteks kehidupan yang lebih luas baik dalam bidang ekonomi, maupun lainnya.
- 9). David F. Suarez. Tahun 2008. Judul artikel: *Rewriting Citizenship? Civic Education in Costa Rica dan Argentina*. Penelitian ini mengenai persoalan hak asasi manusia, keberagaman, dan pluralisme budaya dalam Pendidikan Kewarganegaraan modern. Pendidikan Kewarganegaraan pada kedua negara (Costa Rica & Argentina) fokus pada hak dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, Costa Rica & Argentina menganut Pendidikan Kewarganegaraan global dengan menegaskan mengenai hak asasi manusia. Namun Costa Rica dan Argentina berbeda intensitas dalam mengadopsi Pendidikan Kewarganegaraan Global.
- 10). Katherine Nicoll, Andreas Fejes, Maria Olson, Magnus Dahlstedt & Gert Biesta. Tahun 2013. Judul: *Opening Discourse of Citizenship Education: A Theorization with Foucault*. Penulis mengidentifikasi dua persoalan berkaitan dengan wacana Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, berkaitan dengan wacana yang mengaggap bahwa siswa, yang dianggap kurang terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan dan tidak menjadi bagian dari aktivitas masyarakat. Yang kedua, wacana mengenai kegagalan pendidikan kewarganegaraan dalam memahami dukungan diskursif dan materil untuk

mendorong aktivitas kewarganegaraan. Peneliti berargumen bahwa, sumber persoalan bukan pada kurangnya penelitian pendidikan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, namun berkaitan dengan identifikasi dan eksplorasi berbagai perbedaan kewarganegaraan dimana siswa menjadi bagian di dalamnya. Untuk memahami persoalan tersebut, peneliti menggunakan teori poststrukturalis Foucault. Teori ini memiliki potensi signifikan dalam mengatasi persoalan diskursus berkaitan pendidikan kewarganegaraan kontemporer.

- 11). Obiageli I. Ikwuka, Chukwuemeka E. Etodike, Ogochukwu K. Okoli. Tahun 2020. Judul artikel: *Differential Effect Of Instruction Technique And Gender On Secondary School Students Achievement In Civic Education In Anambra State – Nigeria*. Latar belakang penelitian ini yakni *performance* siswa pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, kurang baik. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan kewarganegaraan yakni mewujudkan kehidupan sosial yang menjamin kesetaraan, keadilan sosial, serta pemenuhan hak dasar manusia. Untuk mencari jawaban terhadap persoalan di atas, peneliti melakukan eksplorasi perbedaan efek pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan menggunakan Teknik Instruksi Kelompok (GIT) dan gender dalam mencapai prestasi pada siswa Sekolah Menengah Atas di negara bagian Anambra. Penelitian ini menggunakan desain kelompok kontrol non-acak, pre-test, posttest desain eksperimen semu sementara pengambilan sampel multi-tahap. Prosedur ini digunakan untuk mengambil sampel enam sekolah koedukasi dari masing-masing enam zona pendidikan yang berjumlah 258 sekolah menengah negeri di Anambra State. Sampel dalam penelitian ini yakni 193 siswa SMA 2 yang diambil dari enam kelas. Instrumen Tes Prestasi Kewarganegaraan (CAT) digunakan untuk pengumpulan data. Data dari penelitian dianalisis menggunakan *Analysis of Covariance* (ANCOVA). Hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan pada Civic tes prestasi antar kelompok. Kelompok eksperimen diajarkan Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan GIT, diketahui skor rata-rata lebih tinggi daripada pada kelas kontrol. Kelompok yang diajarkan dengan LM. Jenis kelamin juga menjadi faktor

kovarian tentang efek diferensial GIT dan gender pada siswa berprestasi di bidang Pendidikan Kewarganegaraan. Mengingat bukti empiris ini; GIT berperan sebagai alternatif yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik siswa dalam Pendidikan Kewarganegaraan.

- 12). Basak INCE. Tahun 2018. Judul artikel: *Gender Stereotyping In Civic Education Textbooks in Turkey Throughout the Republican History*. Artikel ini mengkaji stereotip gender pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan sejak berdirinya Republik Turki yakni pada tahun 1923 hingga saat ini. Penelitian ini menggunakan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kepekaan terhadap isu-isu gender, namun perlakuan yang setara antara perempuan dan laki-laki belum tampak pada buku teks. Buku teks masih menyajikan peran gender tradisional yang bersifat maskulin. Berdasarkan temuan tersebut, diketahui adanya kebutuhan mendesak untuk menggunakan gender dan perbedaan sebagai analisis untuk membentuk pemahaman warga negara yang inklusif di Turki.
- 13). Georgina Christou. Tahun 2013. Judul artikel: *Understanding Gender-Based Violence Among Adolescents: Exposing Challenges for An Inclusive Educational Policy and Citizenship Education In Cyprus*. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap berbagai bentuk kekerasan berbasis gender yang terjadi di sekolah termasuk berkaitan dengan *bullying* dengan siswa sebagai korban dan pelaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan yang diformulasi untuk mengatasi persoalan tersebut. Peneliti menggunakan pandangan kritis untuk memahami bagaimana landasan filosofis dan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan merespon persoalan gender serta ketimpangan sosial yang terjadi. Peneliti berpendapat bahwa untuk mengakomodir beragam perbedaan yang ada di masyarakat dan untuk mendorong perubahan sosial, Pendidikan Kewarganegaraan harus bersifat inklusif.
- 14). Karima Mechouat. Tahun 2017. Judul Artikel: *Approaching and Implementing Civic Education Pedagogies and Engagement Values in the Moroccan Classroom: Gender-based Perspectives*. Latar belakang penelitian ini yaitu persoalan yang dihadapi Pendidikan kewarganegaraan dan peran Pendidikan

Kewarganegaraan di Maroko dalam mewujudkan komitmen demokratisasi. Melalui artikel ini, ditegaskan mengenai kebutuhan mendesak untuk memasukkan nilai-nilai Pendidikan Kewarganegaraan dalam proses belajar mengajar disemua disiplin ilmu pada umumnya dan dalam ruang kelas khususnya. Serta mengenai pembelajaran, teknik dan strategi yang efektif untuk diterapkan dalam penguatan nilai keterlibatan warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan sebagai landasan dalam penerapan prinsip-prinsip seperti demokrasi, hak asasi manusia, pengarusutamaan gender, serta kebebasan berbicara. Untuk memastikan implementasi yang bermanfaat dari program kewarganegaraan dan penguatan keterlibatan yang efisien dan nilai-nilai responsif gender, maka guru dan semua praktisi harus terbiasa dengan sumber daya dan konten yang relevan dengan pendidikan berwawasan kewarganegaraan. Melalui pendidikan yang mendorong siswa untuk memahami dan mempraktekkan prinsip - prinsip demokrasi, diharapkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan prinsip demokrasi termasuk penghargaan terhadap kesetaraan gender dapat tercapai dan berkelanjutan.

- 15). Salah Haliat. Tahun 2017. Judul artikel: *The Image of Women in the Books of National and Civic Education of Basic Stage in Jordan*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui citra perempuan pada buku teks Pendidikan Kewarganegaraan pada Sekolah Dasar di Jordania. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam buku teks, perempuan digambarkan dengan peran tradisional yang melekat pada mereka, yakni perempuan dengan partisipasi yang rendah, dan tidak banyak terlibat dalam aktivitas publik. Buku teks juga menggambarkan keterikatan perempuan dengan peran domestik dan pengasuhan anak, serta perempuan yang digambarkan menjadi pihak yang bergantung atau *dependen* terhadap laki-laki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan reformasi pendidikan terutama berkaitan dengan perubahan citra perempuan dalam buku teks yang digunakan di sekolah.
- 16). W. Lance Bennett, Chris Wells & Allison Rank. Tahun 2009. Judul artikel: *Young Citizens and Civic Learning: Two Paradigms of Citizenship In The Digital Age*. Latar belakang penelitian yaitu tantangan yang dihadapi

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengidentifikasi perubahan dan praktik politik warga negara muda. Artikel ini mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah pada berbagai negara demokrasi pasca-industri dengan tujuan untuk mendapatkan pembelajaran yang menawarkan cara mengubah gaya belajar secara *online* dan *offline*. Keunggulan program Pendidikan Kewarganegaraan berbasis sekolah mencerminkan paradigma tradisional kewargaan yang berorientasi pada pemerintah melalui partai politik dan pemungutan suara, serta aktivitas untuk memperoleh informasi melalui berita. Penulis memperluas kategori pembelajaran konvensional dengan mengidentifikasi kesempatan belajar kewarganegaraan tambahan yang lebih mencerminkan gaya aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan partisipasi yang umum dilakukan warga negara muda. Gaya belajar aktualisasi diri yang mereka lakukan melalui aktivitas yang menggunakan jaringan interaktif untuk berpartisipasi seperti melalui media video yang dibagikan secara *online*. Hasil penelitian menunjukkan serangkaian kategori pembelajaran yang diperluas untuk mengenali nilai gaya kewarganegaraan yang berbeda dan lingkungan *online* yang mungkin melengkapi atau menggantikan penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

- 17). Aaron T. Sigauke. Tahun 2012. Judul artikel: *Yong People, Citizenship, and Citizenship Education in Zimbabwe*. Latar belakang penelitian yakni adanya anggapan bahwa generasi muda tidak memiliki kebajikan kewarganegaraan (*Civic Virtue*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan, sikap dan perilaku siswa Sekolah Menengah Atas berkaitan dengan isu-isu kewarganegaraan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun siswa memiliki pengetahuan kewarganegaraan, namun mereka ragu untuk melakukan kegiatan partisipasi politik. Kesimpulan penelitian ini yakni siswa tidak mau terlibat berkaitan dengan isu kewarganegaraan yang sensitif.
- 18). Ryan T. Knowles & Antonio J. Castro. Tahun 2019. Judul artikel: *The Implication of Ideology on Teachers Beliefs on Regarding Civic Education*. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai ideologi guru Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Missouri pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, konservatif, liberal atau kritis.

Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara ideologi yang diyakini guru dengan pembenaran terhadap sistem pemerintahan yang sedang berkuasa, serta keyakinan guru terhadap perilaku yang perlu ditekankan dalam pembelajaran untuk mempersiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru dengan ideologi konservatif dan liberal yang memberikan dukungan dan pembenaran yang lebih kuat pada sistem pemerintahan. Selain itu, mendukung pengajaran kewarganegaraan yang lebih pasif. Sedangkan guru dengan ideologi kritis dikaitkan secara negatif dengan dukungan pada sistem yang berkuasa dan mendorong partisipasi aktif masyarakat.

- 19). Eric K.M. Chong. Tahun 2015. Judul artikel: *Global Citizenship Education and Hong Kong Secondary School Curriculum Guidelines*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan Global sebagai bagian dari pedoman kurikulum pada sekolah menengah di Hong Kong, yang berkaitan dengan bagaimana membentuk pemahaman siswa mengenai tanggung jawab yang melekat pada mereka sebagai warga negara, dan menentang ketidakadilan yang terjadi di dunia. Penelitian ini menggunakan analisis dokumen. Artikel ini mengkaji latar belakang bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan global sebagai pedoman kurikulum sekolah menengah di Hong Kong. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan global dalam pedoman kurikulum di Hong Kong telah berkembang dari pembelajaran tentang hak dan tanggung jawab pada tahun 1990an, berubah kearah upaya untuk menentang ketidakadilan, diskriminasi, pengucilan, dan diakhir tahun 1990an, yang berkaitan dengan ketidaksetaraan. Berdasarkan penelitian ini diketahui bahwa tantangan Pendidikan Kewarganegaraan global yakni membentuk siswa untuk mampu memahami proses dan fenomena saling terhubung antara orang dengan orang lain. Seperti kepedulian terhadap upaya mewujudkan kedamaian serta upaya untuk menentang ketidaksetaraan dan ikut mengambil tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia. Implikasi dari penelitian ini yakni kurikulum Pendidikan kewarganegaraan global perlu merespon dampak dari globalisasi.

- 20). James A. Banks. Tahun 2008. Judul: *Diversity, Group Identity and Citizenship Education in Global Age*. Artikel ini membahas mengenai keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan dengan realitas global yang menciptakan arus imigrasi di seluruh dunia serta tuntutan pemenuhan hak kelompok minoritas yang memunculkan pertanyaan dari ilmuwan sosial dan pendidikan mengenai konsep asimilasi kewarganegaraan liberal yang secara historis mendominasi Pendidikan Kewarganegaraan di berbagai negara. Melalui artikel ini, peneliti menentang asimilasi konsep liberal pada kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut penulis, Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan reformasi. Dalam hal ini, Pendidikan Kewarganegaraan harus mencerminkan budaya dan bahasa asal siswa, melalui pemenuhan hak tersebut, diharapkan dapat membantu siswa untuk memperoleh kesetaraan secara struktural. Diperlukan transformasi Pendidikan Kewarganegaraan sehingga siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk menentang ketidaksetaraan yang terjadi baik di lingkungan komunitas mereka, ditingkatan nasional maupun yang terjadi di dunia.
- 21). Antonio J. Kastro. Tahun 2010. Judul artikel: *Challenges in Teaching For Critical Multicultural Citizenship: Student Teaching In An Accountability-Driven Context*. Penelitian ini merupakan studi kasus pada tiga calon guru yang berusaha mengajar Pendidikan Kewarganegaraan multikultural kritis secara bertanggung jawab sesuai dengan konteks sekolah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mereka berhasil dengan menggunakan strategi seperti pengukuran keberhasilan pembelajaran tanpa menekankan pada tes, atau dengan menyelipkan konten yang berkaitan dengan keberagaman budaya serta mendorong pemikiran kritis siswa, mengajarkan beragam perspektif serta perasaan memiliki sebagai bagian dari kelas. Namun hal ini berlawanan dengan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan pada umumnya atau konvensional.

Dari berbagai temuan penelitian terdahulu, diketahui bahwa buku teks yang digunakan belum memperhatikan kesetaraan gender kebaruan atau *novelty* dari penelitian ini yakni penelitian ini mengembangkan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berbasis kesetaraan dalam bentuk digital, untuk

membentuk literasi kritis generasi Z. penelitian ini memiliki suatu kebaruan mengingat dari semua penelitian yang relevan dikemukakan di atas, belum ada yang melakukan tentang penelitian mengenai buku teks pendidikan kewarganegaraan dari perspektif gender yang menggunakan desain *research and development*, sehingga tidak ada produk yang dihasilkan yang diharapkan dapat memberikan perubahan terhadap temuan penelitian yang menunjukkan ketidaksetaraan gender dalam buku teks. Hampir semua penelitian hanya menggunakan salah satu pendekatan saja baik kuantitatif atau kualitatif, sehingga hanya selesai pada penyajian temuan, belum diikuti dengan luaran berupa produk yang akan memberikan dampak positif pada kondisi sebagaimana yang disajikan dalam temuan penelitian. Selain itu, *novelty* penelitian ini yakni buku teks yang dikembangkan diorientasikan membentuk literasi kritis generasi Z. penelitian sebelumnya belum dihubungkan dengan pentingnya literasi kritis terutama bagi generasi Z sebagai pengguna buku, yang memiliki karakteristik yang sangat berkaitan erat dengan teknologi digital.

2.7. Kerangka Berfikir

Pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender berlandaskan pada tahapan *input*, proses, *output* dan *outcome*.

Input merupakan tahapan awal dalam pengembangan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender. Pengembangan model buku teks Pendidikan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender yang dikembangkan peneliti berdasarkan pada input berikut ini:

Pertama, analisis peneliti berkaitan dengan realitas kontekstual yang dialami generasi Z saat ini, yakni berupa peluang dan tantangan dari kemajuan teknologi informasi yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Peluang yang dimiliki generasi Z yakni akses informasi yang sangat luas; peluang yang terbuka lebar untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai orang dari beragam latar belakang di seluruh penjuru dunia; peluang menyuarakan gagasan, pendapat, aspirasi secara luas melalui beragam platform media sosial yang dimiliki; peluang berpartisipasi secara aktif secara langsung maupun secara virtual diberbagai bidang

kehidupan; dan lainnya. Di sisi lain, kemajuan teknologi khususnya teknologi informasi menjadi tantangan tersendiri bagi generasi Z yakni: Maraknya *cyber bullying* yang mengikuti tingginya tingkat penggunaan media sosial pada generasi Z yang tidak diimbangi dengan etika berkomunikasi secara virtual; maraknya pemberitaan yang tidak benar (*hoax*); berbagai bentuk *cyber crime* yang seringkali menasar generasi Z;

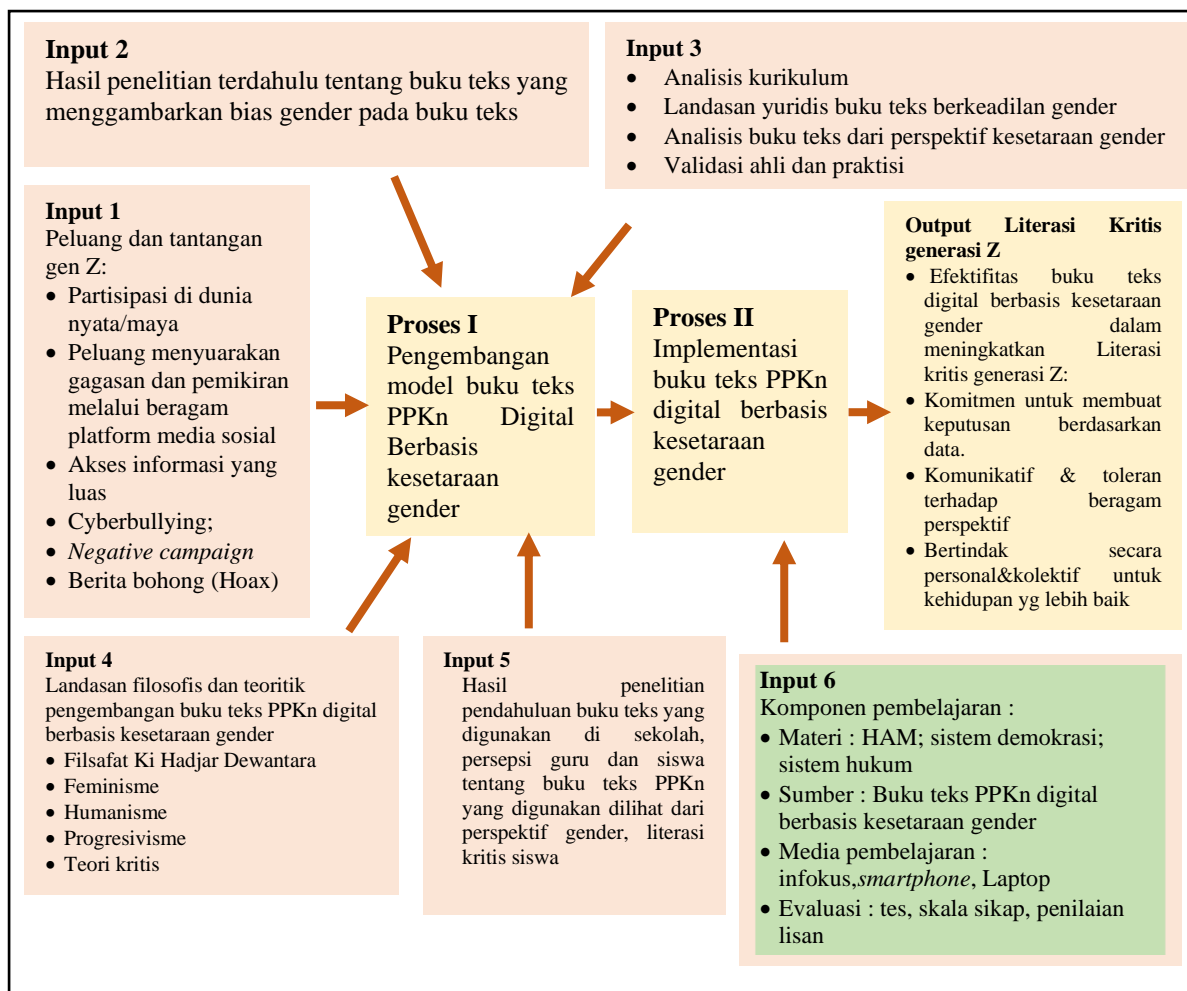
Kedua, Input yang melandasi pengembangan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender yakni berasal dari hasil penelitian terdahulu mengenai buku teks yang digunakan diberbagai belahan dunia termasuk di Indonesia yang menunjukkan bahwa buku teks masih sarat akan transmisi nilai gender tradisional yang cenderung memposisikan perempuan secara subordinat. Selain itu, berbagai temuan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa buku teks masih mengandung bias gender, stereotip gender, bahkan terdapat diskriminasi gender;

Ketiga, hasil analisis kurikulum menunjukkan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai pendidikan yang tujuannya membentuk karakter peserta didik termasuk membentuk sikap dan perilaku demokrasi perlu mengintegrasikan kesetaraan gender dalam materi pembelajaran, dan diimplementasikan dengan buku teks yang berperspektif gender; berbagai landasan yuridis yang mengamankan secara implisit maupun eksplisit yang mengamankan buku teks yang memperhatikan kesetaraan gender; analisis buku teks yang dilakukan peneliti, praktisi dan siswa menunjukkan bahwa buku teks yang digunakan pada institusi pendidikan belum menjadikan kesetaraan gender sebagai salah satu fokus penyusunan buku teks;

Keempat, validasi ahli dan praktisi menjadi input yang memberikan masukan mengenai pengembangan buku teks yang memperhatikan kesetaraan gender; Landasan filosofis dan teoritik yang relevan dengan pengembangan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender digunakan sebagai salah satu fondasi utama pengembangan buku teks PPKn digital berbasis gender.

Kelima, input tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan langkah selanjutnya yakni proses pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Digital Berbasis Kesetaraan Gender. Setelah draf model buku teks melalui tahap validasi oleh pakar dan praktisi melalui *Focus Group Discussion* (FGD), dan questioner, proses selanjutnya yakni uji coba model buku teks yang dikembangkan pada skala kecil atau terbatas yakni pada dua Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Indramayu. Pada tahap ini, input komponen pembelajaran terdiri dari: Meteri pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum semester ganjil kelas XI Sekolah Menengah Atas yakni Hak dan Kewajiban Asasi Manusia, dinamika dan sistem demokrasi di Indonesia, serta Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. Proses pembelajaran diselenggarakan menggunakan sumber belajar berupa buku teks yang dikembangkan peneliti, selain itu, digunakan media pembelajaran yang seperti *infocus*, dan *Smartphone*.

Tahap akhir dalam pengembangan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital ini yakni *output* atau luaran berupa efektifitas penggunaan buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender yang ditunjukkan dengan adanya perbedaan hasil *pre test* dan *post test*, yang ditunjukkan oleh peningkatan kemampuan dan komitmen siswa dan siswi dalam bertindak serta dalam membuat keputusan berdasarkan pada data, toleran terhadap perbedaan serta berkomitmen secara personal dan kolektif untuk mendorong perubahan kehidupan yang lebih baik bagi semua pihak. Kerangka pemikiran penelitian ini disajikan pada bagain di bawah ini:



Sumber: Diolah peneliti 2021.

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir

2.8. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peneliti merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan penerapan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender untuk membentuk literasi kritis generasi Z.

H_1 = Ada pengaruh signifikan penerapan model buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan digital berbasis kesetaraan gender untuk membentuk literasi kritis generasi Z.

Nunung Nurjanah, 2023

PENGEMBANGAN MODEL BUKU TEKS PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DIGITAL BERBASIS KESETARAAN GENDER UNTUK MEMBENTUK LITERASI KRITIS GENERASI Z